



LAPORAN KINERJA 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN





LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

TIM PENULIS:

Tantri Endarini, Rini Ariswari, Abdul Karim Mukharomah, Ginanjar Puji Nugroho, Veronika Katrine, Bakti Budhi Rahayu, Siti Muzayamah, Mochamad Faisal, Sa'dullah, Hanum Sakina, Febriani Nur Saenpasari, Roza Erlinda, Rion Evrian Adiwanosa, Tedi Bagus Prasetyo Mulyo, Nurmala Eka Putri, Mila Baarik Imansari, Sahbuddin Dg. Palabbi.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Setditjen PPKL) Tahun 2024 telah selesai. Penyusunan LKj merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PPKL ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran selama tahun 2024.

Telah banyak capaian peningkatan manajemen kinerja untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL di tahun 2024 ini. Realisasi anggaran mencapai 98,52% dengan capaian output mencapai 97,5%. Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP lingkup Ditjen PPKL Tahun 2023 mencapai 79,04 poin (Kategori BB/Sangat Baik), sedangkan penyelenggaraan maturitas SPIP lingkup KLHK Tahun 2024 berada di level 3 (3,8 terdefinisi). Perbaikan untuk pemantauan capaian kinerja juga telah dilakukan dengan menerapkan pemantauan kinerja semua pejabat setiap triwulan dan pemantauan bulanan untuk semua unit kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja. Ditjen PPKL juga telah mengembangkan aplikasi E-Monev untuk pemantauan kinerja individu, sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan bagi kinerja pegawai. Selain itu Ditjen PPKL juga merupakan pembina dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (JF Pedal), dimana kriteria penilaian JF Pedal juga semakin ditingkatkan dan terus dilakukan upaya pembinaan terhadap JF Pedal yang ada di berbagai daerah.

Ditjen PPKL juga telah meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Jumlah Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah diterbitkan selama 2024 sebanyak 953 (sembilan ratus lima puluh tiga). Pelayanan terhadap pelaporan kinerja perusahaan melalui aplikasi SIMPEL sebanyak 11.158 layanan registrasi. Selama tahun 2024, telah tercapai 70 (tujuh puluh) rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan perundang-undangan di bidang PPKL, serta 43 (empat puluh tiga) Nota Kesepahaman.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Saran dan kritik membangun diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PPKL Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

C.H. Nety Widayati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen PPKL.

Perjanjian Kinerja Setditjen PPKL adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Indikator kinerjanya adalah: (a) SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai 79 poin; (b) Maturitas SPIP level 4; dan (c) Laporan Keuangan Ditjen PPKL yang tertib dan akuntabel.

Sekretariat Ditjen PPKL terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (a) Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan (b) Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Sasaran unit kegiatan masing-masing bagian adalah:

1. Efektivitas layanan program, evaluasi, hukum dan kerjasama teknik dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Efektivitas layanan umum, pengelolaan keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Alokasi awal anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2024 sebesar Rp. 62.412.721.000,- (*enam puluh dua milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*), kemudian direvisi menjadi Rp. 68.236.121.000,- (*enam puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*). Capaian penyerapan anggaran sebesar Rp. 67.224.744.491,- (*enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau sebesar 98,52%. Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Setditjen PPKL pada tahun 2024 sebesar 97,5%. Hasil penilaian SAKIP tahun 2023 sebesar 79,04, sedangkan hasil penilaian mandiri tahun 2024 sebesar 86,32 poin. Adapun nilai maturitas SPIP lingkup KLHK tahun 2024 sebesar 3,84.

Sasaran Unit Kerja : Efektivitas Layanan Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Ditjen PPKL

Alokasi anggaran awal untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 6.271.309.000,- lalu direvisi menjadi Rp. 5.950.402.000,-. Selama tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.936.724.846. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 115,55% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,77%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,16 dan efektivitas sebesar 1,01, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada dan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Sasaran Unit Kerja : Efektivitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Ditjen PPKL

Alokasi anggaran awal untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 56.141.412.000,- dan dilakukan revisi anggaran dengan pagu anggaran menjadi Rp. 62.285.719.000,-. Selama tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp. 61.288.019.645,-. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,40%, sehingga efisiensi kegiatan mencapai 1,02 dan efektivitas sebesar 1,00, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada dan seefektif tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia.....	3
1.5. Keuangan.....	4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	5
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024.....	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
2.4. Pohon Kinerja Tahun 2024.....	11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Metode Pengukuran	13
3.1.1. Pengukuran Kinerja	13
3.1.2. Pengukuran Penyerapan Anggaran	13
3.1.3. Efektivitas dan Efisiensi.....	13
3.2. Capaian Kinerja Setditjen PPKL	14
3.2.1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	38
3.2.2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.....	75
3.3. Realisasi Anggaran.....	82
3.4. Efisiensi	83
3.5. Efektivitas	84
BAB 4 PENUTUP.....	86
4.1. Kesimpulan	86
4.2. Saran.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL	4
Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2024	4
Tabel 3. Rencana Kerja Setditjen PPKL Tahun 2024	8
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2024.....	9
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024.....	9
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2024	10
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2024.....	10
Tabel 8. Capaian Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024.....	14
Tabel 9. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020-2023.....	15
Tabel 10. Kegiatan Layanan Kepegawaian Tahun 2024	21
Tabel 11. Implementasi Sistem Perekaman Kehadiran ASN Terintegrasi (SIKADIR).....	24
Tabel 12. Rekapitulasi Usulan Revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Ditjen PPKL	25
Tabel 13. Hasil Evaluasi Nilai Indeks RB Tahun 2023.....	29
Tabel 14. Responden Pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Keterkaitan Pegawai ASN Lingkup Ditjen PPKL.....	30
Tabel 15. Rekapitulasi Responden SPI Tahun 2024 Lingkup Ditjen PPKL	30
Tabel 16. Nilai LKE Pelaksanaan Zona Integritas Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2024.....	31
Tabel 17. Jenis Layanan pada Setiap Unit Kerja Lingkup Ditjen PPKL	31
Tabel 18. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dan 2024.....	33
Tabel 19. Daftar Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PPKL Tahun 2024.....	34
Tabel 20. Capaian Kinerja Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2024	38
Tabel 21. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2020-2024	39
Tabel 22. Tahapan Proses Penyusunan Rancangan RPJMN Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	40
Tabel 23. Revisi Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2024	42
Tabel 24. Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025	43
Tabel 25. Tahapan Penyusunan RKA K/L Deputi PPKL TA 2025	44
Tabel 26. Perubahan Perjanjian Kinerja Ditjen PPKL TA 2024.....	46
Tabel 27. Layanan Humas Liputan dan Publikasi Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2024	49
Tabel 28. Pengelolaan Media Sosial Ditjen PPKL Tahun 2024	51
Tabel 29. Kegiatan Webinar, Media <i>Briefing</i> dan Konferensi Pers Ditjen PPKL Tahun 2024..	51
Tabel 30. <i>Podcast</i> Ditjen PPKL Tahun 2024	51
Tabel 31. Advetorial Ditjen PPKL Tahun 2024	52
Tabel 32. Daftar Video Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2024	53
Tabel 33. Pemenuhan Data dan Informasi PPID Ditjen PPKL Tahun 2024.....	56
Tabel 34. Daftar Keputusan Menteri LHK.....	59
Tabel 35. Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional yang Diterbitkan Tahun 2024	59
Tabel 36. Daftar Fasilitas Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2024	61
Tabel 37. Daftar Fasilitas Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024.....	64
Tabel 38. Rekapitulasi Kerja Sama Dalam Negeri berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024.....	68
Tabel 39. Capaian Kinerja Kabag Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2024.....	76
Tabel 40. Nilai Maturitas SPIP KLHK Periode 2022-2024	82
Tabel 41. Capaian Penyerapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2024.....	82
Tabel 42. Efisiensi Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2024.....	83

Tabel 43. Efektivitas Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2024.....	85
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai SAKIP 2020-2023	2
Gambar 2. Nilai Maturitas SPIP 2021-2024	2
Gambar 3. Struktur Organisasi Setditjen PPKL	3
Gambar 4. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2023 dan 2024	4
Gambar 5. Struktur Program Ditjen PPKL	7
Gambar 6. Program dan Kegiatan Setditjen PPKL.....	8
Gambar 7. Pohon Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024.....	12
Gambar 8. Nilai SAKIP UKE I Lingkup KLHK Tahun 2022-2023	15
Gambar 9. Nilai PM Maturitas SPIP lingkup KLHK Tahun 2024.....	17
Gambar 10. Laporan Keuangan Ditjen PPKL Tahun 2024	17
Gambar 11. Partisipasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemantauan IKLH	18
Gambar 12. Data Pemantauan IKLH berdasarkan Jumlah Data per Indeks	18
Gambar 13. Partisipasi IRLH Kabupaten/Kota Tahun 2024	19
Gambar 14. Partisipasi IRLH Provinsi Tahun 2024	19
Gambar 15. Bagan Tahapan Penghitungan IKLH.....	20
Gambar 16. Tampilan Sistem Perekam Kehadiran ASN Terintegrasi (SIKADIR).....	24
Gambar 17. Sebaran Jaung PEDAL Se-Indonesia Tahun 2024	28
Gambar 18. Grafik Surat Ditjen dan Setditjen PPKL 2024	36
Gambar 19. Pelaksanaan Uji Kompetensi JF Arsiparis TUK Provinsi Jawa Tengah	37
Gambar 20. Pelaksanaan Bimbingan Teknis JFA untuk PPPK	38
Gambar 21. Penambahan dan Pengurangan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2024	41
Gambar 22. Perubahan Struktur anggaran Setditjen PPKL TA 2024	41
Gambar 23. Laporan Bulanan Ditjen PPKL	47
Gambar 24. Laporan Triwulanan Selama Tahun 2024.....	48
Gambar 25. Evaluasi Pengisian Rencana Aksi dan Pelaporan di E-Monev Ditjen PPKL	49
Gambar 26. Cover Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2023	57
Gambar 27. Penandatanganan PKS antara Dirjen PPKL, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta PT. Sumitomo Forestry Indonesia	64
Gambar 28. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Ditjen PPKL.....	68
Gambar 29. Hasil Penilaian Ketaatan PROPER Tahun 2023-2024	70
Gambar 30. Tren Ketaatan PROPER.....	71
Gambar 31. Jumlah Eco-inovasi.....	72
Gambar 32. Nilai Absolut Kontribusi Perbaikan Lingkungan	72
Gambar 33. Penghematan dari Upaya Perbaikan Lingkungan	73
Gambar 34. Dana Bergulir di Masyarakat.....	73
Gambar 35. <i>Benchmarking</i> Sektoral Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	74
Gambar 36. Sebaran Kontribusi SDGs Dunia Usaha	75
Gambar 37. Penyusunan LK Tahunan <i>Unaudited</i> dan <i>Audited</i> Tahun 2023.....	79
Gambar 38. Penyimpanan BMN Rusak Berat.....	79
Gambar 39. Serah Terima Hibah Barang Persediaan ke Kelompok Masyarakat	80
Gambar 40. Penataan Ruang Kerja Menteri LH/BPLH	81
Gambar 41. Pengecatan Ruang Kerja Wamen LH/BPLH	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Eselon II dan III Setditjen PPKL Tahun 2024

BAB 1 PENDAHULUAN

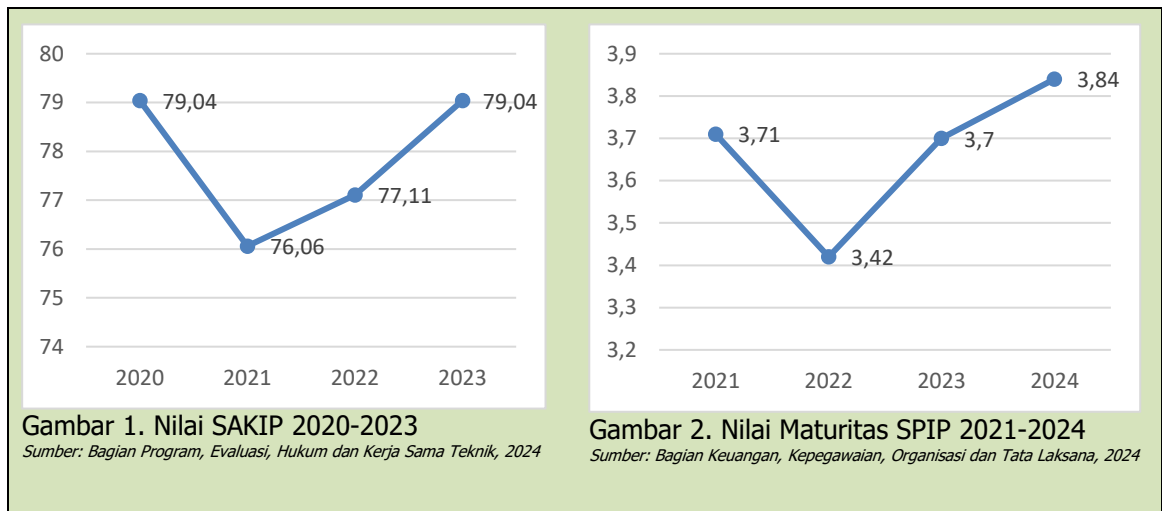
1.1. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari SAKIP sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP di dalam peraturan tersebut mempunyai arti rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pengembangan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL yaitu berupa perbaikan/penyesuaian pada menu Pelaporan Individu agar lebih fleksibel, serta penambahan fitur Pelaporan Triwulanan level Eselon II.

Laporan Kinerja selain dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja, juga digunakan untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian SAKIP Tahun 2020-2023 dan Maturitas SPIP Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2, berikut ini.



Sekretariat Ditjen PPKL (Setditjen PPKL) mempunyai kewajiban untuk menyusun LKj berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Setditjen PPKL tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Setditjen PPKL tahun 2024. Penyusunan PK Tahun 2024 dilaksanakan untuk semua Eselon II, III dan IV. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan LKj Setditjen PPKL Tahun 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Setditjen PPKL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.15/MenLHK/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setditjen PPKL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL. Fungsi Setditjen PPKL adalah:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, fasilitasi Kerjasama Teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Ditjen PPKL.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditjen PPKL mempunyai 2 (dua) bagian yaitu:

- Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana,

program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. Fungsi yang diselenggarakan adalah pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi; pelaksanaan urusan administrasi keuangan; pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

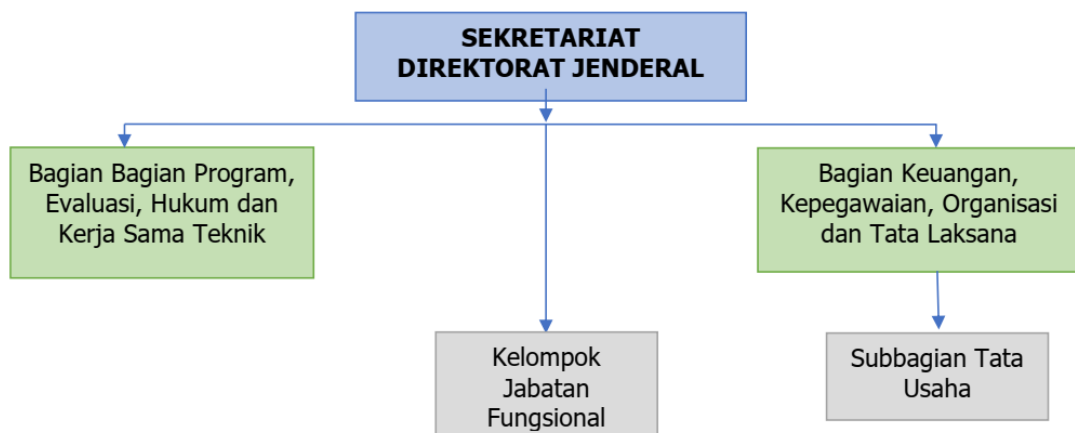
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Setditjen PPKL.

1.3. Struktur Organisasi

PermenLHK Nomor: P.15/MenLHK/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, menyebutkan bahwa Setditjen PPKL terdiri dari:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

Secara lengkap, struktur organisasi Setditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Struktur Organisasi Setditjen PPKL

Sumber : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Setditjen PPKL sebanyak 79 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci SDM Setditjen PPKL seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL

NO	Lokasi	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA/D1/D2		SLTP		SD		Jumlah		
		(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	Total
	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
a	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	0	0	4	4	15	11	0	0	1	1	0	0	0	0	20	16	36
b	Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	0	0	1	0	6	9	2	5	5	2	2	0	0	0	16	16	32
0	Sub Bagian Tata Usaha	0	0	0	0	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	3	5	8
		0	0	6	5	24	23	2	6	7	4	2	0	0	0	41	38	79

Sumber : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024

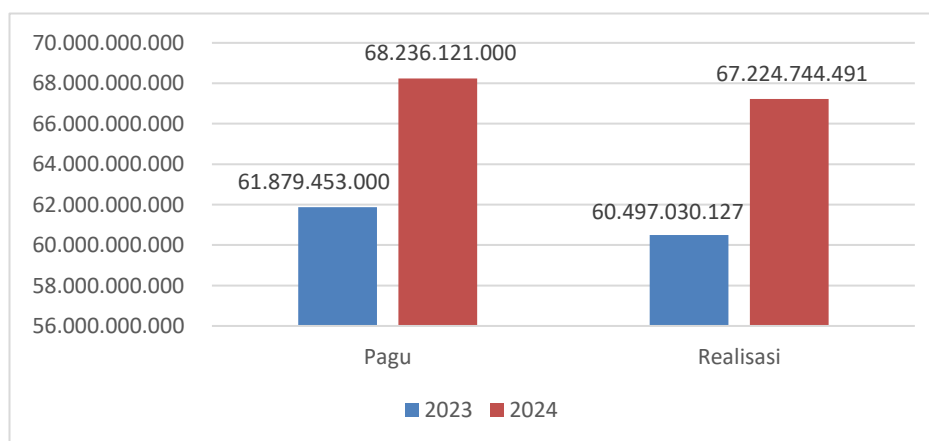
1.5. Keuangan

Anggaran awal Setditjen PPKL pada DIPA APBN Tahun 2024 sebesar Rp. 62.412.721.000,- (*enam puluh dua milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*), dan direvisi menjadi Rp. 68.236.121.000,- (*enam puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*) Rincian anggaran tiap bagian dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan perbandingan Pagu & Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4. Capaian realisasi anggaran mencapai 98,52%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (97,77%).

Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Setditjen PPKL Tahun 2024

No.	Bagian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
1	Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	6.271.309.000	5.950.402.000
2	Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	56.141.412.000	62.285.719.000
	Total	62.412.721.000	68.236.121.000

Sumber : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024



Gambar 4. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2023 dan 2024

Sumber : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Setditjen PPKL merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, merupakan komitmen bagi Setditjen PPKL yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja bertujuan untuk menciptakan arah dan fokus yang jelas, memberikan kerangka kerja yang terstruktur, dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Setditjen PPKL 2020-2024 merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Muatan pada Renstra Ditjen PPKL berisi penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran program yang telah dirumuskan untuk mendukung visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sebagai berikut:



VISI

- Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.

MISI

1

- Mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2

- Menjalin Kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan

3

- Menyediakan data dan informasi kualitas lingkungan terkini

TUJUAN

1

- Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

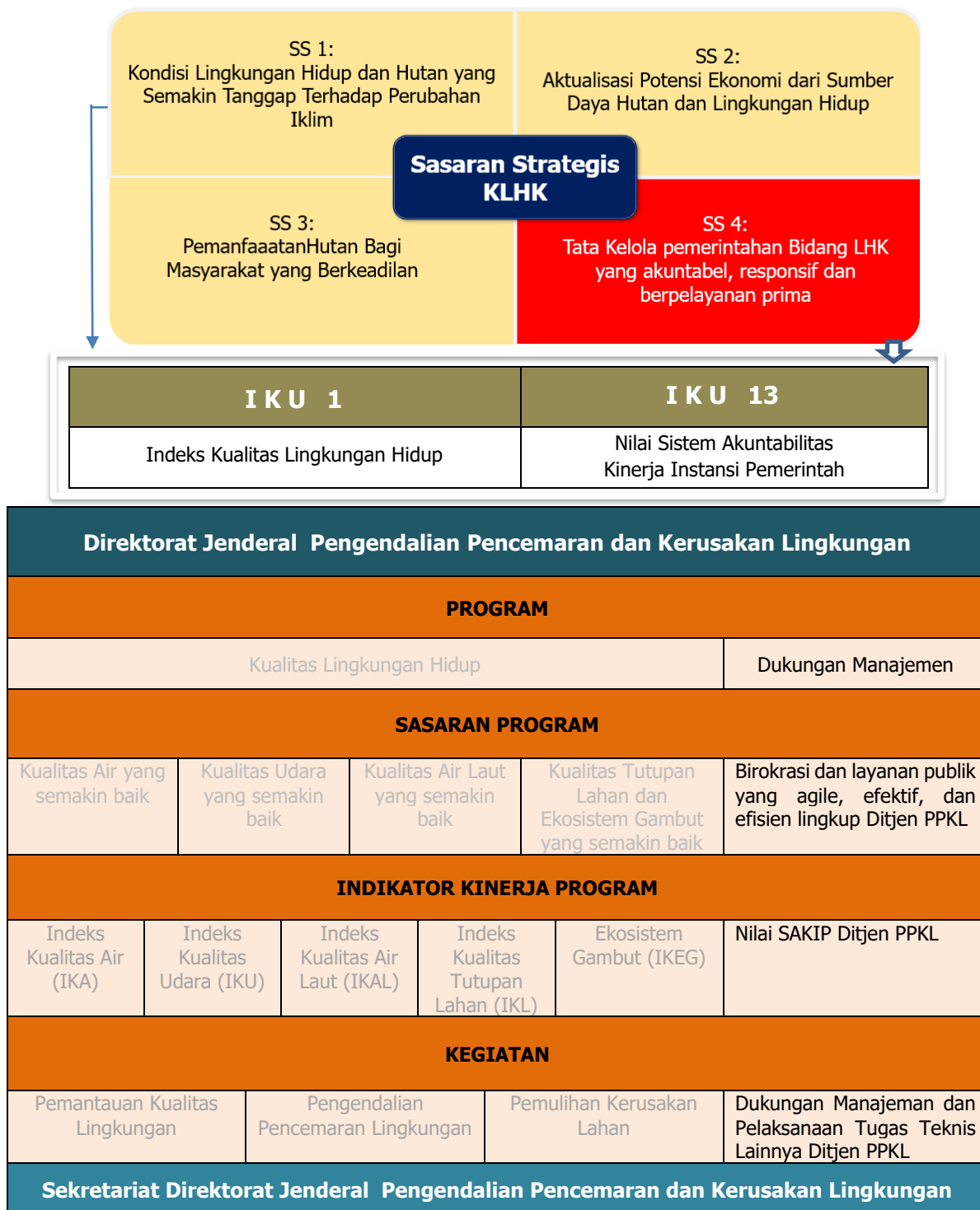
2

- Membangun Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan untuk Pengambilan Keputusan dan Edukasi Masyarakat

3

- Sinergi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Dari ketiga tujuan ini selanjutnya Renstra dirinci ke dalam penjabaran Sasaran Program Ditjen PPKL yang mengacu pada Sasaran Strategis KLHK dan disusun berdasarkan: 1) kewenangan Setditjen PPKL sebagai koordinator pelaksana tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL; 2) kepastian pembiayaan dari APBN; 3) tersedianya sarana dan prasarana kerja (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) dan tersedianya SDM yang memadai; 4) peraturan perundangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan 5) semakin tingginya komitmen terhadap terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Penjabaran *Cascading* Renstra Setditjen PPKL tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



KEGIATAN		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPKL		
SASARAN KEGIATAN		
Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien Lingkup Direktorat Jenderal PPKL		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PPKL	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PPKL	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PPKL
BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS		BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
RINCIAN OUTPUT		
Layanan Umum	Layanan Umum dan Layanan Perkantoran	

Gambar 5. Struktur Program Ditjen PPKL

Sumber : Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PPKL	Poin	79	80	81	78*	79*
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PPKL	Level	3	3	3	3	4
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PPKL	Laporan	1	1	1	1	1

*) revisi target

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan yaitu Renja Tahun 2024. Rencana kerja ini memuat arah kebijakan Setditjen PPKL selama tahun 2024 sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis jangka menengah dan jangka panjang. Sekretariat Ditjen PPKL menjadi penanggungjawab kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini.



Gambar 6. Program dan Kegiatan Setditjen PPKL

Sumber : Renja Setditjen PPKL Tahun 2024

Program dan kegiatan Setditjen PPKL dijabarkan lagi ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan KRISNA Renja Bappenas Tahun 2024, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Rencana Kerja Setditjen PPKL Tahun 2024

KODE	KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN	TARGET	PAGU (xRp .1000)
5457.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	62,412,721,000
5457.EBA.962	Layanan Umum		10,721,309,000
051	Layanan Dukungan Manajemen Ditjen PPKL		10,721,309,000
5457.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	51,691,412,000
001	Gaji dan Tunjangan		38,949,216,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		12,742,196,000

Sumber : Renja Setditjen PPKL Tahun 2024

Setditjen PPKL membawahi dua unit kerja eselon tiga yang disebut Bagian, yaitu, Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, serta Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Subbagian Tata Usaha berada di bawah

koordinasi Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Setiap Bagian merupakan penanggungjawab "Unit Kegiatan", yang merupakan sub kegiatan dari "Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL". Setiap Bagian tersebut bertanggungjawab pada "Sasaran Unit Kegiatan" yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Efektivitas layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja sama Teknik dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran (RENSTRA, RENJA, PK, RENCANA AKSI, RKAKL)	10 Dokumen	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik
		Jumlah dokumen pelaporan untuk penyelenggaraan SAKIP (Monev dan Laporan Kinerja)	18 Dokumen	
		Jumlah layanan kehumasan	24 Publikasi	
		Jumlah layanan data dan informasi	1 Dokumen	
		Jumlah penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	60 Dokumen	
		Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	60 Dokumen	
		Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	4 Dokumen	
		Jumlah kegiatan perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	20 Dokumen	
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	1 Laporan	
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	3750 Industri	
		Terselenggaranya kesekretariatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	34 Provinsi; 514 Kab/Kota	
		Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa	4 Laporan	
2	Efektivitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Keuangan	8 Laporan	Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
		Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Pengelolaan BMN	5 Laporan	
		Jumlah Laporan Layanan Rumah Tangga	8 Laporan	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	2 Laporan	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1 Laporan	
		Pelaksanaan Layanan Persuratan	100%	
		Jumlah Laporan Layanan Kearsipan	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP	5 Laporan	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	

Sumber : Renja Setditjen PPKL Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja (lampiran 1). Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Setditjen PPKL mempunyai 12 (dua belas) indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen PK tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya birokrasi dan layanan publik yang efektif dan efisien lingkup Ditjen PPKL	Nilai SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 79 di tahun 2024	Poin	79
		Level Maturitas SPIP	Level	4

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Laporan Keuangan Ditjen PPKL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1
2	Terselenggaranya Sekretariat IKLH	Laporan Hasil Pelaksanaan Sekretariat IKLH	Dokumen	1
3	Terselenggaranya Sekretariat PROPER	Laporan Hasil Pelaksanaan Sekretariat PROPER	Dokumen	1
4	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	2
5	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Laporan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Laporan	1
6	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Laporan	1
7	Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Laporan hasil pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Dokumen	1
8	Tersedianya data penggunaan BMN Tahun 2024	Laporan penggunaan BMN Tahun 2024	Dokumen	1
9	Terlaksananya urusan ketatausahaan	Laporan pelaksanaan ketatausahaan	Laporan	1

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Eselon III lingkup Setditjen PPKL dapat dilihat berikut ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2024

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	Efektivitas layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja sama Teknik dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran (RENSTRA, RENJA, PK, RENCANA AKSI, RKAKL)	Dokumen	10
		Jumlah dokumen pelaporan untuk penyelenggaraan SAKIP (Monev dan Laporan Kinerja)	Dokumen	18
		Jumlah layanan kehumasan	Publikasi	24
		Jumlah layanan data dan informasi	Dokumen	1
		Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa	Laporan	4
		Jumlah Penataan peraturan perundang-undangan	Dokumen	60
		Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	Dokumen	60
		Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	4
		Jumlah kegiatan perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	Dokumen	20
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	Laporan	1
		Jumlah Industri yang difasilitasi oleh kesekretariatan PROPER	Industri	3.375
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi oleh Sekretariat IKLH	Provinsi; Kab/Kota	38; 514

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2024

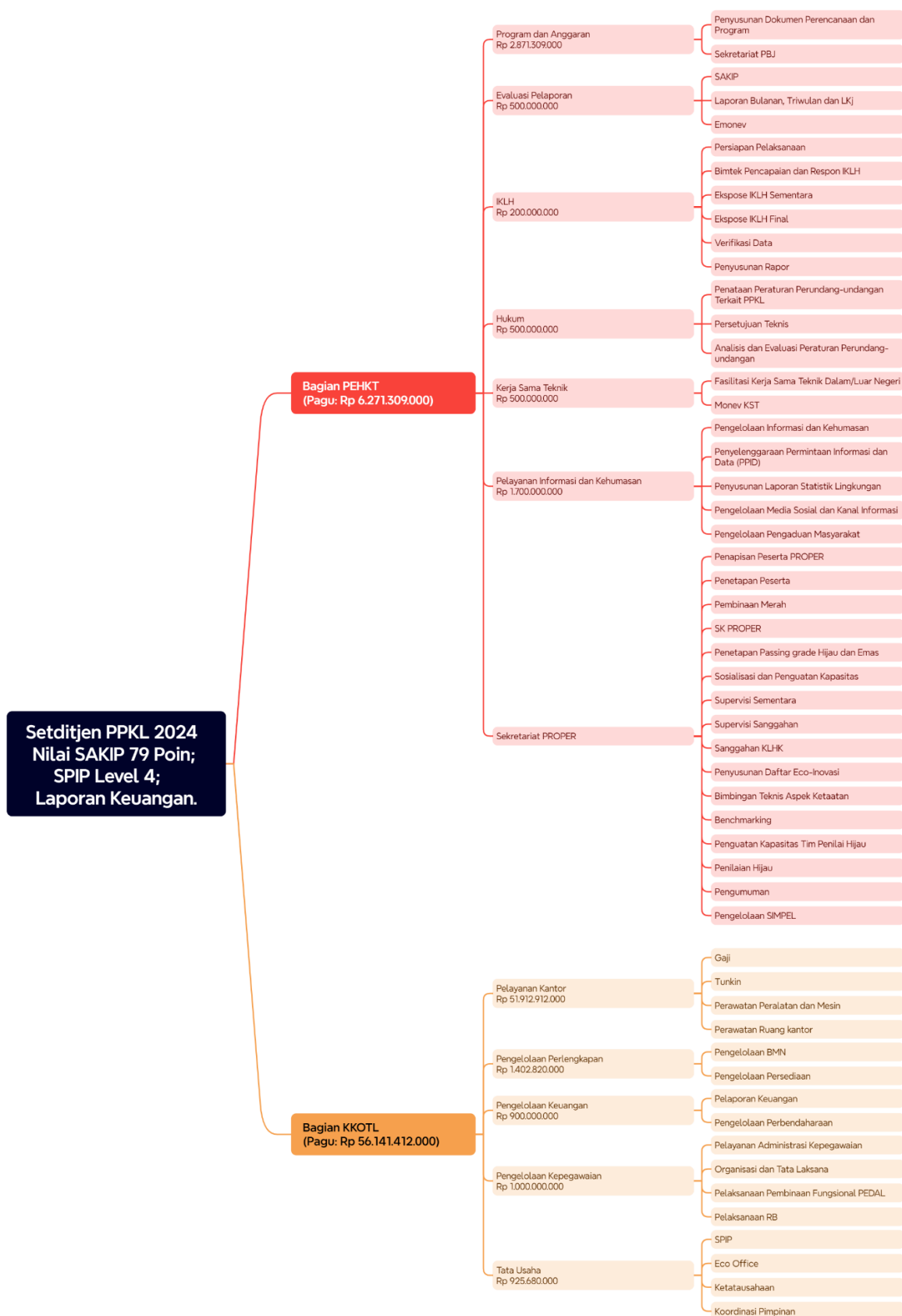
No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	Efektivitas layanan umum, pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	8
		Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	Laporan	12
		Jumlah Laporan pengelolaan BMN	Laporan	5

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
	dan Tata Laksana dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Layanan Rumah Tangga	Laporan	8
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	2
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Laporan	1
		Pelaksanaan Layanan Persuratan	%	100
		Jumlah Laporan Layanan Kearsipan	Laporan	1
		Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP	Laporan	5
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan	1

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

2.4. Pohon Kinerja Tahun 2024

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Berikut ini disajikan pohon kinerja Setditjen PPKL 2024 (Gambar 7).



Gambar 7. Pohon Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024
 Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metode Pengukuran

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian setiap target kinerja untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

3.1.2. Pengukuran Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya.

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

3.1.3. Efektivitas dan Efisiensi

Perhitungan efektivitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun Ini (\%)}}{\text{Capaian Kinerja Tahun Lalu (\%)}}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)}}$$

3.2. Capaian Kinerja Setditjen PPKL

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL mempunyai sasaran meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: (a) nilai SAKIP sebesar 79 poin pada tahun 2024; (b) level maturitas SPIP pada level 4; dan (c) laporan keuangan Ditjen PPKL yang tertib dan akuntabel sebanyak 1 laporan. Secara lengkap capaian Ditjen PPKL Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)	Capaian Kinerja 2023 (%)	Capaian 2024 terhadap Target Renstra 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya birokrasi dan layanan publik yang efektif dan efisien lingkup Ditjen PPKL	Nilai SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 79 di tahun 2024	Poin	79	-	-	101,3	-
		Level Maturitas SPIP	Level	4	3	75	100	75
		Laporan Keuangan Ditjen PPKL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	100	100	100
2	Terselenggaranya Sekretariat IKLH	Laporan Hasil Pelaksanaan Sekretariat IKLH	Dokumen	1	1	100	100	100
3	Terselenggaranya Sekretariat PROPER	Laporan Hasil Pelaksanaan Sekretariat PROPER	Dokumen	1	1	100	100	100
4	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	2	2	100	100	100
5	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Laporan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Laporan	1	1	100	100	100
6	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Laporan	1	1	100	100	100
7	Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Laporan hasil pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Dokumen	1	1	100	100	100
8	Tersedianya data penggunaan BMN Tahun 2024	Laporan penggunaan BMN Tahun 2024	Dokumen	1	1	100	100	100
9	Terlaksananya urusan ketatausahaan	Laporan pelaksanaan ketatausahaan	Laporan	1	1	100	100	100
		Rata-rata				97,5	100,12	97,5

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rerata capaian kinerja Setditjen PPKL pada tahun 2024 mencapai 97,5%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, karena terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu level maturitas SPIP yang masih berada pada level 3 dari target sebesar level 4. Untuk itu, akan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPKP dalam rangka meningkatkan capaian level maturitas SPIP Ditjen PPKL.

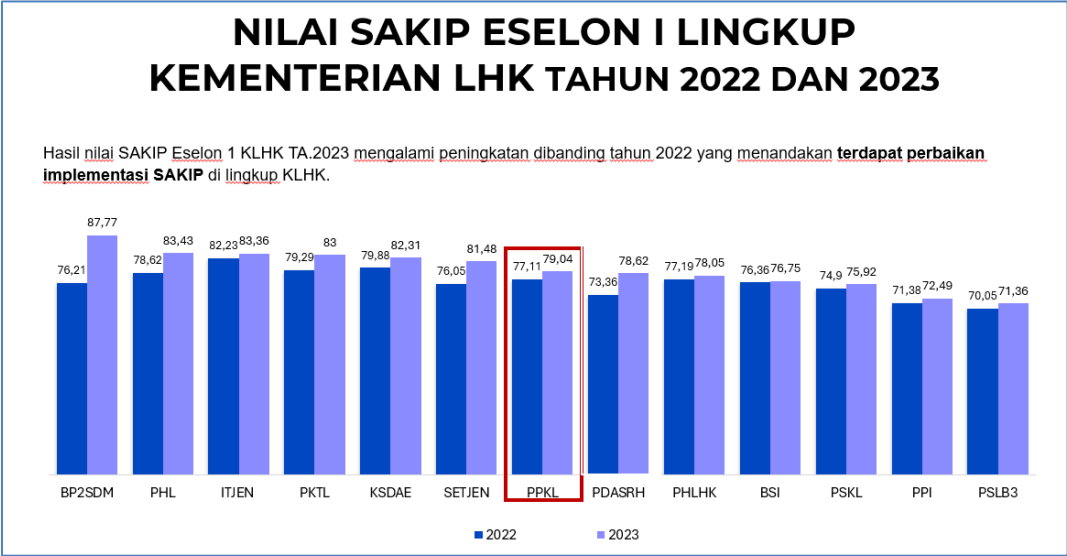
Pembahasan masing-masing capaian indikator unit kegiatan 2024 tersebut, diuraikan berikut ini.

1. Nilai SAKIP Ditjen PPKL

Pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2023 telah dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan menggunakan metode baru sesuai PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan peraturan ini, Biro Perencanaan sudah membangun aplikasi E-SAKIP untuk digunakan oleh masing-masing unit eselon I dan II dalam melakukan evaluasi mandiri. Pedoman untuk melaksanakan evaluasi mandiri telah dikeluarkan dengan nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KLHK. Selain itu Ditjen PPKL juga telah

mengeluarkan Perdirjen Nomor P.19/PPKL/SET.6/REN.0/12/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP lingkup Ditjen PPKL.

Nilai SAKIP Ditjen PPKL tahun 2023 sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP KLHK yaitu sebesar 79,04 dengan kategori BB (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP Tahun 2023 pada UKE I lainnya lingkup KLHK, nilai SAKIP Ditjen PPKL menempati urutan ke-7 atau lebih rendah daripada BP2SDM, Ditjen PHL, Itjen, Ditjen PKTL, Ditjen KSDAE dan Setjen. Akan tetapi, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan 6 (enam) UKE I lainnya yang nilainya berada pada rentang 71,36 – 78,62 (Gambar 8). Adapun hasil evaluasi SAKIP 2024 akan diketahui pada 2025.



Sumber: Biro Perencanaan KLHK, 2024

Gambar 8. Nilai SAKIP UKE I Lingkup KLHK Tahun 2022-2023

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2022 (77,11), namun terdapat komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang turun sebesar 1,25 poin (Tabel 9).

Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020-2023

No.	Komponen yang dinilai (2020)	Bobot (%)	Nilai 2020	Komponen yang dinilai (2021-2023)	Bobot (%)	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,64	Perencanaan Kinerja	30	23,70	24,60	24,78
2.	Pengukuran Kinerja	25	21,25	Pengukuran Kinerja	30	21,50	21,00	23,86
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,80	Pelaporan Kinerja	15	11,98	12,00	12,15
4.	Evaluasi Kinerja	10	7,18	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,88	19,50	18,25
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	15,17					
	Nilai Evaluasi		79,04	Nilai Evaluasi		76,06	77,11	79,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Beberapa upaya telah dilakukan Ditjen PPKL untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal, antara lain:

- a. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi kinerja dan penyusunan program kegiatan 2025-2029;
- b. Melaksanakan aktivitas pengukuran kinerja organisasi dan pegawai, menggunakan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL;
- c. Menggunakan aplikasi E-SAKIP Biro Perencanaan untuk melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SAKIP Internal;
- d. Menyusun dan menyebarkan kuisisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian dalam Penyelenggaraan SAKIP;
- e. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja unit kerja dan menyajikan dalam bentuk infografis periode bulanan;
- f. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja mingguan berdasarkan rencana aksi bulanan;
- g. Menyusun dan menyebarkan kuisisioner untuk mengetahui pemanfaatan E-Monev PPKL dalam pengukuran kinerja individu;
- h. Melakukan studi literatur terkait dengan penerapan *Environmental Performance Indeks (EPI)*;
- i. Menyusun draft awal SOP Penyusunan Strategi Kebijakan, SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Penyesuaian Anggaran;
- j. Melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SAKIP internal tahun 2023 dan 2024, berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Nomor P. 19 Tahun 2021, Surat Keputusan Menteri LHK, Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 dan Keputusan Dirjen PPKL Nomor SK.104/PPKL/SET.6/SET.1/11/2022.

2. **Maturitas SPIP**

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Integrasi parameter penilaian (*New SPIP*) meliputi: (a) parameter Manajemen Resiko Indeks (MRI); (b) penilaian kapabilitas APIP; (c) parameter Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Ketiga parameter penilaian tersebut dilekatkan pada penilaian komponen dan subunsur SPIP.

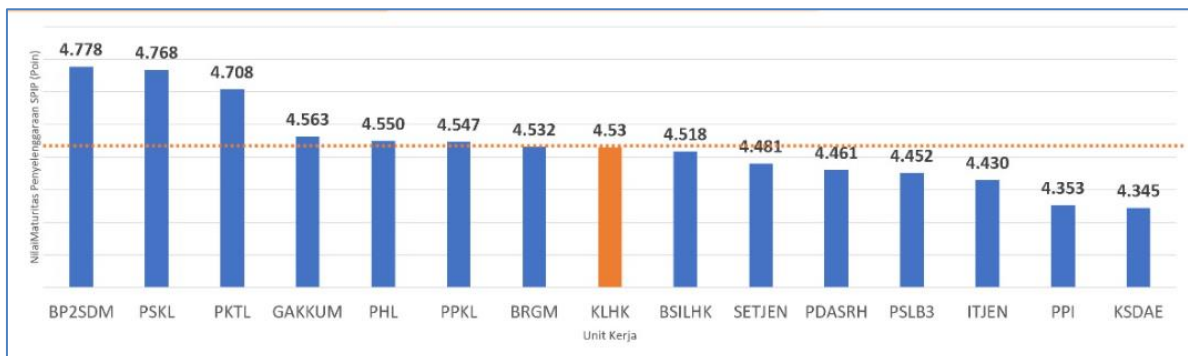
Nilai hasil PM Maturitas SPIP Terintegrasi Ditjen PPKL Tahun 2024 sebesar 4,54. Apabila dibandingkan dengan hasil PM Maturitas SPIP Tahun 2024 pada UKE I lainnya lingkup KLHK, nilai PM Maturitas SPIP Ditjen PPKL lebih tinggi dibandingkan 7 (tujuh) UKE I lainnya yang nilainya berada pada rentang 4,34 - 4,51 (Gambar 9). Nilai PM Maturitas SPIP Ditjen PPKL tersebut masih lebih tinggi 0,01 poin daripada hasil PM Maturitas SPIP KLHK yaitu sebesar 4,53.

Selanjutnya, setelah dilakukan Evaluasi Hasil PM Maturitas SPIP oleh BPKP, maka nilai Maturitas SPIP KLHK adalah sebesar 3,84. Nilai tersebut berlaku untuk semua Eselon I lingkup KLHK. Nilai Maturitas SPIP tersebut menunjukkan bahwa Level Maturitas SPIP KLHK masih berada pada level 3 dengan kategori terdefinisi, yang artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPKP agar nilai maturitas SPIP lingkup KLHK pada 2024 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu berada pada level 4. Beberapa area perbaikan antara lain: (a) sasaran dan indikator kinerja senantiasa berorientasi *outcome*; (b) menjaga *cascading* sasaran strategis

dan sasaran program; (c) perbaikan pengelolaan PNBP dan pengelolaan aset, khususnya terkait risiko pemisahan aset.

Sumber: Rocan KLHK, 2024



Gambar 9. Nilai PM Maturitas SPIP lingkup KLHK Tahun 2024

Bila dibandingkan hasil evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPKP sebesar 3,70, maka Nilai Maturitas SPIP KLHK Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin.

3. Laporan Keuangan Ditjen PPKL yang Tertib dan Akuntabel

Penyusunan Laporan Keuangan pada Ditjen PPKL mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ditjen PPKL. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Instansi (SAKTI) dan Monitoring Sistem Akuntansi Keuangan Instansi (MONSAKTI). SAKTI dan MONSAKTI modul Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara. Selama tahun 2024, Ditjen PPKL telah menyusun 2 (dua) macam Laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Ditjen PPKL dan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Ditjen PPKL yang terdiri dari 8 Laporan Keuangan (Gambar 10).

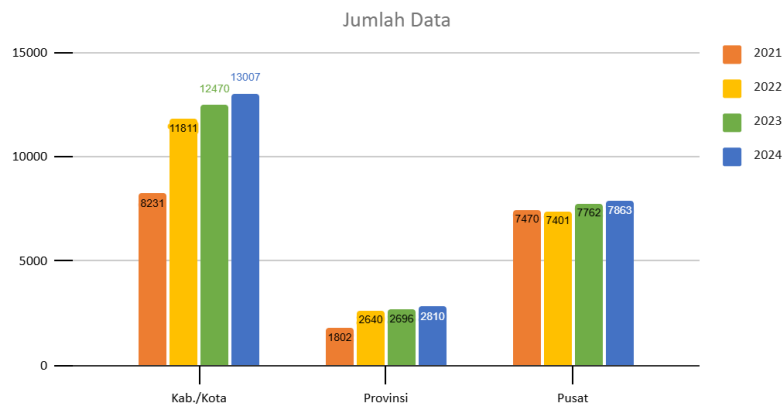


Gambar 10. Laporan Keuangan Ditjen PPKL Tahun 2024

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024

4. Pelaksanaan Sekretariat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

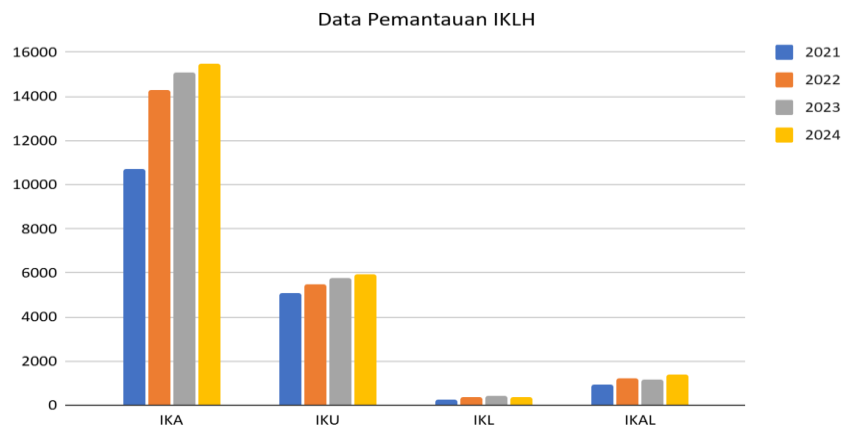
Penyelenggaraan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah dilaksanakan oleh KLHK sejak tahun 2009. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2020, perhitungan IKLH hanya dihitung di tingkat provinsi menggunakan data pemantauan yang berasal dari pemerintah pusat. Sejak 2021, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mulai diikutsertakan dalam penyelenggaraan perhitungan IKLH dengan turut melakukan pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi udara, air, lahan, dan air laut. Seluruh data pemantauan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi IKLH. Kontribusi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pemantauan kualitas lingkungan sebagai dasar perhitungan IKLH tahun 2021 - 2024 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini.



Gambar 11. Partisipasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemantauan IKLH

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah pemantauan yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota, dibandingkan antara tahun 2023 dan 2024. Peningkatan jumlah pemantauan untuk provinsi sebesar 4,23% sedangkan peningkatan jumlah pemantauan yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebesar 4,31%. Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah data pemantauan untuk setiap indeks yang dapat dilihat pada Gambar 12 di bawah ini. Pada Gambar 12 terlihat bahwa terdapat peningkatan data jumlah pemantauan untuk IKA, IKU, dan IKAL namun terdapat penurunan data jumlah pemantauan IKL.



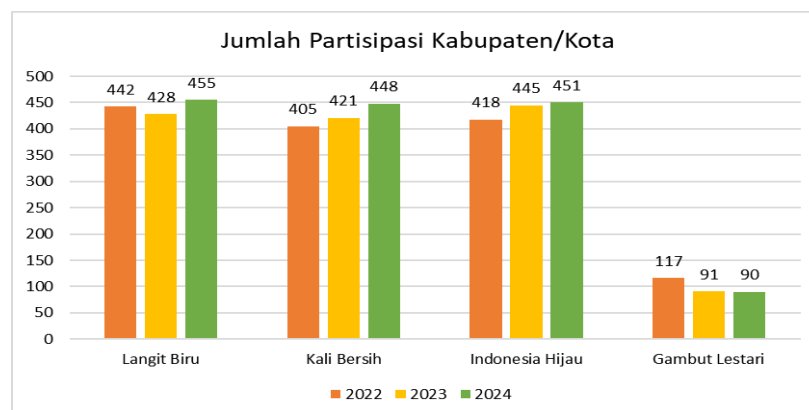
Gambar 12. Data Pemantauan IKLH berdasarkan Jumlah Data per Indeks

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah melimpahkan kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mencakup pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan/atau pengawasan lingkungan ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangan keikutsertaan pemerintah daerah, pada tahun 2021 disusun pula Indeks Rrespon Lingkungan Hidup (IRLH) sebagai instrumen dalam mengukur respon pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Evaluasi kinerja tersebut diperoleh dari inventarisasi respon pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pengeloaan lingkungan hidup melalui kegiatan:

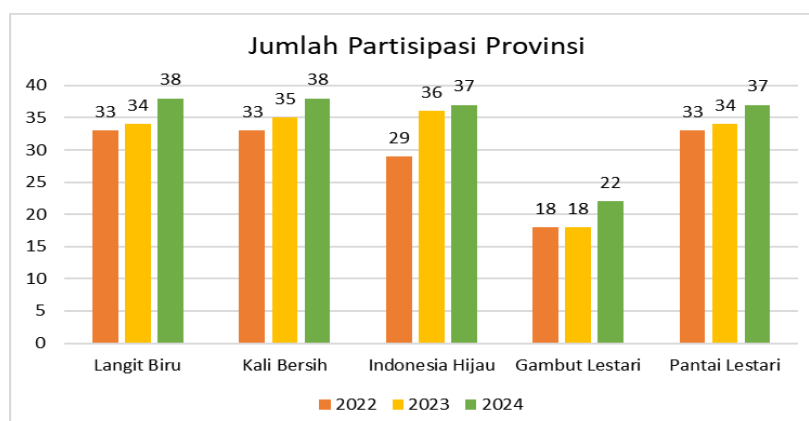
- Pengendalian Pencemaran Udara (Langit Biru)
- Pengendalian Pencemaran Air (Kali Bersih)
- Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Indonesia Hijau)
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Pantai Lestari)
- Pengendalian Kerusakan Eksositem Gambut (Gambut Lestari)

Inventarisasi respon pemerintah daerah dilakukan berdasarkan **aspek manajemen**, meliputi kebijakan dan peraturan, sumber daya manusia dan perencanaan perbaikan kualitas lingkungan, serta **aspek teknis**, meliputi implementasi kegiatan, pelibatan pemangku kepentingan, publikasi dan inovasi. Berdasarkan hasil analisis IRLH tersebut, dirumuskan penilaian dalam setiap program sehingga didapatkan nilai IRLH. Jumlah partisipasi pemerintah provinsi dan daerah dalam melakukan pengisian IRLH terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 13. Partisipasi IRLH Kabupaten/Kota Tahun 2024

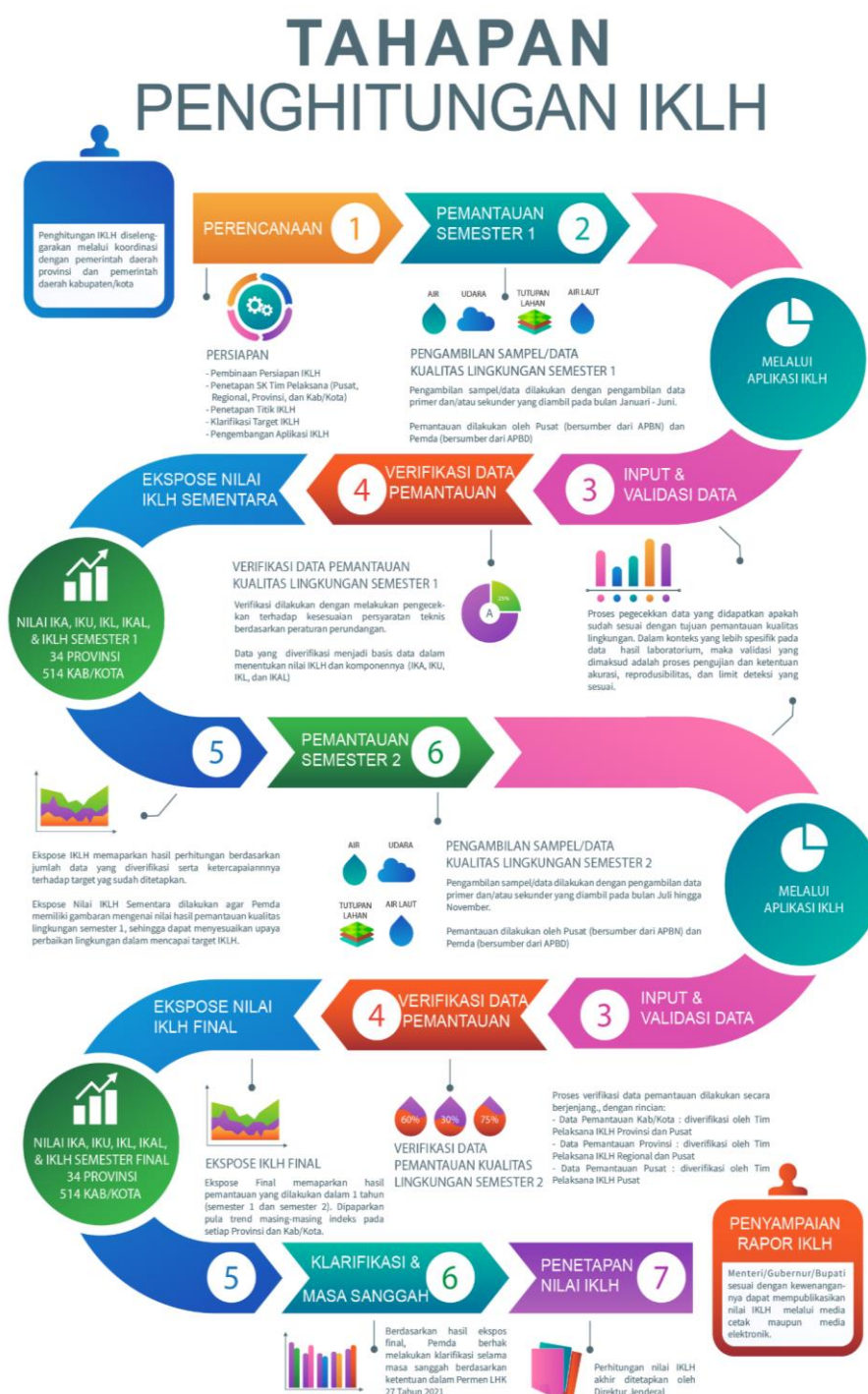
Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024



Gambar 14. Partisipasi IRLH Provinsi Tahun 2024

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Ditjen PPKL mempunyai kewajiban menjaga dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan perhitungan IKLH tersebut agar dapat terselenggara sesuai jadwal yang sudah ditentukan, memenuhi kaidah ilmiah yang sudah ditetapkan, dilaksanakan oleh petugas-petugas/pegawai yang berkompeten dan terlatih, sehingga data informasi yang dihasilkan berkualitas dan valid. Sekretariat IKLH membuat tahapan kegiatan dan tata waktu pelaksanaan penyelenggaraan IKLH agar tugas pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perhitungan IKLH dapat berjalan efektif (Gambar 15).



Gambar 15. Bagan Tahapan Penghitungan IKLH
Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

5. Pelaksanaan Sekretariat PROPER

PROPER merupakan salah satu inovasi pendekatan tata kelola lingkungan yang dikenal dengan *Public Voluntary Regulation* (PVR). Pendekatan ini memiliki keunggulan karena sifatnya yang mengkombinasikan antara otoritas negara dengan berbagai stakeholders. PROPER tidak hanya berorientasi untuk “triple helix” melainkan “N” helix atau membuka peluang siapapun berpartisipasi aktif dalam pengarusutamaan peran sektor *private* (bisnis) dalam lingkungan dan sosial.

Inovasi PROPER dapat dilihat dari kolaborasi tiga strategi regulasi. Pertama, *public disclosure* kinerja lingkungan dan sosial melalui warna (emas, hijau, biru, merah, hitam) yang memudahkan publik dan investor untuk menilai risiko kredit perbankan. Kedua, *technical regulatory assistance* yang melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi. Ketiga, *green leadership* untuk menjawab topik *Extraordinary Turnaounds* yang terdiri dari upaya mengakhiri kemiskinan; mengurangi ketimpangan; pemberdayaan perempuan; transisi energi bersih; serta sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi ketiga strategi di atas efektif menciptakan ekosistem yang menghasilkan 1.762 eco-inovasi dan dampak sosial di masyarakat.

Evaluasi PROPER dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Secara Elektronik (SIMPEL). Tahun 2024 berhasil menyelesaikan 10.989 layanan registrasi ke perusahaan dan 169 layanan registrasi ke instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Kabupaten/kota. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 total usaha/atau kegiatan yang sudah memiliki akun SIMPEL sebanyak 35.594 akun perusahaan dan 356 akun instansi/DLH.

6. Pengelolaan Kepegawaian

Kegiatan pengelolaan kepegawaian secara garis besar terdiri atas 2 (dua) layanan, yaitu: layanan administrasi kepegawaian serta layanan organisasi dan tata laksana.

a. Layanan Administrasi Kepegawaian

Berikut ini diuraikan masing-masing kegiatan layanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.

1) Layanan Kepegawaian

Terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator layanan kepegawaian pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 10. Kegiatan Layanan Kepegawaian Tahun 2024

No	Layanan Kepegawaian	Jumlah	Satuan
1.	Pengajuan usulan kenaikan pangkat Dengan rincian : - Periode Juni sebanyak 5 usulan - Periode Agustus sebanyak 15 usulan - Periode Oktober sebanyak 8 usulan - Periode Desember sebanyak 2 usulan	30	orang pegawai
2.	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	120	orang pegawai
3.	Pengajuan cuti PNS sebanyak 496 orang terdiri dari cuti tahunan sebanyak 440 orang, cuti alasan penting 34 orang, cuti sakit sebanyak 15 orang, cuti besar 7 orang	496	pemberian cuti
4.	Pengusulan penerimaan penghargaan satya lencana X tahun sebanyak 0 orang, satya lencana XX tahun sebanyak 0 orang, dan satya lencana XXX tahun sebanyak 0 orang	0	orang pegawai
5.	- Pelaksanaan ujian dinas TK I 4 orang - Pengakuan izajah 3 orang	7	orang pegawai

No	Layanan Kepegawaian	Jumlah	Satuan
6.	Pelaksanaan seleksi 4 kriteria	3	orang pegawai
7.	Penerbitan Surat Izin Belajar	8	orang pegawai
8.	Penerbitan SK Pencantuman gelar	1	orang pegawai
9.	- Alih tugas eksternal lingkup KLHK sebanyak 0 orang - Alih tugas internal KLHK sebanyak 1 orang	2	orang pegawai
10.	Usulan Kartu isteri (KARIS 17 orang) dan usulan Kartu Suami (KARSU 10 orang) ke Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK	27	orang pegawai
11.	Usulan Kartu Identitas Pegawai lingkup Ditjen PPKL	44	orang pegawai
12.	- Pengusulan dokumen pensiun yang memasuki Batas Usia Pensiun/BUP 10 orang - Pensiun Pegawai P3K sebanyak 1 orang	11	orang pegawai
13.	Penyelesaian pensiun pada TASPEN	3	orang pegawai
14.	Pengelolaan aplikasi SIMPEG dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) lingkup Ditjen PPKL	295	orang pegawai
15.	Pengelolaan kehadiran pegawai melalui aplikasi SIKADIR sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan (PNS,P3K)	295	orang pegawai
16.	Pengangkatan PNS/P3K tahun 2023	40	orang pegawai
17.	Penerbitan SK lingkup Ditjen PPKL: - SK Pengangkatan PPNPN Lingkup Ditjen PPKL sebanyak 26 orang pegawai - SK KPA Pengangkatan Pengemudi dan Pramubakti sebanyak 23 orang pegawai - SK Pemberhentian Pengemudi sebanyak 1 orang	50	SK
18.	- Penerbitan SPMT Jabatan Fungsional Tertentu 10 orang - Penerbitan SPMT Tugas Belajar 2 orang - Penerbitan SPMT Struktural Eselon II 3 orang	15	SPMT
19.	- Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) Eselon II 3 orang	3	SPP
20.	- Usul kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 3 orang - Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JF Pranata Keuangan APBN Mahir) 1 orang	3	Orang Pegawai
21.	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional tertentu	17	orang pegawai
22.	Penetapan Angka Kredit Integrasi bagi pejabat fungsional PEDAL yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat dalam PEDAL (Instansi Pusat, DLH Provinsi/Kota/Kab)	27	orang pegawai
23.	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dengan Melakukan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Konsultasi/Koordinasi Teknis jabatan fungsional PEDAL	24	Pelaksanaan Sosialisasi/ Konsultasi/Koordinasi Teknis Jafung PEDAL

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

2) Peningkatan Kapasitas SDM Lingkup Direktorat Jenderal PPKL

a) Pelaksanaan Diklat yang Dikuti oleh Pegawai Lingkup Ditjen PPKL

➤ Diklat Kepemimpinan

Pelaksanaan Diklat kepemimpinan lingkup Ditjen PPKL diikuti oleh pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV diantaranya:

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebanyak 1 orang pegawai/pejabat;
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 2 orang pegawai/pejabat.

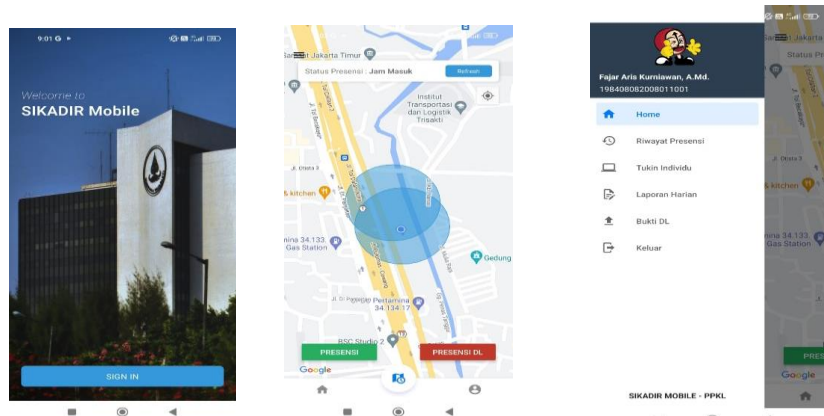
➤ Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu

Pada tahun 2024, para pejabat fungsional tertentu telah diikutsertakan dalam Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional, antara lain:

- Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Tipe C) sebanyak 9 orang;
- Pelatihan Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C sebanyak 1 orang;
- Diklat *Certificate Procurement Specialist* (CPSp) sebanyak 1 orang;

- *Refreshment* Jabatan Fungsional PEDAL sebanyak 38 orang.
- Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Lingkup Ditjen PPKL
Pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai lingkup Direktorat Jenderal PPKL diantaranya:
 - Mengikuti ToF Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM LHK sebanyak 6 orang;
 - Pelatihan Drone sebanyak 3 orang;
 - Peningkatan Kapasitas Penulisan sebanyak 25 orang;
 - Sosialisasi Pengelolaan Kearsipan sebanyak 41 orang.
- b) Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024 Serta Evaluasi Periodik Dan Tahunan
Ditjen PPKL telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SKP dengan narasumber dari BKN dan Biro Kepegawaian KLHK. Penyusunan SKP didasarkan pada PermenPAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja. Dalam penyusunan SKP pegawai tahun 2024, juga diterapkan penyusunan dan penilaian SKP secara triwulan..
- c) Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian Lingkup Ditjen PPKL
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian dan optimalisasi kegiatan layanan terkait pengurusan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pencatatan kehadiran, pengelolaan SIMPEG/SIASN/IPASN, Penyusunan ANJAB ABK, usulan uji kompetensi, usulan penghargaan satyalencana karyasatya, penyusunan proses bisnis/SOP, usulan perpindahan/mutasi pegawai, usulan karya siswa, penyusunan SKP/P2K pegawai dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan kegiatan peningkatan layanan administrasi kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal PPKL.
- d) Penerapan Sistem Kehadiran Melalui Aplikasi SIKADIR
Perhitungan pemberian Tunjangan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PPKL diberikan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Implementasi perhitungan tunjangan kinerja dan pengukuran kehadiran pegawai dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Kehadiran ASN Terintegrasi (SIKADIR).

Dengan menggunakan Aplikasi Sikadir lebih memudahkan dalam penghitungan tunjangan kinerja serta pelaporan harian baik itu saat *Work From Office (WFO)* atau saat melakukan Perjalanan Dinas. Pada tahun 2024 aplikasi SIKADIR memakai versi 7.0 berbasis aplikasi android yang terinstall di smartphone serta aplikasi absensi elektronik ini telah berbasis GPS pada gawai masing-masing pegawai. Dengan update fitur perhitungan pajak TER (Tarif Efektif Rata-Rata).



Gambar 16. Tampilan Sistem Perekaman Kehadiran ASN Terintegrasi (SIKADIR)
 Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

Berikut terdapat fitur pengelolaan data administrator pada admin seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Implementasi Sistem Perekaman Kehadiran ASN Terintegrasi (SIKADIR)

No	Implementasi Sistem Perekaman Kehadiran ASN Terintegrasi (SIKADIR)	
	Keluaran	Indikator Keluaran (Kuantitatif)
1.	Data Pegawai	1. Data Pegawai
2.	Data Presentasi Pegawai	2. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Individu (1.A)
3.	Data Hari Libur	3. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja (Lampiran II)
4.	History Daftar Hadir Pegawai	4. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan (Lampiran IV)
5.	Laporan Harian Pegawai	5. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan (Lampiran I.D)
6.	Perhitungan Tunjangan Kinerja Individu	6. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Neto
7.	History Daftar Hadir	7. Rekapitulasi Jadwal Pegawai
8.	Rekapitulasi Kehadiran Pegawai	8. Laporan Harian Pegawai
9.	Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Pegawai	9. Catatan Cuti, Sisa Cuti
10.	Rekapitulasi Kelas Jabatan	10. Kehadiran Serta Alpa
11.	Rekapitulasi Jadwal Pegawai	11. Rekapitulasi Uang Makan
12.	Catatan Cuti, Sisa Cuti	12. Laporan Dinas Pegawai
13.	Kehadiran Serta Alpa	13. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja 13
14.	Rekapitulasi Uang Makan	14. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan 13 (Lampiran V)
15.	Laporan DL	15. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan 13 (Lampiran I.D)
16.	Perhitungan Pajak	16. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja 14 (Lampiran II)
17.	Golongan Jabatan	17. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan 14 (Lampiran V)
18.	Daftar Potongan	18. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan 14 (Lampiran I.D)
19.	Data Gaji Pegawai	19. Perhitungan Pajak
20.	Clear Data Gaji Pegawai	20. Perhitungan Pajak ke 13
21.	Upload Perjadin dan Pembahasan	21. Perhitungan Pajak ke 14

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

b. Layanan Organisasi dan Tata Laksana

Berikut ini diuraikan masing-masing kegiatan layanan organisasi dan tata laksana yang dilaksanakan selama tahun 2024.

1) Evaluasi Struktur Organisasi

pada tahun 2024 Ditjen PPKL telah melakukan evaluasi kelembagaan tersebut dengan memberikan masukan melalui pengisian kuisisioner yang diberikan oleh Biro Kepegawaian. Data tersebut diolah dan diproses oleh Biro Kepegawaian KLHK untuk disampaikan kepada Kementerian PAN RB sebagai bahan evaluasi Organisasi KLHK secara keseluruhan.

2) Evaluasi Proses Bisnis lingkup Direktorat Jenderal PPKL

Ditjen PPKL pada tahun 2024 telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis lingkup PPKL dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi, kualitas layanan publik, dan mendukung pencapaian tujuan strategis KLHK. Beberapa hal yang dilakukan evaluasi yaitu kesesuaian peta bisnis proses dengan kondisi eksisting, tidak terjadi tumpang tindih/*overlap* antara satu peta proses bisnis dengan peta proses bisnis lainnya, mengidentifikasi kelemahan/inefisiensi dan ketidaksesuaian dalam metode penyusunan proses bisnis.

3) Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Lingkup Direktorat Jenderal PPKL

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal PPKL telah melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: SK.53/PPKL/SET.6/PEG.0/7/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal PPKL. Evaluasi dilakukan berupa evaluasi mandiri dengan cara melakukan identifikasi tahapan pada Peta Proses Bisnis Level 4. Identifikasi evaluasi SOP terkait penggabungan, pemisahan dan perubahan judul kegiatan. Evaluasi mandiri tersebut dilakukan berdasarkan masukan dari unit eselon 2 lingkup Direktorat Jenderal PPKL ketika melakukan penyusunan SOP. Hasil evaluasi SOP tersebut menjadi dasar untuk melakukan evaluasi Peta Proses bisnis.

4) Penyusunan Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal PPKL

Pada tahun 2024, telah dilakukan usulan revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan lingkup Ditjen PPKL. Penyusunan kebutuhan pegawai lingkup Ditjen PPKL berpedoman pada Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 1097/MENLHK/SETJEN/PEG.3/10/2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2027 yang merupakan revisi dari SK Nomor 689 Tahun 2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berikut rekapitulasi usulan revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan lingkup Ditjen PPKL:

Tabel 12. Rekapitulasi Usulan Revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Ditjen PPKL

NO	NAMA JABATAN		ABK
A	Struktural		25
	1	Direktur Jenderal	1
	2	Sekretaris Direktorat Jenderal	1
	3	Direktur	5
	4	Kepala Sub Direktorat	10

NO	NAMA JABATAN		ABK
	5	Kepala Bagian	2
	6	Kepala Sub Bagian	6
B	Pelaksana		308
	1	Penelaah Teknis Kebijakan	85
	2	Pengolah Data dan Informasi	94
	3	Pengadministrasi Perkantoran	88
	4	Pengelola Umum Operasional	39
	5	Operator Layanan Operasional	2
C	Fungsional		937
	1	Analisis Anggaran Ahli Muda	2
	2	Analisis Anggaran Ahli Pertama	2
	3	Analisis Hukum Ahli Madya	3
	4	Analisis Hukum Ahli Muda	3
	5	Analisis Hukum Ahli Pertama	3
	6	Analisis Kebijakan Ahli Madya	3
	7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3
	8	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3
	9	Analisis Kebijakan Ahli Utama	3
	10	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	0
	11	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	0
	12	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	0
	13	Analisis Kepegawaian Mahir	0
	14	Analisis Kepegawaian Penyelia	0
	15	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	3
	16	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	5
	17	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	5
	18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	2
	19	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	4
	20	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	7
	21	Arsiparis Ahli Madya	3
	22	Arsiparis Ahli Muda	14
	23	Arsiparis Ahli Pertama	19
	24	Arsiparis Mahir	18
	25	Arsiparis Penyelia	16
	26	Arsiparis Terampil	16
	27	Penata Laksana Barang Mahir	9
	28	Penata Laksana Barang Penyelia	9
	29	Penata Laksana Barang Terampil	10
	30	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya	1
	31	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	2
	32	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	2
	33	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	5
	34	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
	35	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	14
	36	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama	10
	37	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	103
	38	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	157
	39	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	170
	40	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	35
	41	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	55
	42	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	55
	43	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	3
	44	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	3
	45	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	3

NO	NAMA JABATAN		ABK
	46	Perencana Ahli Madya	16
	47	Perencana Ahli Muda	21
	48	Perencana Ahli Pertama	21
	49	Perencana Ahli Utama	1
	50	Pranata Humas Ahli Madya	2
	51	Pranata Humas Ahli Muda	3
	52	Pranata Humas Ahli Pertama	5
	53	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	54	Pranata Keuangan APBN Penyelia	11
	55	Pranata Keuangan APBN Terampil	11
	56	Pranata Komputer Ahli Muda	14
	57	Pranata Komputer Ahli Pertama	21
	58	Pranata Komputer Penyelia	2
	59	Pranata Komputer Mahir	2
	60	Pranata Komputer Terampil	2
	61	Pranata SDM Aparatur Mahir	2
	62	Pranata SDM Aparatur Penyelia	2
Jumlah Rekapitulasi Anjab Dan ABK Lingkup Ditjen PPKL			1270

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

7. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)

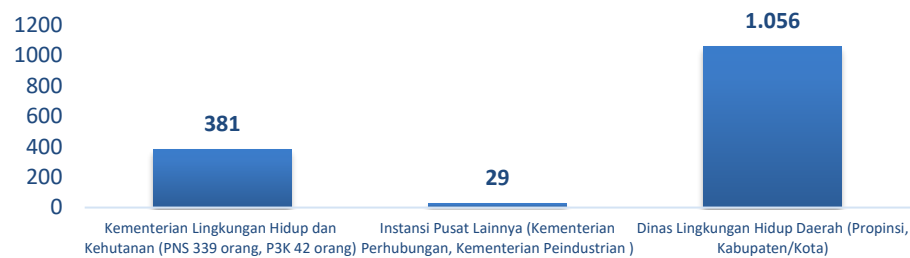
Direktorat Jenderal PPKL merupakan unit pembina teknis JF. PEDAL dan memiliki tugas melakukan pembinaan teknis dan non teknis JF. PEDAL serta memberikan masukan terkait penyusunan pedoman dan kebijakan JF. PEDAL. Untuk itu, Ditjen PPKL telah melakukan beberapa kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan Pusdiklat KLHK melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional sebanyak 4 angkatan;
- b. Pembinaan teknis dan non teknis kepada unit pengguna JF. PEDAL, baik di pusat maupun daerah berupa sosialisasi, bimbingan teknis maupun konsultasi diantaranya:
 - 1) Pemerintah Pusat: Ditjen PSLB3 KLHK, Pusart Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan
 - 2) P3E: Bali dan Nusa Tenggara;
 - 3) Pemerintah Provinsi: DLH Provinsi DKI Jakarta, DLH Provinsi Ternate, Dinas Cipta Marga Provinsi Jawa Tengah dan DLH Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Sulawesi Utara, DLH Provinsi Gorontalo, DLH Provinsi Sulawesi Tenggara, DLH Provinsi NTB, DLH Provinsi NTT, DLH Provinsi Aceh, DLH Provinsi Jambi
 - 4) Pemerintah Kabupaten/Kota: DLH Kabupaten Bulukumba, DLH Kota Payakumbuh, DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar, DLH Kabupaten Mojokerto, DLH Kota Madiun, DLH Kabupaten Goa, DLH Kabupaten Bandung dan Kabupaten Solok
- c. Memberikan masukan terkait penyusunan kebijakan JF. PEDAL
 - 1) Penyusunan kebijakan tentang standar kompetensi JF. PEDAL, dan telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PEDAL, yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri LHK Nomor SK 56 tahun 2017 tentang standar kompetensi JF. PEDAL
 - 2) Pembahasan Revisi Pedoman Formasi JF. PEDAL dengan beberapa DLH dan Biro Kepegawaian KLHK. Pembahasan ini bertujuan untuk merevisi

Permen LHK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional PEDAL.

- d. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui *refreshment* pejabat fungsional PEDAL lingkup Ditjen PPKL

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 28 – 29 November 2024. Tujuannya untuk menambah wawasan dan kompetensi para pejabat fungsional PEDAL di lingkup Ditjen PPKL dalam bidang teknis terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Saat ini pejabat fungsional PEDAL yang tersebar di pusat maupun daerah berjumlah kurang lebih 1.466 orang, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 17 di bawah ini.



Gambar 17. Sebaran Jafung PEDAL Se-Indonesia Tahun 2024

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal KLHK telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di KLHK. Pada Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan RB menggunakan instrumen kebijakan yang secara teknis diatur di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.182/2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024.

Dengan adanya dinamika perubahan, KLHK melakukan penajaman dokumen *Road Map* RB KLHK 2020-2024 untuk memastikan pelaksanaan yang lebih fokus, efektif dan berdampak dengan menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1326/MENLHK/SETJEN/OTL.0/12.2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024. *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam 2 (dua) fokus yaitu RB General dan RB Tematik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh KemenPANRB dalam pelaksanaan RB, Indeks RB KLHK Tahun 2023 adalah 80,93 dengan Kategori "A" dengan target awal sebesar 83 poin (Tabel 13). Untuk Tahun 2024 masih belum didapatkan hasil nilai evaluasi oleh KemenpanRB.

Tabel 13. Hasil Evaluasi Nilai Indeks RB KLHK Tahun 2023

NO	PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1.	RB General	100	74,98
2.	RB Tematik	10	5,95
	Indeks RB	110	80,93 (A-)

Sumber: *Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024*

Dalam mendukung pelaksanaan RB tingkat Kementerian, Direktorat Jenderal PPKL melakukan kegiatan yang berfokus dalam mencapai target tahunan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan RB KLHK, diantaranya adalah:

a. Reformasi Birokrasi General:

1) Pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK

Tujuan Survei Indeks BerAKHLAK yaitu mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi diantaranya mengenai implementasi *core values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi. Tujuan Survei Keterkaitan Pegawai ASN (*Employee Engagement*) yaitu mempertahankan dan meningkatkan loyalitas *the right talent* yang telah memberikan performa yang optimal untuk organisasi; meningkatkan rasa kebanggaan menjadi ASN; dan meningkatkan daya tarik bagi *targeted talent* untuk bergabung menjadi ASN. Selain itu juga dilakukan Evaluasi Implementasi BerAKHLAK dengan tujuan mengevaluasi komitmen instansi pemerintah dalam internalisasi BerAKHLAK. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Sosialisasi Pengisian Survei Indeks BerAKHLAK dan Evaluasi Budaya Kerja 2024;
- Pengumpulan data responden dalam rangka Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Keterkaitan Pegawai ASN (*Employee Engagement*) Lingkup Ditjen PPKL;
- Pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Keterkaitan Pegawai ASN (*Employee Engagement*);
- Pengumpulan data dukung Evaluasi Implementasi BerAKHLAK.

Responden Pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Keterkaitan Pegawai ASN (*Employee Engagement*) lingkup Ditjen PPKL sebanyak 45 responden yang merupakan perwakilan dari masing-masing Unit Kerja Eselon II sesuai dengan klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan ASN dari 31 responden atas permintaan dari BP2SDM.

Hasil survei indeks BerAKHLAK akan dijadikan dasar rekomendasi perbaikan kebijakan Penguatan Budaya Kerja ASN ke depannya. Perolehan Nilai Indeks BerAKHLAK KLHK Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 57% (Kategori B – Cukup Sehat). Target Nilai indeks BerAKHLAK Tahun 2024 adalah Kategori A (Sehat) dan nilai indeks akan keluar bersamaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada awal Tahun 2025.

Tabel 14. Responden Pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Keterkaitan Pegawai ASN (*Employee Engagement*) Lingkup Ditjen PPKL

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN							JUMLAH
	PNS					PPPK		
	JPT	SLTA	D3	S1	S2/S3	D3	S1	
Permintaan Responden untuk Ditjen PPKL	1	6	2	10	5	1	6	31
Responden Ditjen PPKL	1	6	6	14	6	3	9	45

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

2) Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)

Pelaksanaan SPI merupakan pemetaan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Pemetaan dan Pengumpulan Data Unit dan Responden Survey Penegakan Integritas (SPI) Tahun 2024;
- Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023;
- Penyusunan Karakteristik dan Struktur Organisasi Lingkup Ditjen PPKL dalam rangka Pengumpulan data dukung Pelaksanaan SPI Tahun 2023-2024;
- Updating* data responden eksternal pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024;
- Penyusunan matriks rencana aksi penilaian integritas Tahun 2024 lingkup Ditjen PPKL;
- SPI Tahun 2024 tanggal 29 Juli – 30 November 2024.

Tabel 15. Rekapitulasi Responden SPI Tahun 2024 Lingkup Ditjen PPKL

No	Satker	N Data Populasi	N Data Terpilih	N Data Blast Terkirim	Perolehan Total Sudah Mengisi
1	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	18	5	5	1
2	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	42	40	39	16
3	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	44	36	34	16
4	Direktorat Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Pesisir Dan Laut	33	32	30	7
5	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	40	21	21	8
6	Sekditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	67	66	59	12
TOTAL		244	200	188	60

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

Populasi yang diajukan sebagai responden dalam pelaksanaan SPI Tahun 2024 adalah sebanyak 244 responden. Dari jumlah populasi yang diajukan itu, dipilih sebanyak 200 responden. Data survei yang berhasil terkirim sebanyak 188 responden, sisanya 12 responden tidak terkirim. Perolehan total yang telah mengisi survei adalah sebanyak 60 responden. Nilai Indeks

SPI KLHK Tahun 2023 sebesar 76,19 Poin, kurang dari target sebesar 80 Poin. Target nilai indeks SPI Tahun 2024 adalah 80 poin dan nilai indeks akan keluar bersamaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, yaitu pada awal tahun 2025.

3) Pelaksanaan Zona Integritas (ZI)

Penilaian mandiri Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Lingkup Ditjen PPKL dilaksanakan pada 5 Unit Kerja Eselon II yaitu Direktorat PPA, Direktorat PPU, Direktorat PKEG, Direktorat PKL, dan Direktorat PPKPL. Pada Pelaksanaan Penilaian Internal Lembar Kerja Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas pada 5 (lima) unit kerja tersebut memiliki nilai yang sangat minim yaitu di bawah nilai minimal 75 poin sesuai PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 (Tabel 16).

Tabel 16. Nilai LKE Pelaksanaan Zona Integritas Lingkup Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Nama Unit Kerja	Nilai LKE
1	Direktorat PPA	17,60
2	Direktorat PPU	18,10
3	Direktorat PKEG	16,10
4	Direktorat PKL	22,12
5	Direktorat PPKPL	18,10

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

Dengan minimnya nilai yang didapat, maka UKE II lingkup Ditjen PPKL tidak dapat diusulkan dalam pengajuan penilaian oleh Tim Penilai Nasional sebagai unit kerja berpredikat WBK. Yang menyebabkan minimnya perolehan nilai pada unit kerja tersebut adalah data dukung yang tidak memenuhi kriteria unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

4) Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran MenpanRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka instansi pemerintah termasuk unit kerja yang berada di lingkup KLHK wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, memublikasikan, memantau, mengevaluasi serta meninjau ulang Standar Pelayanan sesuai dengan PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Untuk itu, Ditjen PPKL telah menyusun Standar Pelayanan (SP) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal PPKL Nomor SK.134 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Jenis layanan lingkup Ditjen PPKL sebanyak 13 layanan yaitu sebagai berikut.

Tabel 17. Jenis Layanan pada Setiap Unit Kerja Lingkup Ditjen PPKL

No	Nama Unit Kerja Layanan	Jenis Layanan
1	Setditjen PPKL	Pengajuan Akun Registrasi Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (SIMPEL)
2	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan

No	Nama Unit Kerja Layanan	Jenis Layanan
		Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Formasi tertentu
		Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan ke Formasi tertentu
		Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan Aplikasi ke Tanah
		Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan
		Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan
		Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan
		Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan
3	Direktorat Pengendalian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan
		Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan
4	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan
		Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

- 5) Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Hasil Penilaian Kepatuhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) KLHK mendapatkan nilai sebesar 78,03 Poin pada Zona Hijau dengan Kategori B dan Opini Kualitas Tinggi. Dengan nilai tersebut, KLHK masuk peringkat ke-22 dari 25 Tingkat Kementerian. Dibandingkan dengan nilai tahun 2023 (77,51), nilai tahun 2024 ini mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0,52 poin.

Pemilihan Satuan Kerja dalam pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan secara acak. Pada Tahun 2023 Satuan Kerja yang dilakukan penilaian adalah Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dengan nilai 72,37, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dengan nilai 71,14, dan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dengan nilai 67,71, sedangkan pada Tahun 2024 dilakukan penilaian pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dengan nilai 82,41 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dan 2024



Kementerian / Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

TH 2023

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	19.50	26.59	24.24	17.32	87.65
2	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	17.98	23.76	24.24	18.40	84.38
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	16.36	24.47	24.24	15.88	80.95
4	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK)	14.65	23.26	22.15	18.31	78.37
5	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	15.73	21.63	24.24	10.77	72.37
6	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	15.66	20.46	24.24	10.77	71.14
7	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	12.59	23.22	24.24	7.65	67.71
Nilai Akhir dan Zona		77.51				
Kategori		C				
Opini		Kualitas Sedang				

Kementerian / Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Periode Penilaian : Mei - September 2024

TH 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK)	17.60	23.60	22.30	20.48	83.98
2	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	17.35	26.21	17.84	21.01	82.41
3	Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.45	27.01	19.35	18.08	81.89
4	Direktorat Konservasi Tanah dan Air (KTA)	18.86	18.10	18.81	21.01	76.77
5	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	17.50	21.53	16.25	18.01	73.29
6	Direktorat Konservasi Keaneekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (KKHSG)	15.97	12.55	21.41	19.90	69.83
Nilai Akhir dan Zona		78.03				
Kategori		B				
Opini		Kualitas Tinggi				

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

6) Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani (GIM)

Gerakan Nasional Revolusi Mental dimaksudkan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, KemenpanRB melaksanakan Program GIM yang memfokuskan pada peningkatan perilaku pelayanan publik oleh ASN untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan GIM Tahun 2024 dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Aksi GIM Semester 1;
- Penyusunan laporan GIM Semester 1 dan Semester 2.

b. Reformasi Birokrasi Tematik

KLHK telah mengidentifikasi dukungan program dan indikator kegiatan yang diproyeksikan dapat menjawab permasalahan tema-tema nasional dalam RB Tematik seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penurunan *stunting*, peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkup instansi pemerintah (KLHK) dan pengendalian inflasi. Capaian-capaian yang akan dituju bukan saja berupa output, namun telah berorientasi *outcome* atau dampak. Ditjen PPKL berkontribusi pada tema digitalisasi dan pengendalian inflasi. Pada tema digitalisasi terkait dengan pembangunan onlino dan IPAL domestik, USK dan Biodigester. Sedangkan pada tema inflasi terkait dengan pemulihan ekosistem gambut dan fasilitasi pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).

Adapun hambatan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2024:

- Masih kurangnya peran aktif dari unit kerja dalam memenuhi penyampaian data dukung kegiatan pelaksanaan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Internal;

- 2) Belum memprioritaskan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga belum dilakukan secara mandiri dalam penyusunan laporan secara berkala.

Adapun rencana tindak yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Penyusunan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- 2) Perlunya penguatan tata Kelola internal termasuk penugasan personel/tim dalam monitoring pelaksanaan kegiatan;
- 3) Sosialisasi dan internalisasi secara berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 4) Pengusulan Unit Kerja terkait Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;
- 5) Survei Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai Surat Keputusan Ditjen PPKL Nomor SK 134 Tahun 2024;
- 6) Penguatan monitoring dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

9. Pengadaan Barang dan Jasa (PBj)

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PPKL dikoordinir oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBJ) KLHK . Adapun pelaksanaannya di Ditjen PPKL dilaksanakan oleh Sekretaris Ditjen PPKL/Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas:

- a. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PPKL;
- b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan lingkup Ditjen PPKL;
- c. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Ditjen PPKL dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan serta meminta pendampingan ke UKPBJ jika terdapat kendala dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PPKL Tahun 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) paket. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Daftar Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Nama Paket	Jenis Pengadaan	Volume		Unit Eselon II	Keterangan
1	Pengadaan Pemantauan Kualitas Air Wilayah Sumatera Tahun 2024	Tender	202	Titik	Dit. PPA	
2	Pengadaan Pemantauan Kualitas Air Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Tender	270	Titik	Dit. PPA	
3	Pengadaan Pemantauan Kualitas Air Wilayah Kalimantan Tahun 2024	Tender	96	Titik	Dit. PPA	
4	Pengadaan Pemantauan Kualitas Air Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua Tahun 2024	Tender	271	Titik	Dit. PPA	
5	Pengadaan Jasa Lainnya Pemantauan Kualitas Air Laut Tahun 2024	Tender	386	Titik	Dit. PPKPL	
6	Paket Penginapan Kegiatan Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2024	Penunjukkan Langsung	1	Paket	Setditjen PPKL	Tidak jadi dilaksanakan
7	Pengadaan Peralatan, Analisis, Pengiriman Passive Sampler 514 Kabupaten Kota tahun 2024	Tender	514	Kab/Kota	Dit. PPU	
8	Pengadaan Kegiatan Inventarisasi 30 KHG Skala 1:50.000 di Provinsi Aceh Tahun 2024	Tender	30	KHG	Dit. PKEG	
9	Pengadaan Perawatan SKUPA Tahun 2024	Tender	29	Kota	Dit. PPU	

No	Nama Paket	Jenis Pengadaan	Volume		Unit Eselon II	Keterangan
10	Pengadaan Pembangunan Ekoriparian Pelangi Bumi Emas di Kabupaten Cianjur Jawa Barat Tahun 2024	Tender	1	Paket	Dit. PPA	
11	Pengadaan Pembangunan Ekoriparian Istana Maimoon di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Tender	1	Paket	Dit. PPA	
12	Pengadaan Pembangunan Ekoriparian STIF AN Nawawi di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2024	Tender	1	Paket	Dit. PPA	
13	Pengadaan Paket Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Pada Sub KHG A, KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil Skala 1: 50.000 di Provinsi Riau	Tender	183.969	Ha	Dit. PKEG	
14	Pengadaan Paket Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Pada Sub KHG B, KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil Skala 1: 50.000 di Provinsi Riau	Tender	190.644	Ha	Dit. PKEG	
15	Pengadaan Paket Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Pada Sub KHG C, KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil Skala 1: 50.000 di Provinsi Riau	Tender	194.181	Ha	Dit. PKEG	
16	Pengadaan Paket Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Pada KHG Sungai Siak- Sungai Kampar Skala 1: 50.000 di Provinsi Riau	Tender	182.818	Ha	Dit. PKEG	
17	Pengadaan Paket Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Pada KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu Skala 1: 50.000 di Provinsi Riau	Tender	136.632	Ha	Dit. PKEG	
18	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Manajemen Proyek Pengelolaan Terpadu Kesatuan Hidrologis Gambut Prioritas di Provinsi -Provinsi Proyek	Seleksi	1	Org	Dit. PKEG	1 kali gagal
19	Pekerjaan Pembangunan Ekoriparian Hr. Soebrantas di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau TA 2024	Tender	1	Paket	Dit. PPA	
20	Pekerjaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi (Paket Meeting Hotel) Kantor Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dalam Rangka Kegiatan Lokakarya Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Ekosistem Gambut Tahun 2024	Penunjukan Langsung	1	Paket	Dit. PKEG	
21	Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024	Tender	1	Paket	Dit. PPA	
22	Pekerjaan Perawatan Air Quality Monitoring System (AQMS) Pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) di 8 Lokasi Yaitu Serang, Ternate, Palu, Gorontalo, Kendari, Mamuju, Samarinda dan Pangkal Pinang Tahun 2024	Penunjukan Langsung	8	Lokasi	Dit. PPU	

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

10. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)

Nilai Barang Milik Negara (BMN) gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Triwulan III tahun anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp. 393.790.834.633,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar 331.864.219.414,- dan nilai mutasi yang terjadi selama Triwulan III tahun 2024 sebesar 61.926.615.219,- yang berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan laporan pengelolaan BMN berdasarkan Laporan Triwulan III Tahun 2024 meliputi :

- Aset Lancar, dicatat di neraca berupa barang persediaan yang menggunakan metode harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian. Saldo persediaan Ditjen PPKL sebesar Rp. 38.032.255.360,- (per Triwulan III 2024), jumlah tersebut terdiri saldo awal tahun 2023 sebesar Rp. 19.399.530.500,-

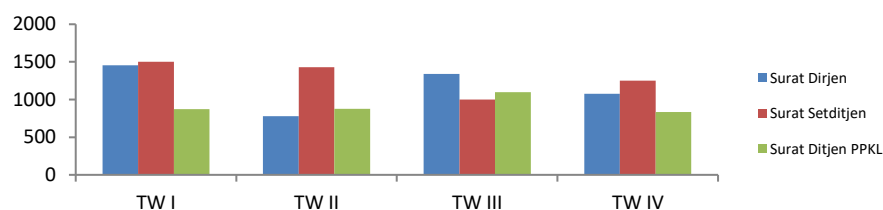
dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 18.632.724.860,-. Barang persediaan tersebut meliputi: barang konsumsi, tanah bangunan untuk diserahkan ke masyarakat, persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat, dan persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat dalam proses.

- b. Aset Tetap, seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Saldo aset tetap Ditjen PPKL sebesar Rp. 384.821.970.849,- dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 123.671.015.414,- (per Triwulan III 2024) yang meliputi: peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi dan jaringan.
- c. Aset Lainnya, yang masuk dalam aset lainnya adalah amortisasi aset tak berwujud dan aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Saldo aset lainnya Ditjen PPKL sebesar Rp. 8.968.863.784,- dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp. 5.511.627.178,- (per Triwulan III 2024) Aset lainnya meliputi: aset tak berwujud, dan aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

11. Pelaksanaan Ketatausahaan

Kinerja layanan ketatausahaan (persuratan dan kearsipan) dalam suatu organisasi adalah refleksi dari efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan komunikasi tertulis dan penyimpanan dokumen. Pada tahun 2024 ini, berbagai aspek telah diperiksa oleh ANRI dan Biro Umum KLHK untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sistem ini berjalan dan aspek mana yang diperlukan untuk ditingkatkan. Dalam hal persuratan, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah surat masuk dari bulan Januari-Desember 2024 yang diterima oleh Ditjen PPKL sebanyak 3.209, surat masuk Dirjen sebanyak 2.687 dan Setditjen PPKL sebanyak 2.808 surat, telah didistribusikan sesuai petunjuk pimpinan. Sedangkan jumlah surat keluar dari bulan Januari-Desember 2024 yang telah ditanda tangani oleh Dirjen PPKL sebanyak 1.969 naskah dinas dan oleh Setditjen PPKL sebanyak 2.262 naskah dinas.

Adanya ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional (PDN) menyebabkan terhambatnya pelaksanaan surat menyurat terutama pada aplikasi Srikandi yang tidak dapat diakses pada 20 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024. Meskipun demikian, kecepatan dalam menanggapi surat masih menjadi fokus perhatian. Walaupun sebagian besar surat direspon dalam waktu cepat, terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan dalam hal waktu respon khususnya untuk naskah yang bersifat urgent. Selain itu, format dan kelengkapan informasi dalam surat masih memerlukan transisi dengan dikeluarkannya Permen LHK nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.



Gambar 18. Grafik Surat Ditjen dan Setditjen PPKL 2024

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024

Di sisi kearsipan, meskipun dokumen tersedia saat dibutuhkan, diperlukan ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan aksesibilitas arsip. Berdasarkan evaluasi diperlukan penyusunan sistem penyimpanan agar lebih terstruktur dan mudah diakses. Keamanan arsip juga menjadi perhatian penting yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 1246 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selaku Unit Kearsipan memperoleh nilai pengawasan kearsipan sebesar 93,20 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selaku Unit Pengolah memperoleh nilai 93,16 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemindahan arsip dari Unit Kearsipan I Ditjen PPKL ke Unit Pusat Kearsipan (UPK) Cimanggis dimana menurut Jadwal retensi arsip sudah bisa dipindahkan di Unit Pusat Kearsipan Cimanggis yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: BA.1/TU.SETDIT.2/SET.2.1/B/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 berupa:

- a. Arsip inaktif Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Pengendali Dampak Lingkungan (DUPAK PEDAL) pada Direktorat Jenderal PPKL sebanyak 91 boks dengan nomor boks 48-137 (Nomor Arsip 0056-0182)
- b. Arsip inaktif Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut pada Direktorat Jenderal PPKL sebanyak 77 boks dengan nomor boks 144-229 (Nomor Arsip 00588-00685)

Pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL selaku Unit Pengolah, juga telah melakukan pemindahan arsip dari UP ke UK I dengan Berita Acara nomor BA.1/SETPPKL/KKOTL/SET.3.4/B/4/2024 tanggal 1 April 2024 sebanyak 4 box.

Berdasarkan pasal 19 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 48 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2016, bahwa selain memenuhi syarat kinerja, Pejabat Fungsional Arsiparis yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi, alih jabatan, pindah jabatan ke dalam JFA harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Pada tahun 2024 terdapat 1 orang pegawai yang mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis yang akan naik jenjang 1 tingkat di atasnya.



Gambar 19. Pelaksanaan Uji Kompetensi JF Arsiparis TUK Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024

Selain itu untuk pegawai JF Arsiparis yang berasal dari PPPK telah dilakukan bimbingan teknis yang bertempat di Unit Pusat Kearsipan (UPK) Cimanggis. Jumlah PPPK JF Arsiparis di Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL sebanyak 3 orang dan semua sudah mendapatkan bimbingan teknis dari Unit Pusat Kearsipan (UPK).



Gambar 20. Pelaksanaan Bimbingan Teknis JFA untuk PPPK
Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 2024

3.2.1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik memiliki 1 (satu) sasaran dan 12 (dua belas) indikator unit kegiatan. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2024, semua target kinerja dapat dilaksanakan bahkan melebihi target, sehingga capaian kinerja sebesar 115,55%. Hasil pengukuran kinerja Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 20. Capaian penyerapan anggaran mencapai 99,77%. Efisiensi dan efektivitas kegiatan masing-masing sebesar 1,16 dan 1,01, yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, dan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 20. Capaian Kinerja Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Tahun 2024

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian 2024 terhadap Target Renstra 2024 (%)
1	Efektivitas layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja sama Teknik dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RENCANA AKSI, RKAKL)	Dokumen	10	10	100	100	100
		Jumlah dokumen pelaporan untuk penyelenggaraan SAKIP (monev dan Laporan Kinerja)	Dokumen	18	18	100	100	100
		Jumlah layanan kehumasan	Publikasi	24	62	150	150	150
		Jumlah layanan data dan informasi	Dokumen	1	1	100	100	100
		Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa	Laporan	4	4	100	100	100
		Jumlah penataan peraturan perundang-undangan	Dokumen	60	70	116,67	116,67	116,67
		Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	Dokumen	60	953	150	150	150
		Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	4	4	100	100	100

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian 2024 terhadap Target Renstra 2024 (%)
		Jumlah kegiatan perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	Dokumen	20	43	150	150	150
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	Laporan	1	1	100	100	100
		Jumlah Industri yang difasilitasi oleh kesekretariatan PROPER	Industri	3.750	4.495	119,87	109,45	119,87
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi oleh Sekretariat IKLH	Provinsi; Kab/Kota	38; 514	38; 514	100	100	100
		Rata-rata				115,55	114,68	115,55

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Berdasarkan Tabel 20 dapat dilihat bahwa rerata capaian kinerja Bagian PEHKST pada tahun 2024 mencapai 115,55%. Nilai ini juga merupakan capaian terhadap target Renstra 2024. Capaian tersebut lebih tinggi 0,87% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 karena beberapa indikator kinerja melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya.

Berikut ini diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator unit kegiatan.

1. Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan, dan masing-masing periode, lebih lanjut, terdapat pemilahan berdasarkan lingkup perencanaan. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai bentuk penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Dokumen perencanaan yang disusun meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi dan DIPAs.

a. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra Setditjen PPKL disusun mengacu pada substansi rumusan Sasaran Strategis Renstra Ditjen PPKL 2020-2024 (revisi) merupakan suatu hubungan yang saling terkait satu sama lain. Program PPKL merupakan program yang secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat dalam Sasaran Strategis KLHK. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam sasaran kegiatan.

Dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat PPKL tahun 2020-2024, indikator kinerja kegiatan sebagai pokok acuan penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PPKL tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan yaitu 79 poin.

Tabel 21. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PPKL	Poin	79	80	81	78	79
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PPKL	Level	3	3	3	3	4
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PPKL	Laporan	1	1	1	1	1

Sumber: Renstra Ditjen PPKL 2020-2024 (revisi)

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pada periode RPJMN 2020 – 2024 dan untuk memastikan pembangunan nasional tetap terus berjalan terarah dan berkesinambungan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka untuk selanjutnya akan disusun RPJP 2025 – 2045, RPJMN 2025 – 2029 dan RKP 2025 yang di prakarsai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Bappenas sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas penyusunan RPJMN, berdasarkan visi, misi, dan program presiden. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 mengatur terkait siklus perencanaan yaitu rangkaian tahapan yang sistematis dan berkelanjutan meliputi 4 tahapan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pembangunan nasional; (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Siklus ini bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 yang memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, untuk itu Kementerian/Lembaga diwajibkan menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional. Terkait hal tersebut, Ditjen PPKL telah menyusun rancangan awal Renstra dan telah dilakukan pembahasan dengan Bappenas dan Biro Perencanaan KLHK (pembahasan tiga pihak/*trilateral meeting*), dengan hasil rancangan awal sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 22. Tahapan Proses Penyusunan Rancangan RPJMN Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

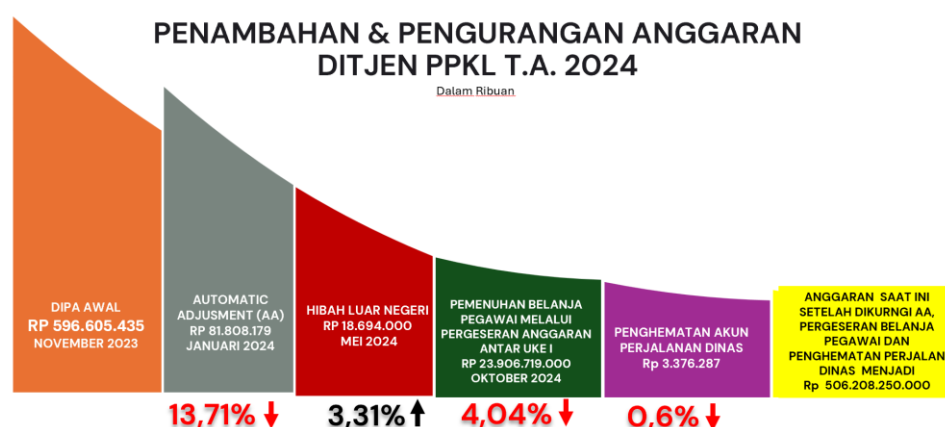
No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Pembahasan Struktur Agenda Pembangunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Lingkup Lingkungan Hidup	25 – 26 Januari 2024	Surat Undangan Bappenas, Nomor: B-01243/Dt.3.5/PR.01.02/01/2024, Tanggal 23 Januari 2024
2	Koordinasi Pembahasan Struktur Agenda Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 Lingkup Lingkungan Hidup	27–28 Maret 2024	Surat Undangan Bappenas, Nomor: B-05125/Dt.3.5/PR.01.02/03/2024, Tanggal 25 Maret 2024
3	Koordinasi Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian LHK 2025-2029 Bidang LH	31 Juli 2024	Surat Undangan Bappenas, Nomor: B-06125/Dt.3.5/PR.01.02/07/2024, Tanggal 28 Juli 2024
4	Koordinasi Penyelarasan Struktur Agenda Pembangunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 Lingkup Lingkungan Hidup	17 September 2024	Surat Undangan Bappenas, Nomor: B-17720/Dt.3.5/PR.01.02/09/2024, Tanggal 13 September 2024
5	Koordinasi Penajaman Struktur RPJMN 2025-2029 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	13 Desember 2024	Surat Undangan Bappenas, Nomor: B-24608/Dt.3.5/PR.01.03/12/2024, Tanggal 09 Desember 2024

Sumber: *Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024*

b. Rencana Kerja (Renja)

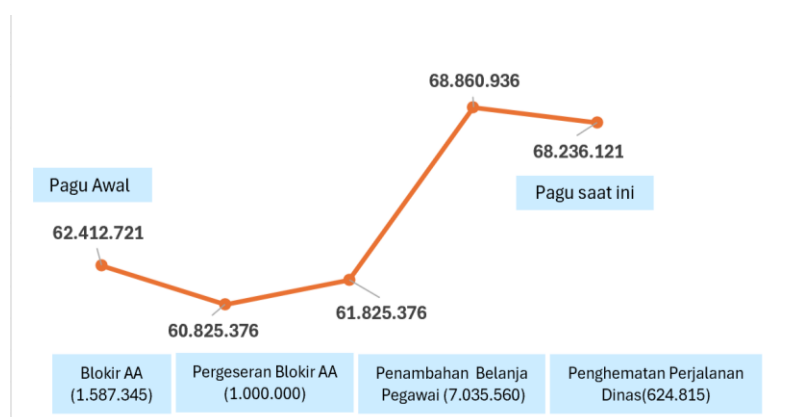
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Setditjen PPKL) sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi seluruh kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) Unit Eselon I dan Setditjen PPKL Tahun 2024. Renja merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai penyusunan anggaran Rancangan APBN.

Penetapan pagu awal Ditjen PPKL melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-029.13-0/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 596.605.435.000,- (lima ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) termasuk anggaran pemanfaatan PNBP sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 534.192.714.000,- dan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp. 62.412.721.000,-. Pada awal tahun 2024 hingga bulan Desember 2024, Pagu Anggaran Ditjen PPKL mengalami 4 (empat) kali perubahan sebagai berikut ini.



Gambar 21. Penambahan dan Pengurangan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2024
 Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Untuk pagu Setditjen PPKL, terjadi 4 (empat) kali perubahan seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 22. Perubahan Struktur anggaran Setditjen PPKL TA 2024 (dalam ribuan rupiah)
 Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Perubahan struktur anggaran Ditjen PPKL berimbas pada capaian target beberapa output kegiatan, namun tidak memengaruhi target dari IKU Dirjen PPKL. Adapun perubahan target output kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Revisi Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Revisi
Pemantauan Kualitas Lingkungan				
1.	Tersedianya data pemantauan kualitas udara	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan kualitas udara untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara	500 Kab/Kota	500 Kab/Kota
2.	Tersedianya data pemantauan kualitas air	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual	652 layanan	652 layanan
3.	Tersedianya data pemantauan kualitas air laut	Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	37 Provinsi	37 Provinsi
4.	Tersedianya data pemantauan kualitas air laut	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan <i>coastal clean up</i>	23 Lokasi	24 Lokasi
5.	Tersedianya data pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan kualitas tutupan lahan untuk perhitungan indeks kualitas tutupan lahan	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota
6.	Tersedianya data pemantauan ekosistem gambut	Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1 : 50.000	4 KHG	4 KHG
7.	Tersedianya data hasil pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	40 Kab/Kota	40 Kab/Kota
8.	Tersedianya data pemantauan kualitas air	Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	153 unit	153 unit
9.	Tersedianya data pemantauan kualitas udara	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	72 unit	72 unit
10.	Terlaksananya Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Jumlah Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang dilakukan perawatan	94 unit	94 unit
11.	Terlaksananya Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis yang dilakukan perawatan	41 unit	41 unit
Pengendalian Pencemaran Lingkungan				
12.	Menurunnya pencemaran air laut	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	30 industri	36 industri
13.	Menurunnya beban emisi pencemaran udara	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	3.750 industri	3.750 industri
14.	Menurunnya beban pencemaran air	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	3.750 industri	3.750 industri
15.	Menurunnya tingkat kerusakan lahan dan gambut	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	113 industri	113 industri
16.	Menurunnya tingkat kerusakan lahan dan gambut	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	330 industri	330 industri
17.	Menurunnya beban pencemaran air	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah	16 industri	16 industri
19.	Menurunnya beban pencemaran air	Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air	83 unit	83 unit
20.	Menurunnya beban pencemaran air laut	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan pengendalian pencemaran kerusakan pesisir dan laut	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota
21.	Meningkatnya kualitas air	Jumlah Kab/Kota yang melakukan upaya pengendalian pencemaran air	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota
22.	Meningkatnya kualitas udara	Jumlah Kab/Kota yang melakukan upaya pengendalian pencemaran udara	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota
23.	Meningkatnya kualitas daerah pesisir dan laut	Jumlah Kab/Kota yang melakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	34 Provinsi	34 Provinsi
Pemulihan Kerusakan Lingkungan				
24.	Meningkatnya areal ekosistem pesisir dan laut yang dipulihkan	Jumlah kawasan pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	7 lokasi	11 lokasi
25.	Meningkatnya lahan yang dipulihkan	Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya	120 Ha	150,08 Ha
26.	Meningkatnya lahan gambut yang dipulihkan	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	50.000 Ha	6.000 Ha
27.	Meningkatnya areal kawasan hidrologi gambut yang dipulihkan	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Prov	60 Desa	60 Desa
28.	Meningkatnya lahan yang dipulihkan	Jumlah Kab/Kota yang melakukan upaya pengendalian kerusakan lahan	514 Kab/Kota	514 Kab/Kota
29.	Meningkatnya lahngambut yang dipulihkan	Jumlah Kab/Kota yang melakukan upaya pengendalian pengendalian kerusakan ekosistem gambut	132 Kab/Kota	132 Kab/Kota
Dukungan Manajemen				
30.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3	3
31.		Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	79	79
32.		Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana siklus perencanaan perlu dilakukan pengusulan awal rancangan rencana kerja tahun 2025 sebagai draft awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas maka setiap Kementerian/Lembaga serta semua Eselon I termasuk di dalamnya Ditjen PPKL telah menyusun rancangan awal rencana kerja pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun 2025.

Perpres Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup serta Perpres Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), sebagai dasar pembentukan Deputy Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, maka Rencana Kerja (Renja) Deputy PPKL TA 2025 telah dilakukan pembahasan tiga pihak yaitu dengan Bappenas, Kementerian keuangan dan KLH (Deputy PPKL), dengan susunan Renja sebagaimana pada tabel di bawah ini. Pagu yang ditetapkan untuk Deputy PPKL sebesar Rp.151.853.506.000,- (seratus lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan komposisi anggaran Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 126.021.756.000,- (seratus dua puluh enam milyar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 25.831.750.000,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pagu tersebut belum termasuk anggaran gaji pegawai PPKL.

Rencana Kerja dan Rencana kerja Anggaran tersebut selanjutnya telah digunakan sebagai komponen dasar dengan ditetapkannya UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 tanggal 17 Oktober 2024.

Adapun Tahapan pembahasan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran seperti yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 24. Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyampaian usulan baseline Pagu Rencana Kerja Ditjen PPKL KLHK Tahun 2025	17 Februari 2024	Surat Sejen KLHK, Nomor: S.26/ROCAN/RPA/REN.4.4/02/2024, Tanggal 15 Februari 2024
2	Penyampaian besaran Pagu Indikatif Ditjen PPKL KLHK TA 2025	30 April 2024	Memorandum MenLHK, Nomor: M-24/MENLHK/SETJEN/REN.0/9/2023, Tanggal 30 April 2024, perihal Pagu Indikatif Belanja KLHK TA 2025
3	Penajaman Usulan Renja Ditjen PPKL KLHK TA 2025 Pagu Indikatif Bidang Lingkungan Hidup oleh KLHK, Bappenas dan Kemenkeu	28 – 30 Mei 2024	Surat Undangan Bappenas, Nomor: T-08591/Dt.3.5/PP.04.04/05/2024, Tanggal 21 Mei 2024, perihal Undangan Rapat Penajaman Usulan Renja KLHK TA2025 Pagu Indikatif Bidang Lingkungan Hidup
4	Penyusunan TOR dan RAB kegiatan Ditjen PPKL sebagai Data Dukung dalam Input Rencana Aksi pada Aplikasi Krisna Bappenas	31 mei 2024	Memorandum Ditjen PPKL, Nomor: M.7/PPKL/PEHKT/REN.4.4/B/06/2024, Tanggal 29 Mei 2024, perihal Permintaan Data Dukung dan Input Rencana Aksi pada Aplikasi Krisna Bappenas
5	Pleno Pertemuan Trilateral meeting Ditjen PPKL KLHK, Bappenas dan Kemenkeu Pembahasan Pagu Indikatif KLHK TA 2025	5 Juni 2024	Surat Undangan Nomor: B-09383/Dit.3.2/PP.04.03/6/2024 dan B-09384/Dit.3.5/PP.04.03/6/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Undangan Pleno Pertemuan Tiga Pihak Pagu Indikatif KLHK

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
6	Penginputan Renja pada Aplikasi KRISNA	Juli 2024	
7	Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PPKL TA 2025 oleh MENLHK	26 September 2024	Memorandum MenLHK, Nomor: M-35/MENLHK/SETJEN/REN.0/9/2024, Tanggal 26 September 2024
8	Pembahasan restrukturisasi dan penyalarsan Renja TA 2025 Deputi PPKL dengan RPJMN 2025-2029 dan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga baru (KLH)	6 – 8 November 2024	Surat Bappenas, Nomor: B-21745/Dt.3.5/PR.01.02/11/2024, perihal Undangan Pertemuan Tiga Pihak Pelaksanaan Renja KLHK TA 2025 Bidang Lingkungan Hidup
9	Peneelahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Deputi PPKL melalui Online di Aplikasi SAKTI bagi K/L yang Mengalami Perubahan	19 - 26 November 2024	Surat Kemenkeu, Nomor: UND-100/AG.3/2024, Tangal 20 November 2024 perihal Undangan Penelaahan RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran TA 2025
10	Penyampaian DIPA INDUK KLH TA 2025	10 Desember 2024	Penyampaian DIPA Induk KLH TA 2025

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

c. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)

Penyusunan RKA-KL Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penganggaran atau penyusunan APBN. Penyusunan RKA-K/L dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Penerbitan Surat Keputusan Bersama Bappenas dan Kemenkeu tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2025 (SBPI) dan Pagu Alokasi Anggaran Belanja K/L Deputi PPKL 2025 (SBPAA). Dengan adanya perubahan Kementerian berdasarkan Perpres Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup serta Perpres Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Pagu Alokasi Deputi PPKL sementara sebesar Rp. 151.853.506.000,- (seratus lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan komposisi Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 126.021.756.000,- (seratus dua puluh enam milyar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 25.831.750.000,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pagu tersebut belum termasuk anggaran gaji pegawai PPKL.

Untuk pagu anggaran sementara Setditjen PPKL tahun 2025 sebesar Rp. 25.831.750.000,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pagu alokasi anggaran tersebut selanjutnya disusun melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebagai salah satu dasar penerbitan DIPA KLH TA 2025.

Tabel 25. Tahapan Penyusunan RKA K/L Deputi PPKL TA 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyampaian usulan baseline Pagu Rencana Kerja Ditjen PPKL KLHK Tahun 2025	17 Februari 2024	Surat Sejen KLHK nomor S.26/ROCAN/RPA/REN.4.4/02/2024 15 Februari 2024
2	Penyampaian besaran Pagu Indikatif Ditjen PPKL KLHK TA 2025	30 April 2024	Memorandum MenLHK Nomor M-24/MENLHK/SETJEN/REN.0/9/2023 Tanggal 30 April 2024 perihal Pagu Indikatif Belanja KLHK TA 2025
3	Penajaman Usulan Renja Ditjen PPKL KLHK TA 2025 Pagu Indikatif Bidang Lingkungan Hidup oleh KLHK, Bappenas dan Kemenkeu	28 – 30 Mei 2024	Surat Undangan Bappenas Nomor T-08591/Dt.3.5/PP.04.04/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Undangan Rapat Penajaman Usulan Renja KLHK TA2025 Pagu Indikatif Bidang Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
4	Penyusunan TOR dan RAB kegiatan Ditjen PPKL sebagai Data Dukung dalam Input Rencana Aksi pada Aplikasi Krisna Bappenas	31 mei 2024	Memorandum Ditjen PPKL Nomor : M.7/PPKL/PEHKT/REN.4.4/B/06/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Permintaan Data Dukung dan Input Rencana Aksi pada Aplikasi Krisna Bappenas
5	Pleno Pertemuan Trilateral meeting Ditjen PPKL KLHK, Bappenas dan Kemenkeu Pembahasan Pagu Indikatif KLHK TA 2025	5 Juni 2024	B-09383/Dit.3.2/PP.04.03/6/2024, B-09384/Dit.3.5/PP.04.03/6/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal undangan pleno pertemuan tiga pihak pagu indikatif KLHK
6	Pembahasan dan penelaahan SBK Ditjen PPKL KLHK 2025 sebagai syarat Penilaian Kinerja Anggaran Tahun 2025.	12-13 Juni 2024	UN.117/ROCAN/RPA/REN.4.1/B/06/2024 tanggal 10 Juni 2024
7	Penginputan Renja pada Aplikasi KRISNA	Juli 2024	
8	Penyusunan RKAKL pada Aplikasi SAKTI	12 – 17 Juli 2024	Nota Dinas Sekjen KLHK Nomor ND 1585/SETJEN/ROCAN/REN.0/7/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal penyusunan RKA K/L KLHK TA 2025
	Reviu APIP untuk pagu indikatif Ditjen PPKL TA 2025	19 Juli 2025	Surat Undangan Reviu RKA K/L Ditjen PPKL Pagu Indikatif dengan nomor surat S.107/SET.PPKL/PEHKT/KEU.02/B/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Reviu RKA K/L Ditjen PPKL TA 2025
	Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PPKL TA 2025 oleh MENLHK	26 September 2024	Memorandum Menlhk nomor M-35/MENLHK/SETJEN/REN.0/9/2024 Tanggal 26 September 2024
9	Penelaahan RKA-K/L TA 2025 Pagu Anggaran Ditjen PPKL secara online melalui aplikasi SAKTI	23 September s.d. 11 Oktober 2024	Surat Kemenkeu Nomomr UND-83/AG.3/2024 Tanggal 25 September 2024 perihal Undangan Penelaahan RKA-KL A 2025
10	Reviu APIP untuk APgu Alokasi Anggaran untuk semua Eselon I Lingkup KLHK (Ditjen PPKL) TA 2025	23 – 27 September 2024	Nota Dinas Sekjen KLHK Nomor ND.2606/SETJEN/ROCAN/REN.4.1/B/09/2024 tanggal 27 September 2024, perihal Permohonan Reviu APIP atas Usulan RKA-K/L Kementerian LHK berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025
12	Pembahasan restrukturisasi dan penyelarasan Renja TA 2025 Deputi PPKL dengan RPJMN 2025-2029 dan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga baru (KLH)	6 – 8 November 2024	Surat Bappenas Nomor B-21745/Dt.3.5/PR.01.02/11/2024 perihal Undangan Pertemuan Tiga Pihak Pelaksanaan Renja KLHK TA 2025 Bidang Lingkungan Hidup
13	Peneelahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Deputi PPKL melalui Online di Aplikasi SAKTI bagi K/L yang Mengalami Perubahan	19 - 26 November 2024	Surat Kemenkeu Nomomr UND-100/AG.3/2024 Tanggal 20 November 2024 perihal Undangan Penelaahan RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran TA 2025
14	Penyampaian DIPA INDUK KLH TA 2025	10 Desember 2024	Penyampaian DIPA INDUK KLH TA 2025

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

RKA K/L TA 2025 Deputi Bidang PPKL sebagai salah satu dasar penyusunan diterbitkannya UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025.

d. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renja dan RKA K/L, maka perlu disusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dengan terbitnya DIPA Ditjen PPKL TA 2024 dan dalam tahun berjalan terdapat kebijakan pemerintah terkait perubahan anggaran yaitu *Automatic Adjustment*, *Top Up* Hibah Luar Negeri, kenaikan tunjangan kinerja,

pergeseran pagu belanja pegawai antara Eselon I lingkup KLHK dan penghematan pagu belanja perjalanan dinas. Dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan terjadi perubahan anggaran Ditjen PPKL maka PK Eselon I Ditjen PPKL 2024 dapat disusun kembali yaitu PK Dirjen PPKL TA 2024 revisi. PK revisi Dirjen PPKL TA 2024 untuk capaian target Indikator Kinerja Program dan pagu akhir mengalami perubahan, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 26. Perubahan Perjanjian Kinerja Ditjen PPKL TA 2024

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program : Kualitas Lingkungan Hidup					
a.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas udara	Nilai indeks kualitas udara	84,5 Poin	84,5 Poin
		Meningkatnya kualitas air	Nilai indeks kualitas air	55,5 Poin	55,5 Poin
		Meningkatnya kualitas air laut	Nilai indeks kualitas air laut	60,5 Poin	60,5 Poin
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Nilai indeks kualitas lahan	65,5 Poin	65,5 Poin
Program : Dukungan Manajemen					
b.	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DItjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	78 Poin	78 Poin
			Nilai Kinerja Anggaran DItjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	96,17 Poin	82,5 Poin

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp 534.192.714.000,-	Rp 438.147.961.000,-
1.	Pemantauan Kualitas Lingkungan.	Rp 325.990.367.000,-	Rp 330.747.523.000,-
2.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan.	Rp 102.902.347.000	Rp. 96.177.686.000
3.	Pemulihan Kerusakan Lingkungan.	Rp 105.300.000.000	Rp 96.195.058.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 62.412.721.000,-	Rp 68.236.121.000,-
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	Rp 62.412.721.000	Rp 69.448.281.000
	Jumlah	Rp 596.605.435.000,-	Rp506.384.082.000,-

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

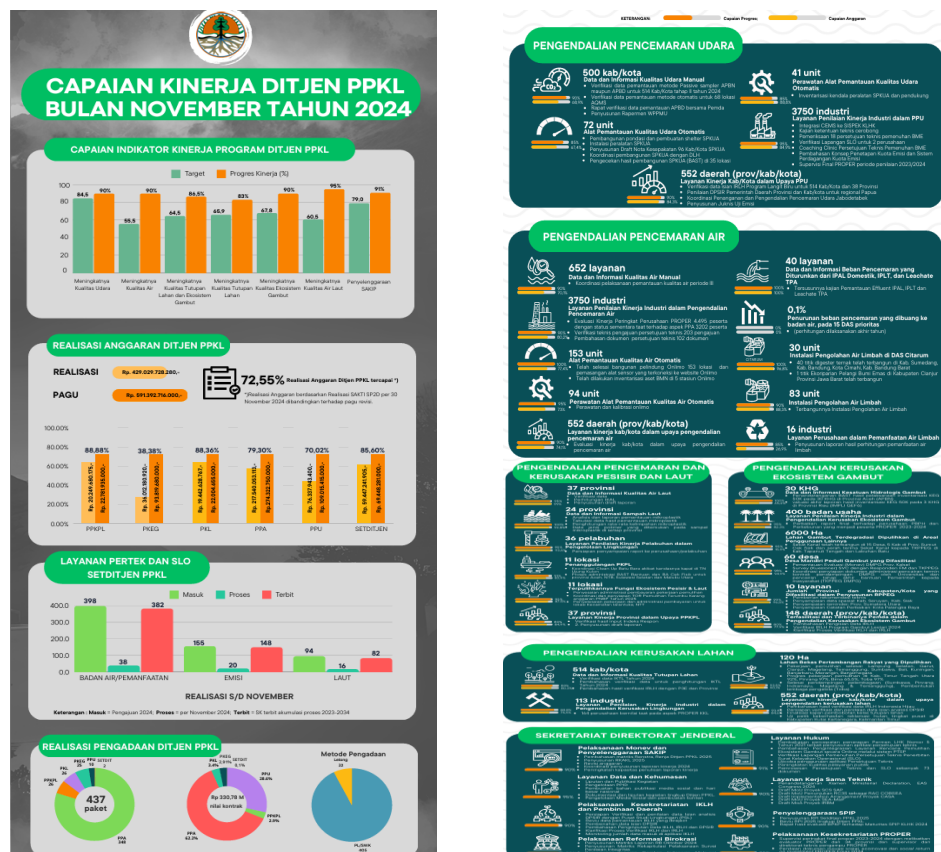
Perubahan anggaran tersebut tidak berpengaruh terhadap capaian target pada Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL namun akan terjadi perubahan target indikator kinerja pada unit kerja eselon II lingkup Ditjen PPKL. Sehingga PK revisi Eselon II dan III di setiap unit kerja untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dan mendukung capaian target Ditjen PPKL.

Setditjen PPKL sebagai pengampu Program Dukungan Manajemen Ditjen PPKL untuk PK revisi Setditjen PPKL TA 2024 terjadi perubahan pada struktur anggaran saja, semula **Rp 62.412.721.000,-** menjadi **Rp 68.236.121.000,-**, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait Automatic Adjustement, kenaikan tunjangan kinerja, pergeseran pagu belanja pegawai antara Eselon I lingkup KLHK dan penghematan pagu belanja perjalanan dinas.

2. Dokumen Pelaporan

a. Penyusunan Laporan Bulanan

Penyusunan laporan bulanan dilaksanakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja unit kerja eselon II. Laporan disusun berdasarkan perjanjian kinerja masing-masing direktur/sekretaris. Isi laporan bulanan mencakup pagu anggaran, realisasi, capaian realisasi dan progress output kegiatan serta menampilkan matriks capaian masing-masing indikator Perjanjian Kinerja. Berdasarkan laporan bulanan dapat diketahui direktorat yang pelaksanaan kegiatannya berjalan lambat dan kendala serta tindak lanjut yang dilakukan. Salah satu contoh laporan bulanan, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 23 berikut ini.



Gambar 23. Laporan Bulanan Ditjen PPKL
(Sumber: Sekretariat Ditjen PPKL, 2024)

b. Laporan Triwulanan Setditjen PPKL

Laporan Triwulan disusun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap target kegiatan Triwulanan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II. Berdasarkan laporan triwulanan dapat diketahui target kegiatan yang tidak tercapai sehingga perlu kecermatan pada saat penyusunan target agar dapat dicapai. Laporan triwulanan yang dapat disusun selama tahun 2024 terdapat 4 (empat) laporan, yaitu Laporan Triwulan IV 2023, Laporan Triwulan I-III 2024 (Gambar 24).



Gambar 24. Laporan Triwulanan Selama Tahun 2024
(Sumber : Setditjen PPKL, 2024)

c. Laporan Pelaporan

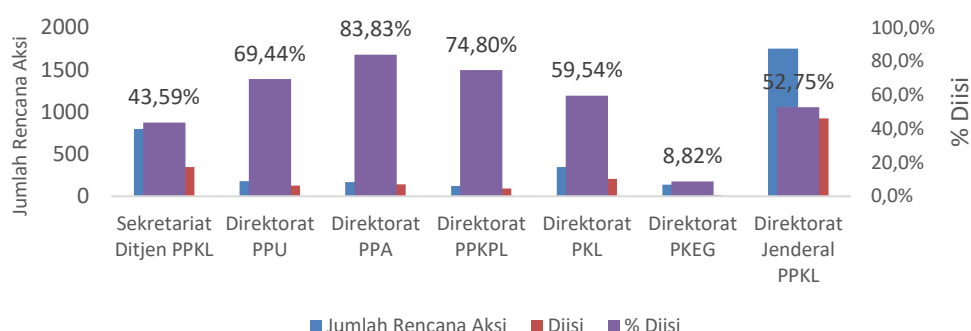
Selain laporan yang disusun Ditjen PPKL sesuai dengan indikator di dalam Perjanjian Kinerja, juga ada laporan yang diminta secara rutin oleh Biro Perencanaan, antara lain: laporan E-SAKIP KLHK, E-Monev Bappenas, E-Monev SMART DJA, Matriks Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Matriks Program Padat Karya dan Matriks Capaian Output Bappenas.

Pada tahun anggaran 2024, nilai kinerja perencanaan anggaran (NK Perencanaan) di lingkup Unit Kerja Eselon I Ditjen PPKL adalah sebesar 74,52. Untuk nilai kinerja pelaksanaan anggaran (NK Pelaksanaan) di lingkup Unit Kerja Eselon I Ditjen PPKL adalah sebesar 86,75. Berdasarkan kedua nilai kinerja perencanaan dan nilai kinerja pelaksanaan tersebut, maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun Anggaran 2024 di lingkup Unit Kerja Eselon I Ditjen PPKL adalah sebesar 80,64.

d. Evaluasi E-Monev Ditjen PPKL

Pemanfaatan E-Monev PPKL sebagai sarana pelaporan kinerja individu telah dilakukan sejak tahun 2020. Untuk mengetahui manfaat E-Monev PPKL maka dilakukan survey penggunaannya kepada semua pegawai. Berdasarkan hasil survey tersebut, terdapat sebanyak 244 pegawai (83,56%) yang turut berpartisipasi mengisi survey. Sebanyak 71,8% responden telah melakukan penyusunan rencana aksi melalui proses dialog kinerja (83,7%), namun pelaporannya baru dilaksanakan oleh 45-50% responden. Melalui survey ini juga akan dilakukan beberapa perbaikan sesuai dengan masukan pegawai, antara lain: perbaikan *dashboard* dan beberapa fitur, termasuk penambahan fitur pelaporan triwulanan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan dalam pemanfaatan E-Monev dalam pelaporan kinerja individu, persentase pemanfaatan mencapai 78,87% dari seluruh pegawai yang terdaftar, dengan rincian: Setditjen PPKL 66,67%, Direktorat PPU 92,56%, Direktorat PPA 91,80%, Direktorat PPKPL 94,29%, Direktorat PKL 97,67% dan Direktorat PKEG 30,23%. Pemanfaatan E-Monev sebagai aplikasi yang dapat memantau kinerja individu perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan SAKIP Ditjen PPKL. Evaluasi pengisian E-Monev Ditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 25 berikut ini.



Gambar 25. Evaluasi Pengisian Rencana Aksi dan Pelaporan di E-Monev Ditjen PPKL
(Sumber: Setditjen PPKL, 2024)

3. Layanan Kehumasan

Rangkaian kegiatan layanan kehumasan pada tahun 2024 terdiri dari: (1) peliputan kegiatan dan pendampingan kerja pimpinan; (2) pengelolaan media sosial; (3) pelaksanaan webinar; (4) media briefing dan konferensi pers; (5) podcast; (6) pembuatan advetorial; (7) pembuatan dan publikasi video kegiatan/kinerja; (8) penyusunan Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Lahan Tahun 2023; (9) layanan data dan informasi melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); (10) partisipasi pameran; (11) pelayanan wawancara media; dan (12) pengelolaan webiste; dan (13) kegiatan kompetisi diplomasi lingkungan dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024. Jumlah total peliputan dan pendampingan kerja pimpinan menghasilkan publikasi sebanyak 62 kegiatan yang dipublikasikan melalui website atau media sosial Ditjen PPKL.

Tabel 27. Layanan Kehumasan Liputan dan Publikasi Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Judul Kegiatan Liputan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1	Ekspose IKLH Tahun 2023 melalui Webinar	Januari	Sekretariat Ditjen
2	Pembinaan PROPER MERAH Tahun 2023	Januari	Sekretariat Ditjen
3	Penanaman Pohon Serentak Bersama Wakil Presiden RI di Banten (Ponpes Tanara)	Januari	Direktorat PPA
4	Penanaman pohon di Magetan	Februari	Direktorat PKL
5	Penanaman pohon di Trenggalek	Februari	Direktorat PKL
6	Peresmian "Kenali Peatland Education Center" dan kunjungan ke Londerang	Februari	Direktorat PKEG
7	Konferensi Pers World Water Forum 10 bersama Kominfo	Februari	Sekretariat Ditjen
8	Kunjungan Kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penanaman Pohon Serentak di Provinsi Riau	Maret	Direktorat PKEG
9	Uji Emisi dalam rangka Hari Bakti Rimbawan 2024	Maret	Direktorat PPU
10	Pelaksanaan UNEA 6 di Nairobi	Maret	Sekretariat Ditjen
11	Festival Pengendalian Lingkungan 2024.	April	Sekretariat Ditjen
12	Sosialisasi Mekanisme, Kriteria, dan Pelaporan PROPER 2024.	April	Sekretariat Ditjen

No	Judul Kegiatan Liputan	Waktu Kegiatan	Keterangan
13	Kemah Lingkungan Komunitas Lingkungan Vespa Goa Tapak Raja Kaltim.	Mei	Sekretariat Ditjen
14	Kunjungan Menteri LHK ke Ekoriparian Mega Regency Bekasi.	Mei	Direktorat PKL
15	Peresmian SPKLU Manggala Wanabakti dan Fun Riding Motor Listrik HLH 2024.	Juni	Direktorat PPU
16	Road To Campus HLH 2024 Workshop ITS "Urban Heat Island".	Juni	Direktorat PPU
17	Road To Campus HLH 2024 Workshop UNDIP "Tata Kelola Karbon Kelola Karbon dan Kedaulatan Indonesia".	Juni	Direktorat PKL
18	Road To Campus HLH 2024 Workshop UGM "Penanganan Perubahan Iklim yang Berkeadilan (Climate Justice) di Indonesia".	Juni	Direktorat PKL
19	Gowes Ramah Iklim HLH 2024 Solo.	Juni	Direktorat PPU
20	Bersih Pantai HLH 2024 di Pantai Labuan, Pandeglang.	Juni	Direktorat PPKPL
21	Festival Ciliwung HLH 2024.	Juni	Direktorat PPA
22	Workshop Success Story Tata Kelola Gambut.	Juni	Direktorat PKEG
23	Healthy Cities Summit ke-6 Tingkat Nasional, Pelabuhan Ratu Sukabumi	Juli	Direktorat PPU
24	Coastal Clean Up di Pantai Karang Ria – Kota Manado	Juli	Direktorat PPKPL
25	Rangkaian Babak Penyisihan Lomba Diplomasi Lingkungan 2024	Juli	Sekretariat Ditjen
26	Bootcamp dan Babak Penyisihan Lomba Diplomasi Lingkungan Festival LIKE 2024	Agustus	Sekretariat Ditjen
27	Rangkaian Festival LIKE 2024 di JCC	Agustus	Sekretariat Ditjen
28	Hari Konservasi Alam Nasional 2024 di Boyolali	Agustus	Sekretariat Ditjen
29	Diplomasi Lingkungan Festival LIKE 2024	Agustus	Sekretariat Ditjen
30	Rangkaian Lomba 17an HUT RI ke-79 lingkup Ditjen PPKL	Agustus	Sekretariat Ditjen
31	The Asia Pacific Regional Forum on Health and the Environment	September	Direktorat PPU
32	Jambore Pertikawan	September	Sekretariat Ditjen
33	Sosialisasi Mekanisme Sanggahan PROPER	September	Sekretariat Ditjen
34	Ekspose Potensi Wisata Alam Taman Nasional Tanjung Puting	September	Sekretariat Ditjen
35	Ambassador's Bamboo Bike Club	September	Sekretariat Ditjen
36	Peresmian Ekoriparian UMRI dan UNILAK, serta Kuliah Umum Menteri LHK	September	Direktorat PPA
37	Workshop Ekoriparian dan Pemulihan Lingkungan di UNILAK	September	Direktorat PKL
38	Kunjungan Pusat TPS 3R Jatisari Bekasi	September	Direktorat PPA
39	Kunjungan dan diskusi anggota Komisi IV DPR-RI untuk Program Ekoriparian dan Pengelolaan Sempadan Sungai Terpadu Dengan TPS 3R	Oktober	Direktorat PPA
40	Verifikasi Program Community Development dan Bimbingan Teknis PT Pertamina (Persero)	Oktober	Sekretariat Ditjen
41	Kunjungan Regional Director UNEP ke RC3S Bali	Oktober	Sekretariat Ditjen
42	The 6th Meeting of Working Group on Marine Litter, the 2nd Meeting of Working Group on Marine and Coastal Ecosystem, dan the 26th Intergovernmental Meeting of COBSEA	November	Direktorat PPKPL
43	COP29 UNFCCC Baku Azerbaijan	November	Sekretariat Ditjen
44	Aksi Bersih Sungai bersama Menteri LH di Kali Cipinang	November	Direktorat PPA
45	Supervisi Rapot Final PROPER di Surabaya	November	Sekretariat Ditjen
46	Bersih Sungai Ciliwung Depok	November	Direktorat PPA
47	Courtesy Call Menteri Bersama Dubes Finland, Singapore, dan US	November	Sekretariat Ditjen
48	Presentasi Teknis PROPER EMAS	November	Sekretariat Ditjen
49	Pelatihan Refreshment PEDAL	November	Sekretariat Ditjen
50	BayRun For Charity GBK	November	Sekretariat Ditjen
51	Penanaman Pohon di Ruang Terbuka Hijau Satria, Meatland Menteng	November	Direktorat PKL
52	Kunjungan Menteri ke Pekanbaru, Riau	November	Direktorat PKEG
53	Rapat kordinasi Penanganan Isu Polusi Udara bersama Pemprov DKI	November	Direktorat PPU
54	Kordinasi penanganan udara Jabodetabek	November	Direktorat PPU
55	Pertemuan Menteri LH bersama para CEO Kandidat PROPER EMAS	Desember	Sekretariat Ditjen
56	Green Leadership CEO PROPER 2024	Desember	Sekretariat Ditjen
57	Penanaman Pohon di Trenggalek	Desember	Direktorat PKL
58	Penutupan Festival Ciliwung 2024	Desember	Direktorat PPA
59	Pengelolaan Sampah Nataru di Terminal Kampung Rambutan	Desember	Sekretariat Ditjen
60	Peresmian SPKUA Kabupaten Jombang	Desember	Direktorat PPU
61	Kunjungan Kerja Menteri LH ke Mangrove Kabupaten Demak dan Kota Semarang	Desember	Direktorat PPKPL
62	Koordinasi Penanganan Pencemaran Udara Jabodetabek.	Desember	Direktorat PPU

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Selama tahun 2024, Pokja Kehumasan dan Data Informasi Ditjen PPKL berhasil melaksanakan berbagai aktivitas strategis untuk mendukung penyebaran informasi publik. Pengelolaan media sosial dilakukan melalui lima platform utama, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan Twitter, dengan total 2.983 unggahan hingga 31 Desember 2024. Selain itu, Pokja juga menyelenggarakan 8 kegiatan webinar; 1 media briefing; 3 konferensi pers; serta 1 kegiatan podcast.

Dalam ranah publikasi, terdapat 24 kegiatan advertorial (pemasangan berita) di media massa dan 286 video yang ditayangkan melalui kanal YouTube Ditjen PPKL. Tak hanya berfokus pada liputan dan publikasi, Pokja juga melayani 5 permintaan wawancara dari wartawan yang menegaskan perannya sebagai garda depan komunikasi publik Ditjen PPKL. Detail kegiatan layanan informasi dan kehumasan selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 28 s.d Tabel 32 berikut ini:

Tabel 29. Pengelolaan Media Sosial Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Media Sosial	Jumlah Postingan Konten	Insight
1.	Instagram Feeds (video/reels/infografis/berita)	220	Followers: 98.883
	Instagram Instastory	1.921	Meningkat 122,57%
2.	Facebook Postingan (video/infografis/berita)	220	Fanpage: 5.748 (meningkat 64%) Friends: 4.802 (meningkat 103,98%)
3.	Twitter	45	Followers: 3.856 Meningkat 126,77%
4.	Youtube	265	Subscribers: 151.646
	Video	249	Meningkat 115,76%
	Short	16	1.513.311 views
5.	Tiktok	47	Followers: 4.575 Meningkat 149,50%

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tabel 29. Kegiatan Webinar, Media Briefing dan Konferensi Pers Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Judul Webinar dan Media Briefing	Waktu Kegiatan
WEBINAR		
1	Sharing Session Bersama Local Hero Pemulihan Lingkungan	Maret 2024
2	Technical Meeting rangkaian Lomba HLH 2024 (LKP, LVL, dan LKT)	Maret 2024
3	Bootcamp 1 rangkaian Lomba HLH 2024 (LKP, LVL, dan LKT)	Mei 2024
4	Bootcamp 2 rangkaian Lomba HLH 2024 (LKP, LVL, dan LKT)	Mei 2024
5	Bootcamp 3 rangkaian Lomba HLH 2024 (LKP, LVL, dan LKT)	Mei 2024
6	Bootcamp Lomba Diplomasi Lingkungan Festival LIKE 2024.	Mei 2024
7	Restorasi Lingkungan Pulihkan Fungsi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Mei 2024
8	Babak Penyisihan Lomba Diplomasi Lingkungan Festival LIKE 2024.	Agustus 2024
MEDIA BRIEFING		
1	Festival LIKE – 2	Agustus 2024
KONFERENSI PERS		
1	Festival Pengendalian Lingkungan Tahun 2024	April 2024
2	Update Penanganan Kualitas Udara Jabodetabek	Mei 2024
3	Perkembangan Kualitas Udara Jabodetabek	Agustus 2024

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tabel 30. Podcast Ditjen PPKL Tahun 2024

No.	Judul Podcast	Waktu kegiatan
1	Podcast Keliling Bhumi: Masa Depan Kendaraan Listrik Pilihan Lingkungan Atau Sekedar Gaya?	Maret 2024

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tabel 31. Advetorial Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Kegiatan	Waktu Penayangan/Terbit	Media
1	Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2023 Ditjen PPKL KLHK	28 – 29 Januari 2024	Koran Sinar Harapan, harianhaluan.com, waspada.id, neraca.co.id, suarakarya.co.id, sinarharapan.net, mediaindonesia.com, beritabuana.co, gatra.com, rm.id, amunisi.co.id, reporter.id, riaumandiri.co, jakarta.suaramerdeka.com, nasional.okezone.com, medcom.id, tribunnews.com, koran-jakarta.com, jurnas.com, krjogja.com, nasional.sindonews.com, jpnn.com, jawapos.com, pressrelease.kontan.co.id, dan beritasatu.com.
2	Kinerja Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	20 – 21 Januari 2024	Koran NERACA, Koran Sinar Harapan, Koran WASPADA, Koran Singgalang, waspada.id, beritabuana.co, riaumandiri.co, krjogja.com, neraca.co.id, sinarharapan.net, suarakarya.co.id, medcom.id, harianhaluan.com, koran-jakarta.com, nasional.sindonews.com, jakarta.suaramerdeka.com, tribunnews.com, mediaindonesia.com, bernas.id, gatra.com, jurnas.com, rm.id, beritasatu.com, indotren.com, nasional.okezone.com, jpnn.com, dan harianjogja.com.
3	Gerakan Penanaman Pohon Serentak yang Dilakukan di Kebun Raya Bambu Magetan, Jawa Timur	6 Februari 2024	jpnn.com, riaumandiri.co, waspada.id, beritabuana.co, krjogja.com, suarakarya.co.id, rm.id, news.okezone.com, harianhaluan.com, medcom.id, mediaindonesia.com, harianterbit.com, neraca.co.id, beritasatu.com, sinarharapan.net, tribunnews.com, news.harianjogja.com, koran-jakarta.com, dan nasional.sindonews.com.
4	Gerakan Penanaman Pohon Serentak Di Seluruh Indonesia	30 – 31 Januari 2024	Koran Sinar Harapan, Koran NERACA, harianhaluan.com, beritabuana.co, riaumandiri.co, news.okezone.com, suarakarya.co.id, waspada.id, medcom.id, sinarharapan.net, jakarta.suaramerdeka.com, gatra.com, mediaindonesia.com, indotren.com, pressrelease.kontan.co.id, jurnas.com, koran-jakarta.com, reporter.id, amunisi.co.id, nasional.sindonews.com, rm.id, neraca.co.id, tribunnews.com, jpnn.com, krjogja.com, dan beritasatu.com
5	Festival Pengendalian Lingkungan 2024	23 – 24 April 2024	Metro TV
6	Festival Pengendalian Lingkungan 2024	23 April 2024	Media Indonesia
7	Festival Pengendalian Lingkungan 2024 di media online.	23 – 24 April 2024	beritabuana.co; republika.co.id; harianhaluan.com ; jawapos.com; jpnn.com; koran-jakarta.com; krjogja.com; liputan6.com; medcom.id; nasional.okezone.com; nasional.sindonews.com; pressrelease.kontan.co.id; riaumandiri.co; rm.id; sinarharapan.net; suarakarya.co.id; swa.co.id; tribunnews.com; dan Waspada.id.
8	Bersih Pantai di Pantai Labuan, Pandeglang	8 – 9 Juni 2024	harianhaluan.com; pressrelease.id; waspada.id; riaumandiri.co; sinarharapan.net; newsokezone.com; krjogja.com; neraca.co.id; medcom.id; suarakarya.co.id; rm.id; beritasatu.com; koran-jakarta.com; jpnn.com; tribunnews.com; metro.sindonews.com; jawapos.com
9	Peresmian SPKLU & Fun Riding Motor Listik	10 Juni 2024	Riaumandiri; cari.republika.co; sinarharapan.net; medcom.id; rm.id; nasional.okezone; harianhaluan.com; suarakarya.co; waspada.id; beritasatu.com; pressrelease.com; krjogja.com; jpnn.com; liputan6.com; metro.sindonews.com; jawapos.com; tribunnews.com
10	Workshop ITS	28 – 29 Juni 2024	jpnn.com; sinarharapan.net; harianhaluan.com; suarakarya.co.id; riaumandiri.co; waspada.id; republika.co.id; rm.id; koran-jakarta.com; nasional.sindonews; krjogja.com; news.okezone.com; jawapos.com; pressleases.kontan; liputan6.com
11	Workshop UNDIP	30 Juni – 1 Juli 2024	beritasatu.com, jakarta.suaramerdeka.com, rm.id, jpnn.com, jawapos.com, parle.co.id, waspada.id, riaumandiri.co,

No	Kegiatan	Waktu Penayangan/Terbit	Media
			medcom.id, koran-jakarta.com, tribunnews.com, newss.okezone.com, dan harianhaluan.com.
12	Gowes Ramah Iklim 2024	29 Juni – 1 Juli 2024	pressrelease.kontan.co.id; beritasatu.com; cari.republika.co.id; tribunnews.com; liputan6.com; jawapos.com; jakarta.suaramerdeka; nasional.okezone.com; koran-jakarta.com; krjogja.com; medcom.id; waspada.id; parle.co.id; riaumandiri.com; harianhaluan.com; suarakarya.co.id; jpnn.com; sinarharapan.net; nasional.sindonews; rm.id
13	Festival Ciliwung	16 – 17 Juni 2024	metro.sindonews.com; tribunnews.com; liputan6.com; beritasatu.com; rm.id; riaumandiri.co; harianhaluan.com; jpnn.com; nasional.okezone.com; medcom.id; waspada.id; sinarharapan.net; suarakarya.co.id; koran-jakarta.com
14	Festival Ciliwung	15 Juni 2024	Metro TV
15	Peresmian SPKLU & Fun Riding Motor Listik	9 Juni 2024	Metro TV
16	Elang Jawa Trail Run 2024	22 Juni 2024	Metro TV
17	Workshop Tata Kelola Gambut	6 Juni 2024	Metro TV
18	Malam Anugerah dan Diplomasi Lingkungan pada Festival LIKE	11 – 12 Agustus 2024	Metro TV
19	Malam Anugerah dan Diplomasi Lingkungan pada Festival LIKE	12 Agustus 2024	Media Indonesia
20	Malam Anugerah dan Diplomasi Lingkungan pada Festival LIKE		jpnn.com; beritabuana.co; harianhaluan.com; riaumandiri.co; sinarharapan.net; suarakarya.co.id; pressrelease.kontan.co.id; waspada.id; rm.id; nasional.okezone.com; krjogja.com; nasional.sindonews.com; tribunnews.com; jawapos.com; koran-jakarta.com; liputan6.com medcom.id
21	Peresmian Ekoriparian UMRI & UNILAK di Metro TV	17 Juli 2024	Metro TV
22	Peresmian Ekoriparian UNILAK dan UMRI	30 September – 1 Oktober 2024	sinarharapan.net; beritabuana.co; news.okezone.com; waspada.id; beritastu.com; rm.id; news.okezone.com; cari.republika.co.id; pressrelease.kontan.co.id; jpnn.com; suarakarya.co.id; medcom.id; mediaindonesia.com; nasional.sindonews.com; liputan6.com; tribunnews.com
23	Ambassador's Bamboo Bike Club	29 – 30 September 2024	riaumandiri.co; beritabuana.co; www.waspada.id; sinarharapan.net; suarakarya.co.id; medcom.id; jpnn.com; pressrelease.kontan.co.id; beritasatu.com; rm.id; harianterbit.com; nasional.okezone.com; theeditor.id; liputan6.com; harianjogja.com; tribunnews.com; nasional.sindonews.com
24	Aksi Bersih Sungai Bersama Menteri LH	1 November 2024	suarakarya.co.id; www.sinarharapan.net; rm.id; www.medcom.id; nasional.sindonews.com; swa.co.id; www.jpnn.com; koran-jakarta.com; megapolitan.okezone.com; cari.republika.co.id; www.krjogja.com; www.beritasatu.com; harianterbit.com; balipuspanews; mediaindonesia.com; voi.id; liputan6.com; jakarta.suaramerdeka.com; pressrelease.kontan.co.id

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tabel 32. Daftar Video Kegiatan Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Judul Video	Ringkasan	Waktu Publikasi
1	Video Publikasi OECD Award Inovasi PROPER	The 2023 OECD Call for Innovation in Public Services (#CallforInnovations) adalah inisiatif dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang bertujuan mendorong inovasi dalam layanan publik untuk meningkatkan	Februari 2024

No	Judul Video	Ringkasan	Waktu Publikasi
		efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pemerintah.	
2	Video Gemilang Aksiku Reunion 2023	Video reuni peserta Gemilang Aksiku Tahun 2023 yang dikumpulkan dari setiap batch untuk belajar banyak hal baru yang seru dan bermanfaat.	Maret 2024
3	Video Ekspose dan Laporan Dirjen PPKL untuk Festival PPKL 2024	Video rangkuman kinerja dan capaian Ditjen PPKL selama tahun 2023 yang disampaikan pada Pembukaan Festival Pengendalian Lingkungan Tahun 2024.	April 2024
4	Hari Air Sedunia 2024	Untuk memperingati Hari Air Sedunia, pembuatan video ucapan dapat menjadi cara kreatif untuk menyampaikan pesan penting tentang kesadaran dan pelestarian sumber daya air. Video ini dapat berisi pesan inspiratif, ajakan untuk menjaga kebersihan air, serta aksi sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi sumber air bersih.	Maret 2024
5	Podcast Keliling Bhumi edisi Tren Mobil Listrik	Podcast Keliling kembali hadir di episode perdana tahun 2024 dengan topik menarik seputar perkembangan dan masa depan kendaraan listrik di Indonesia. Bintang tamu yaitu Fitra Eri (tokoh otomotif Indonesia), Megantara Vilanda (Manajer Bisnis Retail dan Pelayanan PLN), Tulus Laksono (Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL), dan Bima Yulihanda (tim Anargya ITS EV Team).	Maret 2024
6	Ekspose Green Leadership (bahan tayang)	Bahan tayang Festival Pengendalian Lingkungan Tahun 2024	April 2024
7	Laporan Dirjen Festival Pengendalian Lingkungan 2024 (bahan tayang)	Bahan tayang Festival Pengendalian Lingkungan Tahun 2024	April 2024
8	Kunjungan Proyek Lahan Gambut dan Peresmian Mini Education Center Kerjasama Indonesia – Korea	Rekap perjalanan mengunjungi Proyek Restorasi Lahan Gambut sekaligus meresmikan pembangunan Mini Education Center di Provinsi Jambi.	Maret 2024
9	Festival Pengendalian Lingkungan Day 1 Recap	Rekap penyelenggaraan Festival Pengendalian Lingkungan Tahun 2024	Mei 2024
10	Festival Pengendalian Lingkungan Day 2 Recap	Rekap penyelenggaraan Festival Pengendalian Lingkungan Tahun 2024	Mei 2024
11	Peserta Gemilang Aksiku Reunion Kembali Melanjutkan Petualangannya - Part 2	Peserta Gemilang Aksiku Reunion melanjutkan aksinya dengan kegiatan positif di Semarang. Mereka melakukan bersih sungai dan menanam mangrove untuk mendukung kelestarian lingkungan.	Mei 2024
12	Aksi Bersih Sungai Ikut Dimeriahkan Warga Bogor Utara.	Rekap kegiatan Aksi Bersih Sungai Ciliwung Pada 9 Juni 2024 di Saung Alkesa, Bogor Utara. Aksi bersih sungai ini adalah salah satu kegiatan KLHK yang berkolaborasi bersama beberapa komunitas dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024.	Juni 2024
13	Ambassador's Bamboo Bike Club, segera gowes bareng 11 Agustus 2024	Rekap kegiatan peluncuran Ambassador Bamboo Bike Club (ABBC) dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup 2024. Ambassador Bamboo Bike Club (ABBC) adalah bagian dari gerakan bersepeda untuk diplomasi lingkungan dan untuk masa depan yang lebih hijau dan sehat.	Juli 2024
14	Karya peserta lomba HLH tahun 2024 (10 video)	Kumpulan video karya lomba Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024.	Juli 2024
15	Road To Campus ITS: Cara Seru Anak Muda Surabaya Membahas Urban Heat Island	Rekap kegiatan Workshop Road To Campus ITS untuk melihat keseruan generasi muda Surabaya dalam berdiskusi tentang Urban Heat Island. Workshop Road To Campus ITS ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun 2024!	Juli 2024
16	Road To Campus UNDIP: Perkuat Generasi Muda Dalam Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan Indonesia	Rekap kegiatan Workshop Road To Campus UNDIP untuk melihat keseruan generasi muda Semarang berdiskusi tentang Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan Indonesia. Workshop Road To Campus UNDIP ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun 2024!	Juli 2024
17	Aksi Coastal Cleanup Pantai Labuan Banten	Rekap kegiatan Aksi bersih pantai di Labuan, Pandeglang, Banten. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara dunia usaha, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, masyarakat, dan generasi muda.	Juli 2024
18	Festival LIKE-2: Recap day 1	Rekap kegiatan pelaksanaan Festival LIKE-2 hari 1	Agustus 2024
19	Festival LIKE-2: Recap day 2	Rekap kegiatan pelaksanaan Festival LIKE-2 hari 2	Agustus 2024
20	Festival LIKE-2: Recap day 3	Rekap kegiatan pelaksanaan Festival LIKE-2 hari 3	Agustus 2024
21	Festival LIKE-2: Recap day 4	Rekap kegiatan pelaksanaan Festival LIKE-2 hari 4	Agustus 2024
22	Keseruan Aksi Coastal Clean Up di Pantai Karang Ria Kota Manado	Rekap kegiatan aksi bersih pantai di Pantai Karang Ria, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu dari bagian rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024.	Agustus 2024
23	Lead By Exmple: Untuk	Video informatif tentang Indonesia yang kaya akan sumber daya	September

No	Judul Video	Ringkasan	Waktu Publikasi
	lingkungan yang berkelanjutan	alam, telah memanfaatkan kemajuan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan contoh aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Mulai dari potensi besar sumber daya panas bumi, PLTS terbesar ke-3 di dunia, pemanfaatan energi alternatif, monitoring dan digitalisasi, menjadi faktor-faktor pendorong terwujudnya aksi pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan dan mendukung mitigasi perubahan iklim.	2024
24	Teaser: Road To Anugerah Lingkungan 2024	Promosi kegiatan Anugerah Lingkungan 2024. Pada program kerja ini, Ditjen PPKL KLHK akan melakukan penilaian terhadap PROPER Emas 2024, Green Leadership Dunia Usaha, Green Leadership Kepala Daerah, dan Apresiasi Video Eco-Inovasi dan Inovasi Sosial PROPER.	September 2024
25	Video Edukatif Prestasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan KLHK 2024 (10 Tahun Untuk Sustainability)	Ekspose kinerja Ditjen PPKL selama 10 tahun dari Ditjen PPKL KLHK	Oktober 2024
26	10 tahun kerja untuk Sustainability 2024	Ekspose kinerja Ditjen PPKL selama 10 tahun dari BSI LHK	Oktober 2024
27	10 Tahun Kinerja Untuk Sustainability 2024	Ekspose kinerja Ditjen PPKL selama 10 tahun dari Inspektorat Jenderal KLHK	Oktober 2024
28	10 Tahun Kinerja Untuk Sustainability 2024	Ekspose kinerja Ditjen PPKL selama 10 tahun dari Sekretariat Jenderal KLHK	Oktober 2024
29	Mengubah Sampah Jadi Manfaat Ekonomi: Kisah TPS 3R Jatisari	TPS 3R Jatisari yang merubah sampah organik menjadi biogas untuk bahan bakar memasak atau energi listrik, dan limbah plastik diolah menjadi bahan bakar kendaraan.	Oktober 2024
30	Logo Baru Semangat Baru: Dedikasi dan Etik untuk Lingkungan	Pengenalan lahirnya kembali Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ditandai dengan peluncuran logo baru. Logo ini adalah simbol komitmen kami untuk masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.	November 2024
31	Purna Pertikawan Nasional 2024	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup baru saja menggelar Pertikawan Nasional 2024 di Yayasan Bambu Indonesia. Dalam acara ini, peserta menerima pembekalan teknis tentang pengelolaan lingkungan.	November 2024
32	Profil Kandidat Emas PROPER 2024 (201 video)	Pengenalan para perusahaan calon kandidat emas PROPER 2024.	Desember 2024
33	Refleksi Kolaborasi Green Leadership PROPER EMAS 2024 (27 video)	KLHK mendorong para pimpinan tertinggi (CEO) Perusahaan Kandidat PROPER EMAS 2024 untuk saling berkolaborasi melalui Green Leadership PROPER 2024.	Desember 2024
34	Presentasi Green Leadership CEO Kandidat PROPER EMAS 2024 (27 video)	Sebanyak 27 pimpinan tertinggi (CEO) Perusahaan yang telah terseleksi perusahaannya sebagai kandidat PROPER EMAS 2024 mempresentasikan visi dan capaian perusahaan terhadap "Extraordinary Turnarounds", serta kolaborasi yang akan dilakukan untuk keberlanjutan.	Desember 2024

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tahun 2024 dilaksanakan pemeliharaan website Ditjen PPKL, termasuk memperbaharui tampilan website. *Website* atau laman resmi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjadi pusat informasi dan publikasi kepada masyarakat selain media sosial. Jumlah pengunjung *website* hingga tahun 2024 adalah 221,044 pengunjung. Para pengunjung website juga diberikan kesempatan untuk menilai tampilan maupun fungsi *website* Ditjen PPKL dengan hasil baik. Pengelolaan website dilaksanakan meliputi pengembangan *website* dan *updating* atau pembaruan konten (materi peraturan, bahan publikasi, berita liputan, dan berita liputan). Berikut adalah tampilan website terbaru setelah dilakukan pemeliharaan website.

Tahun ini, website telah mendapatkan pembaruan fitur yang signifikan untuk meningkatkan fungsi dan kenyamanan pengguna. Salah satu pembaruan utama adalah pembaharuan konsep konten website, yang mencakup integrasi halaman utama dengan berbagai informasi penting seperti PROPER, IKLH, SIMPEL, ONLIMO, ISPU, SISPEK, SPARING, dan SIMPEG. Selain itu, akses admin kini dapat dilakukan oleh lebih dari satu pengguna untuk mempermudah pengelolaan. Fitur baru lainnya adalah adanya kolom redaksi, yang berfungsi sebagai ruang komunitas untuk berbagi informasi dan ide. Tak kalah penting, fitur reset *password* juga telah ditambahkan untuk memberikan kemudahan dan keamanan lebih bagi pengguna.

4. Layanan Data dan Informasi

Penyediaan layanan data dan informasi dilakukan melalui pengelolaan data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikoordinasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Permintaan data dari masyarakat diajukan melalui website PPID Kementerian LHK dan disampaikan ke masing-masing unit eselon I. PPID Ditjen PPKL dibantu oleh Tim berdasarkan SK Direktur Jenderal PPKL Nomor: 112 Tahun 2024 tentang Tim Kehumasan dan Data Informasi Direktorat Jenderal PPKL. Tim terdiri dari perwakilan masing-masing direktorat. Selama tahun 2024, telah dilakukan pemenuhan/penyelesaian data dan informasi sebanyak 25 (dua puluh lima) permintaan seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

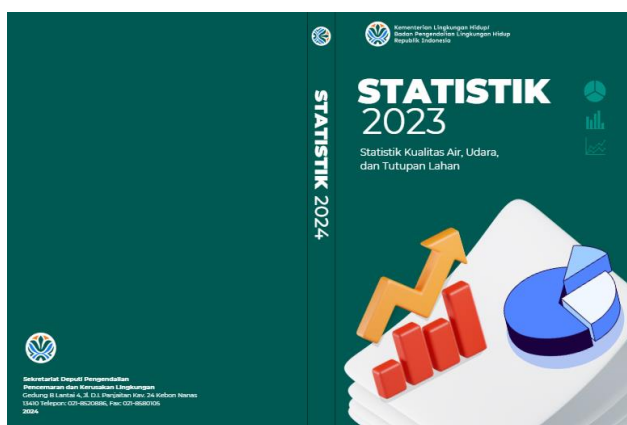
Tabel 33. Pemenuhan Data dan Informasi PPID Ditjen PPKL Tahun 2024

No	Judul Informasi	Pemohon
1	Data harian konsentrasi partikular PM2,5 di Jakarta bulan Januari - Oktober di setiap stasiun	Cindi Cludia
2	Data berisi nilai HC, CO, SO2, NO2, O3, PM10, PM2.5, temperatur, kelembapan, curah hujan, lamanya penyinaran matahari, kecepatan angin dan arah angin tahun 2018 - 2023 di kota bandung	Aurel Layalia
3	Data berisi nilai kandungan polutan udara harian meliputi: PM10, SO2, CO, O3, NO2, nilai kritis dan kategori di stasiun pemantauan DKI Jakarta	Riyand Hamzah
4	Data terkait partikel polusi udara	Irfan Adityo
5	Data terkait data PM 2.5 per jam, per hari selama 3 bulan (September - November) 2023 di 8 stasiun	Brenda Arhan
6	Data terkait data ISPU Wilayah Palembang tahun 2018 - 2023	Jodi Noviandri
7	Data terkait tingkat pencemaran yang dihasilkan oleh setiap sektor industri di Indonesia periode 2018 hingga 2022. Dan data industri yang menggunakan energi dan Sumber daya alam terbanyak pada tahun 2018 sampai 2022	Maya Oktavia
8	Data terkait kebakaran hutan, deforestasi dan timbunan sampah tahun 2022 di Pulau Jawa	Berliana Adinda
9	Data terkait data kualitas udara per-jam yang mencakup parameter PM10, PM2.5, SO2, CO, O3, NO2, HC, nilai kritis, dan kategori untuk stasiun pemantauan Bundaran HI (DKI 1) selama rentang waktu tahun 2019 – 2023	Muhammad Nabil Azizi
10	Data terkait perusahaan penyumbang limbah B3 tahun 2018-2011	Ayu Vaya Romadon
11	Data terkait indeks kualitas udara dan inventarisasi emisi tahun 2019 - 2023 seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia	Steven Navalدين
12	Data terkait Pencatatan Kualitas Air periode tahun 2000-2023	Yehezkiel Christian Purnomo
13	Data terkait Infrastruktur Hijau	Fadli Anwaruddin

No	Judul Informasi	Pemohon
14	Data terkait Konsentrasi NO2 Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023 Konsentrasi SO2 Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023 Konsentrasi O3 Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023 IKU Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023 Curah hujan Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023 Suhu Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023 Kecepatan angin Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023 Arah angin Jawa Barat Januari 2017-Desember 2023	Alisha Azri Khairani
15	Data informasi terkait indeks kualitas udara di Kota Jakarta tahun 1985 - 2020	Fara Yulia Fransiska
16	Data Terkait peta tutupan lahan gambut tahun 2017 dan tahun 2023 (atau tahun terbaru) dan data pengukuran subsidensi tanah gambut Indonesia	Resti Salmayenti
17	Data Parameter Udara Harian ISPU Periode 2015 - 2023	Hayyu Qaimamunazzala
18	Data terkait ISPU periode 2023 - 2024	Cyntia Centauri
19	Data Fungsi Lahan Gambut	Uli Artha Siagian
20	Data terkait Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan data polutan PM2.5 yang tertinggi secara bulanan periode 2023 – 2024 serta data emisi GRK nasional periode 2018 - 2024	LKBN Antara
21	Data terkait PM10, PM2.5, O3, CO2, SO2, NOX, heavy metals, NMVOCs, DIOXINS, FURANS, konsentrasi level dari polutan lainnya, indeks kualitas air di kota Jakarta Barat tahun 2022/2023 per daerahnya	Ghina Siti
22	Data terkait hasil pengukuran bulanan konsentrasi PM10 di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan	Diga Areta
23	Data terkait konsentrasi udara ambien PM2.5	Rafi Tasrif
24	Data IKLH di kab/kota provinsi Jawa tahun 2018 - 2023	Emily Azizaida
25	Data terkait CEMS	Haykal Fikri

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Selain menyajikan *website*/laman informasi tentang program Ditjen PPKL (ppkl.menlhk.go.id), lingkup layanan data dan informasi juga menyusun buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2023. Buku ini menyajikan kompilasi data tren kegiatan 5 (lima) tahunan tentang data hasil pemantauan kualitas air, udara dan tutupan lahan sejak tahun 2019 – 2023. Buku ini merupakan pemenuhan Satu Data Indonesia yang dikoordinasi oleh Badan Pusat Statistik.



Gambar 26. Cover Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2023

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

5. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Selama tahun 2024, telah dilakukan pencatatan bulanan laporan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang diusulkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) KLHK. Pencatatan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan PBj setiap triwulan, yang dituangkan dalam bentuk Matriks

PBJ. Selain itu, di dalam Laporan Kinerja Triwulan (4 laporan) juga telah dicantumkan jumlah paket PBJ yang dilaksanakan pada triwulan berjalan. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 22 (dua puluh dua) paket PBJ yang telah dilaksanakan pada semua unit eselon II lingkup Ditjen PPKL. Terdapat 1 paket tidak jadi dilaksanakan dan 1 paket harus dilakukan seleksi ulang karena tidak ada peserta yang mendaftar.

Setiap triwulan juga dilakukan penyusunan matriks Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) sesuai permintaan data dari Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Itjen KLHK) berdasarkan ketentuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain menyusun matriks tersebut, juga telah diselenggarakan beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Bimbingan Teknis Pengisian Matriks Reviu PAPBJ Ditjen PPKL Triwulan III Tahun 2024 oleh APIP Inspektorat Wilayah I pada tanggal 29-30 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para PPK dan pembantu PPK dalam menyusun matriks PAPBJ tersebut.
- b. Mengajukan Surat Pengantar kepada Kepala Biro Umum seaku Kepala UKPBJ KLHK perihal permohonan penunjukan kelompok kerja. Pada tahun 2023 telah diajukan sebanyak 13 (tiga belas) surat permohonan kelompok kerja.
- c. Pengajuan akun LPSE ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa KLHK meliputi akun Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Mengikutsertakan 1 (satu) orang fungsional pengadaan barang/jasa diklat Certificate Procurement Specialist (CPSp) dari tanggal 14 November - 6 Desember 2024.

6. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan penataan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan kegiatan pelayanan kepada unit Eselon II lingkup Ditjen PPKL. Rangkaian kegiatannya terdiri dari penelaahan, penyiapan bahan koordinasi dan koordinasi penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Jumlah peraturan perundang-undangan dan rekapitulasi status layanan penataan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 60 (enam puluh) rancangan dengan capaian sebanyak 70 (tujuh puluh) peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja pada kegiatan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri LHK yang telah diundangkan di tahun 2024 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2024.
- b. Penyusunan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan Menteri LHK yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga). Daftar Keputusan Menteri LHK secara rinci tertera dalam tabel berikut.

Tabel 34. Daftar Keputusan Menteri LHK

No	Nama Keputusan Menteri	Unit Pengusul	Status
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 111 Tahun 2024 tentang Susunan Keanggotaan dan Tugas Dewan Pertimbangan PROPER dan Tim Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Setditjen	Telah ditetapkan
2.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 370 Tahun 2024 tentang Fungsi Ekosistem Gambut pada 30 (Tiga Puluh) Kesatuan Hidrologis Gambut	Dit. PKEG	Telah ditetapkan
3.	Keputusan Menteri LHK Nomor 546 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1353/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2024 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 – 2024	Setditjen	Telah ditetapkan

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang diterbitkan sebanyak 66 (enam puluh enam) yang meliputi:
- 1) 31 (tiga puluh satu) Surat Keputusan Ditjen PPKL terkait pemulihan Ekosistem Gambut, Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada usaha dan/atau kegiatan sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - 2) 35 (tiga puluh lima) Surat Keputusan terkait pengaturan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal PPKL.

7. Fasilitas Layanan Persetujuan Teknik dan Surat Kelayakan Operasional

Penerbitan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan untuk kegiatan:

- a. Pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
- b. Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- c. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- d. Pembuangan air limbah ke laut; dan
- e. Pembuangan emisi.

Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah diterbitkan di tahun 2024 sebanyak 953 dokumen sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional yang Diterbitkan Tahun 2024

No	Persetujuan Teknis / Surat Kelayakan Operasional	Jumlah
1	Persetujuan Teknis pembuangan air limbah ke badan air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah/formasi tertentu	625
2	Persetujuan Teknis pembuangan air limbah ke laut	83
3	Persetujuan Teknis Pembuangan emisi	166
4	Surat Kelayakan Operasional	79
Total		953

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

8. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan:

- a. Perkembangan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. Norma hukum yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Maka untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, Dirjen PPKL melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini untuk meninjau apakah tujuan penyusunannya telah tercapai atau tidak dan apakah regulasi tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat;
- b. Amanat Reformasi Birokrasi (RB) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Presiden Jokowi mengamanatkan untuk memotret tingkat efektivitas dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen penilaian RB dan UU Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahapan perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;
- c. Momentum dan semangat penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Kondisi peraturan perundang-undangan Indonesia yang hiper regulasi, disharmonis, multi interpretasi harus segera diubah dengan harapan peraturan perundang-undangan menjadi simplifikasi, harmonis, dan efektif.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui tahapan: pemilihan tema, inventarisasi bahan, analisis, perumusan simpulan, perumusan rekomendasi, dan pelaporan. Tahap analisis dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan *Focus Group Discussion*. Pada tahun 2024, Ditjen PPKL telah melaksanakan *Focus Group Discussion* analisis dan evaluasi sebanyak 4 (empat) peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. FGD untuk kedua peraturan tersebut dilakukan pada 24 September 2024 dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor serta unit lain lingkup KLHK;
- b. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran Udara. FGD dilakukan pada 24 Oktober 2024 dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian Hukum dan HAM, dan Institut Teknologi Bandung;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Pelaksanaan FGD dilakukan pada 12

Desember 2024 dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Institut Pertanian Bogor, dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

9. Perjanjian Teknik dan Rekapitulasi Layanan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Selama tahun 2024, Kelompok Kerja (Pokja) Kerja Sama Teknik telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Salah satu tugas dan fungsi itu adalah melakukan pembinaan dan koordinasi kerja sama dalam dan luar negeri, serta mendukung hubungan luar negeri dan diplomasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di lingkup Ditjen PPKL. Berdasarkan target yang telah ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) dokumen kerja sama teknik, realisasi pelaksanaan kegiatan Pokja Kerja Sama pada tahun 2024 yaitu telah memfasilitasi/menyusun dokumen kerja sama dalam dan luar negerisebanyak 43 (empat puluh tiga) dokumen. Pencapaian fasilitasi kerja sama teknik itu dirincikan sebagai berikut:

a. Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri

Hasil kegiatan yang telah dicapai untuk fasilitasi dokumen kerja sama dalam negeri selama tahun 2024 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dokumen kerja sama dalam negeri, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) dokumen Nota Kesepahaman (NK) dan 2 (dua) dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS). Adapun rincian dokumen kerja sama dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 36. Daftar Fasilitasi Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2024

No.	Judul Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tanggal Penandatanganan
Dokumen Nota Kesepahaman			
1.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur - Pemerintah Kota Kupang	27 Februari 2024
2.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Pemerintah Kabupaten Banjar	5 Juni 2024
3.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	5 Juni 2024
4.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Pemerintah Kabupaten Tabalong	5 Juni 2024
5.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	5 Juni 2024
6.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	5 Juni 2024
7.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah Kabupaten Kapuas	5 Juni 2024
8.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah Kabupaten Katingan	5 Juni 2024
9.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	5 Juni 2024

No.	Judul Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tanggal Penandatanganan
		- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	
10.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah - Pemerintah Kabupaten Murung Raya	5 Juni 2024
11.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	5 Juni 2024
12.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	5 Juni 2024
13.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Gresik	5 Juni 2024
14.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Jombang	5 Juni 2024
15.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Lamongan	5 Juni 2024
16.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Pasuruan	5 Juni 2024
17.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	5 Juni 2024
18.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kota Mojokerto	5 Juni 2024
19.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kota Pasuruan	5 Juni 2024
20.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kota Probolinggo	5 Juni 2024
21.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Pemerintah Kota Surabaya	5 Juni 2024
22.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	Pemerintah Provinsi Jambi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	10 Juni 2024
23.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jambi - Pemerintah Kabupaten Tebo	10 Juni 2024
24.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat - Pemerintah Kabupaten Sintang	20 Juni 2024
25.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat - Pemerintah Kabupaten Sambas	20 Juni 2024
26.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat - Pemerintah Kabupaten Bengkayang	25 Juni 2024
27.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat - Pemerintah Kabupaten Sekadau	28 Juni 2024
28.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara - Pemerintah Kota Tarakan	17 Juli 2024
29.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	18 Juli 2024
30.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Kendal	31 Juli 2024
31.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Semarang	31 Juli 2024
32.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Cilacap	12 Agustus 2024
33.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kota Semarang	19 Agustus 2024
34.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Sragen	3 September 2024
35.	Kerja Sama dan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Sektor Industri	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian	19 September 2024
36.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Jepara	20 September 2024

No.	Judul Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tanggal Penandatanganan
37.	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Rembang	2 Oktober 2024
Dokumen Perjanjian Kerja Sama			
1.	<i>Pilot Project</i> Restorasi dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah	- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove - PT. Sumitomo Forestry Indonesia	17 Agustus 2024
2.	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta	8 Oktober 2024

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Terkait dengan kegiatan yang disepakati dengan para mitra dalam penyusunan dokumen kerja sama dalam negeri, antara lain untuk:

- 1) Pengendalian Kerusakan Gambut;
- 2) Penelitian, pengkajian, pemulihan lingkungan, pengembangan metode dan peningkatan kapasitas untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 4) Kajian terkait kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKLH);
- 5) Evaluasi Aspek Ketaatan dan/atau Lebih dari Ketaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan (PROPER);
- 6) Pengendalian dampak lingkungan sektor industri;
- 7) Sinergi pengoperasian dan perawatan jaringan peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA).

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pokja Kerja Sama Teknik juga ikut berperan aktif dalam pertemuan internal yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan - KLHK dalam rangka pembahasan dokumen Nota Kesepahaman antara MENLHK dengan mitra kerja sektor KLHK, antara lain adalah:

- 1) Nota Kesepahaman dengan Universitas Bengkulu tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Nota Kesepahaman dengan Institut Teknologi Sumatera tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Nota Kesepahaman dengan Universitas Lambung Mangkurat tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) Nota Kesepahaman dengan Universitas Mulawarman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) Nota Kesepahaman dengan Universitas Tanjungpura tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6) Nota Kesepahaman dengan Universitas Terbuka tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 7) Nota Kesepahaman dengan Universitas Pattimura tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 8) Nota Kesepahaman dengan Universitas Gajah Mada tentang Dukungan Pelaksanaan Program Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 9) Nota Kesepahaman dengan PT. Media Televisi Indonesia tentang Pengembangan Media Publikasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berkelanjutan;
- 10) Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Gambar 27. Penandatanganan PKS antara Dirjen PPKL, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta PT. Sumitomo Forestry Indonesia

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

- 11) Nota Kesepahaman dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Sinergitas dalam Program Pembangunan bidang Keamanan Laut dan Keselamatan Laut dengan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Dokumen Kerja Sama Luar Negeri

Untuk perjanjian kerja sama luar negeri, telah disusun 4 (empat) dokumen perjanjian kerja sama luar negeri yang masih dalam tahap pembahasan. Jumlah hubungan dan kerja sama luar negeri Indonesia menjadi salah satu indikator positif dalam membangun citra di mata internasional.

Penyelenggaraan hubungan dan kerja sama ini dilakukan dengan menerapkan 5 (lima) prinsip aman yang menjadi panduan dari Kementerian Luar Negeri maupun Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prinsip tersebut adalah aman secara politis, yuridis, teknis, keamanan, dan keuangan. Selain itu, diterapkan pula prinsip hubungan luar negeri yaitu *mutual trust*, *mutual respect*, dan *mutual benefit*.

Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan agar kerja sama yang dilakukan sejalan dengan kepentingan nasional, mendukung rencana strategis Kementerian LHK, serta bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Penyusunan dokumen kerja sama luar negeri pada tahun 2024 berfokus pada kelanjutan pembahasan draft kerja sama yang belum disepakati pada 2023, serta pembahasan usulan dokumen kerja sama baru dari berbagai mitra.

Tabel 37. Daftar Fasilitasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024

No.	Judul Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Status Hingga Desember 2024
1.	Fasilitasi Perpanjangan Durasi Proyek 3RproMar - <i>Memorandum of Agreement between the MoEF and GIZ concerning the Project on Reduce, Reuse, Recycle to Protect Marine Environment and Coral Reefs</i>	GIZ (kelanjutan)	MoA ditandatangani pada 31 Januari 2023 dan dalam proses penerbitan Exchange of Letters untuk persetujuan perpanjangan hingga Juni 2025

No.	Judul Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Status Hingga Desember 2024
2.	<i>Memorandum of Understanding between UNOPS and the MoEF on Implementation of National Activities of the UNEP/GEF Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand</i>	UNOPS (kelanjutan)	Draft MoU dalam finalisasi
3.	<i>Memorandum of Agreement on the Implementation of GEF/UNDP/ASEAN Project on Reducing Pollution and Preserving Environmental Flows in the East Asian Seas Through the Implementation of Integrated River Basin Management (IRBM) in ASEAN Countries (2023-2027)</i>	PEMSEA (kelanjutan)	Draft MoA dalam finalisasi
4.	<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the United Nations Environment Programme on the Appointment of the Regional Capacity Center For Clean Seas as A Cobsea Regional Activity Centre</i>	UNEP/COBSEA (kelanjutan)	Draft MoA dalam finalisasi
5.	<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the United Nations Office for Project Service about the Southeast Asia Regional Program for Combating Marine Plastics (SEA-MaP) Regional Project</i>	UNOPS (baru)	Draft MoA dalam inisiasi pembahasan
6.	<i>Implementation Arrangement antara ASEAN Korea Cooperation Fund (AKFC) dan Kementerian LHK tentang Clean Air for Sustainable ASEAN (CASA)</i>	AKFC / Seoul National University (baru)	Draft MoA dalam inisiasi pembahasan

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tema/bidang yang menjadi fokus dalam perjanjian kerja sama internasional tahun 2024 antara lain terkait pengendalian pencemaran sampah plastik di pesisir dan laut, pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan daerah aliran sungai, serta pengendalian pencemaran udara. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan dokumen kerja sama luar negeri, di antaranya:

- 1) Belum adanya dokumen pemetaan prioritas kerja sama luar negeri Direktorat Jenderal PPKL, sehingga tema kerja sama bergantung pada tawaran mitra;
- 2) Prosedur kerja sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor 134 Tahun 2023 belum dipahami optimal oleh Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PPKL, sehingga timbul perbedaan pandangan dan pendekatan pengelolaan kerja sama luar negeri;
- 3) Terbatasnya kompetensi dan sumber daya manusia Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PPKL;
- 4) Resistensi beberapa mitra terhadap pasal-pasal safeguarding yang diwajibkan dalam penyusunan dokumen perjanjian, sehingga pembahasan memerlukan waktu yang panjang;
- 5) Perubahan struktur Kementerian berdampak pada penghentian sementara untuk proses pembahasan hingga SOTK Kementerian resmi terbentuk.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada tahun 2024 serta menjadi langkah perbaikan untuk ke depan, antara lain:

- 1) Penyadartahuan tentang diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor 134 Tahun 2023 kepada UKE II lingkup Ditjen PPKL, walaupun masih secara parsial;
- 2) Intensifikasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik mitra, UKE II, Biro KLN, dan Kementerian Luar Negeri untuk percepatan pembahasan dokumen kerja sama;
- 3) Identifikasi awal dalam rangka menyusun pemetaan prioritas kerja sama luar negeri berkoordinasi dengan UKE II lingkup Ditjen PPKL;

- 4) Berupaya menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM Setditjen PPKL dan UKE II dalam penyusunan dokumen kerja sama dengan memanfaatkan proyek luar negeri yang ada di lingkup Ditjen PPKL.

Penyelenggaraan Fungsi *National Focal Point* (NFP)

Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional/forum/kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, baik di tingkat regional maupun global. Direktorat Jenderal PPKL mengampu beberapa di antaranya, yaitu: (a) *United Nations Environment Assembly*; (b) *G20 Environment and Climate Sustainability Working Group*; (c) *Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment*; (d) *Coordinating Body on the Seas of East Asia*; (e) *Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia*; (f) *ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment*; (g) *ASEAN Working Group on Water Resources Management*; dan (h) *Acid Deposition Monitoring Network in East Asia*.

Terdapat dua keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional/forum/kemitraan yang menimbulkan kontribusi tahunan, yaitu:

- 1) *Coordinating Body on the Seas of East Asia* (UNEP 810 - COBSEA), kontribusi Indonesia secara wajib dibayarkan secara tahunan. COBSEA merupakan salah satu dari 18 Regional Seas Programme yang ada di dunia, dan menjadi salah satu dari tujuh yang dikelola oleh UN Environment Programme (UNEP). Pada kerangka kerja sama ini, Indonesia berkontribusi menjadikan RC3S sebagai Regional Activity Centre COBSEA yang pertama.
- 2) *Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia* (PEMSEA), kontribusi Indonesia dibayarkan secara sukarela. Keanggotaan Indonesia pada PEMSEA mendatangkan peluang implementasi beberapa proyek di Indonesia, seperti Proyek IRBM.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal PPKL juga mengampu beberapa pertemuan internasional, di antaranya:

- 1) Presidensi G20 Brazil

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bertanggung jawab mengampu jalur negosiasi lingkungan hidup dan iklim yang dikenal dengan *Environment and Climate Sustainability Working Group* (ECSWG). Dalam kategorisasi isu ini, Brazil masih melanjutkan penggabungan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim dalam satu working group, dengan tema *Building a Just World and a Sustainable Planet*.

Pertemuan ECSWG dilaksanakan sebanyak empat kali, diikuti satu Pertemuan Tingkat Menteri. Pertemuan the 1st ECSWG dilaksanakan secara daring pada 29-30 Januari 2024. Pada kesempatan ini, Indonesia menyampaikan pandangan dan tanggapan umum terhadap isu prioritas yang diusung oleh Presidensi Brazil. Indonesia juga mendorong agar G20 kembali memperkuat kepemimpinan dan aksi nyata dalam mewujudkan agenda global dan masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selanjutnya, Delegasi Indonesia menghadiri the 2nd ECSWG pada 12-13 April 2024 di Brasilia, Brazil. Pertemuan berfokus pada dua dari empat isu prioritas Presidensi, yaitu di bidang kelautan dan adaptasi perubahan iklim. Pada pertemuan ini, Indonesia menyampaikan pandangan dan best practices tentang integrasi aksi pada bidang kelautan dalam NDC, marine spatial planning, proses dalam negeri terkait BBNJ Agreement, dan pendanaan adaptasi perubahan iklim.

The 3rd ECSWG dilaksanakan pada 20-21 Juni di Manaus, Brazil, dan berfokus pada topik payment for ecosystem services dan waste and circular economy. Pada topik PES, Indonesia menekankan dukungan terhadap konsep tersebut, serta membagikan peluang dan tantangan dari implementasi PES di Indonesia. Sementara, pada topik WCE, Indonesia menitikberatkan pentingnya mendefinisikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang inklusif, serta membagikan pandangan tentang penerapan extended producer responsibility, proses global dalam INC on Plastic Pollution, dan pentingnya memperhatikan tantangan dan kondisi nasional dalam penerapan ekonomi sirkular.

Sementara, pada the 4th ECSWG, Presidensi berfokus pada pembahasan detail draft ECSWG Ministerial Declaration. Pertemuan ini menyepakati draft yang selanjutnya dibahas dan diadopsi pada Pertemuan Tingkat Menteri pada 3 Oktober 2024 di Rio de Janeiro.

2) *Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment (APRFHE)*

Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment (APRFHE) merupakan forum kerja sama antar pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan lingkungan yang menjadi platform terkait kebijakan dan intervensi nasional dan regional, guna meningkatkan dan menjaga kesehatan dan lingkungan, serta mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals di 51 negara Asia Pasifik.

Sejak April 2023, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjadi *Co-National Focal Point (Co-NFP)* APRFHE bersama dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. Selaku Co-NFP, Dirjen PPKL mengkoordinasikan persiapan substansi, logistik, dan program ekskursi untuk penyelenggaraan pertemuan-pertemuan APRFHE di lingkup Kementerian LHK, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan *High Level Officials Meeting (HLOM)* APRFHE ke-12 pada 24-25 September 2024 dan *Ministerial Meeting* APRFHE ke-5 pada 26 September 2024.

Topik yang dibahas dalam pertemuan 12th HLOM APRFHE antara lain:

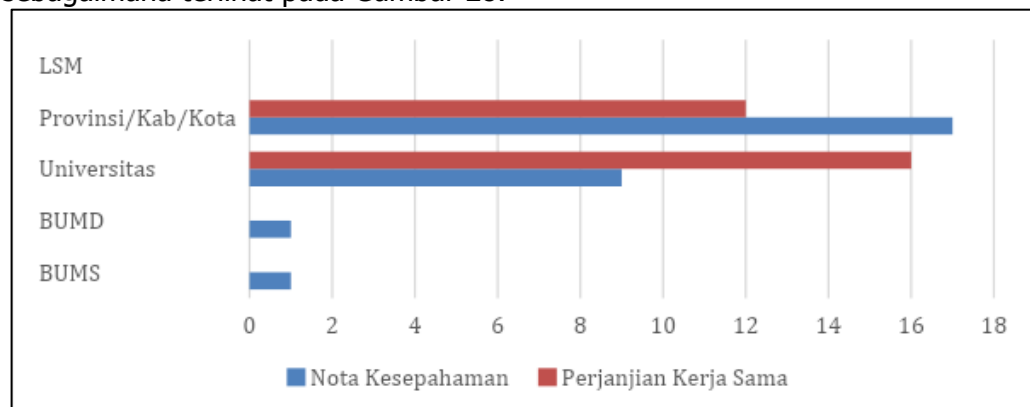
- a) Tata kelola organisasi APRFHE, termasuk mekanisme pendanaan dan pemantauan (dilanjutkan dari 11th HLOM);
- b) Laporan Implementasi Rencana Kerja APRFHE 2020-2024;
- c) *Scientific Session*, berisi paparan isu strategis dan rencana kerja masing-masing *Thematic Working Group*;
- d) Pembahasan dan rencana pembaruan *Framework for Cooperation* APRFHE;

- e) Pembahasan draft Jakarta *Declaration* sebagai *outcome* kepemimpinan Indonesia; serta
- f) Pengusulan Keketuaan APRFHE selanjutnya.

Pada Pertemuan tersebut, Indonesia berhasil mendorong kesepakatan negara anggota untuk mengadopsi Jakarta *Declaration*. Dokumen ini berisikan komitmen negara anggota terhadap isu strategis di kawasan yang relevan dengan tujuan APRFHE. Indonesia, bersama Sekretariat Internasional APRFHE (WHO WPRO, WHO SEARO, UNEP ROAP) telah menjajaki komunikasi dengan negara anggota APRFHE lain untuk menjadi Ketua APRFHE pada periode selanjutnya. Namun demikian, hingga penyelenggaraan Ministerial Meeting, belum ada negara anggota yang mengajukan diri untuk mengemban posisi tersebut. Dengan demikian, keketuaan APRFHE akan diserahkan kepada Sekretariat Internasional yang akan menjalankan fungsi keketuaan secara interim.

10. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Teknik

Hingga saat ini terdapat sekitar 54 (lima puluh empat) dokumen kerja sama dalam negeri yang masih aktif di lingkup Ditjen PPKL dengan mitra kerja sama yang beragam antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten), NGO/Organisasi, Universitas, BUMD dan BUMS sebagaimana terlihat pada Gambar 28.



Gambar 28. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Ditjen PPKL

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Tabel 38. Rekapitulasi Kerja Sama Dalam Negeri berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024

No	Unit Kerja	TAHUN									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		NK	PKS	NK	PKS	NK	PKS	NK	PKS	NK	PKS
1	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-	-	1	-	2	-	2	3	37	1
2	Sekretariat Ditjen PPKL	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
3	Direktorat Pengendalian Kawasan Ekosistem Gambut	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-
4	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		0	2	1	0	2	2	2	6	37	2

Sumber : Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

Pada tahun 2024, terdapat pencapaian fasilitasi kerja sama dalam negeri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

- a. Meningkatnya koordinasi unit kerja dengan mitra dari Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, LSM/Organisasi serta mitra Ditjen PPKL lainnya;
- b. Meningkatnya permintaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing mitra dengan lintas sektor terkait di dalam negeri.

Ketercapaian indikator kinerja selama tahun 2024, tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, tantangan tersebut adalah:

- a. Kebijakan pemotongan anggaran sampai dengan 50% TA. 2024;
- b. Kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kualitas udara ambien melalui pemasangan alat pemantauan kualitas udara secara otomatis;
- c. Sinergitas yang belum optimal dalam proses penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama.

Terhadap keberhasilan indikator tersebut diatas, Ditjen PPKL senantiasa berkoordinasi dengan Biro Perencanaan KLHK untuk meningkatkan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama, dengan melaporkan pada *database* kerja sama lingkup KLHK (tautan <https://bit.ly/KerjaSama-KLHK>), sebagai pengganti sementara aplikasi SIKERJA. Selain itu upaya selanjutnya adalah melakukan pengembangan database internal untuk memonitor progres layanan kerja sama lingkup Ditjen PPKL.

Sepanjang tahun 2024, Setditjen PPKL melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dalam hal evaluasi pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada COBSEA dan PEMSEA, serta pemenuhan kewajiban pelaporan dan administrasi pembayaran kontribusi tahunan yang dipersyaratkan. Setditjen PPKL juga secara rutin menyampaikan laporan triwulan untuk hibah proyek yang aktif di lingkup Ditjen PPKL kepada Biro Perencanaan Kementerian LHK.

Selain itu, Setditjen PPKL juga telah melaksanakan beberapa pertemuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hibah di lingkup Ditjen PPKL, diantaranya:

- a. Pembahasan Program Kerja KIFC Tahun 2024 pada tanggal 18 Januari 2024;
- b. *Steering Committee Meeting* Hibah Proyek *Restoration of Burnt Peatland in Jambi* bersama dengan mitra (KIFC) pada 5 Maret 2024;
- c. Pertemuan dengan mitra (GIZ) untuk Pemantauan dan Evaluasi Tahunan Hibah Proyek 3RproMar pada 31 Mei 2024;
- d. Pertemuan *Planning Workshop* Kerjasama Teknis Indonesia - Jerman Proyek *Integrated Peatland Management and Rehabilitation in Kalimantan* pada 29-30 Mei 2024;
- e. Pertemuan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan UNEP *Regional Director and Representative for Asia and the Pacific* untuk membahas Progress MoU dan Penyiapan RC3S sebagai RAC COBSEA pada 8 Oktober 2024;
- f. Pertemuan dengan PEMSEA *Resource Facility* untuk Membahas Progress Implementasi Proyek IRBM di Indonesia pada 5 November 2024 di sela EAS Congress 2024 di Xiamen, Tiongkok;
- g. Pertemuan Pemantauan Kegiatan dan Evaluasi *Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S)* Tahun 2024 dan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 pada 26 November 2024;

- h. Rapat Tindak Lanjut Proyek 3RproMar Pasca Perpanjangan Durasi Proyek dengan mitra (GIZ) pada 3 Desember 2024.

Kendala utama yang dihadapi pada proses ini adalah tingkat *ownership* yang belum memadai dari UKE II *Contact Point* dan berdampak pada:

- Data-data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi kurang terdokumentasi dan tidak dinarasikan;
- Inisiatif UKE II *Contact Point* tergolong minimum untuk melaksanakan proses evaluasi yang dilakukan, sehingga memerlukan fasilitasi dan panduan langkah demi langkah dari Setditjen PPKL.

11. Terselenggaranya Kesekretariatan PROPER

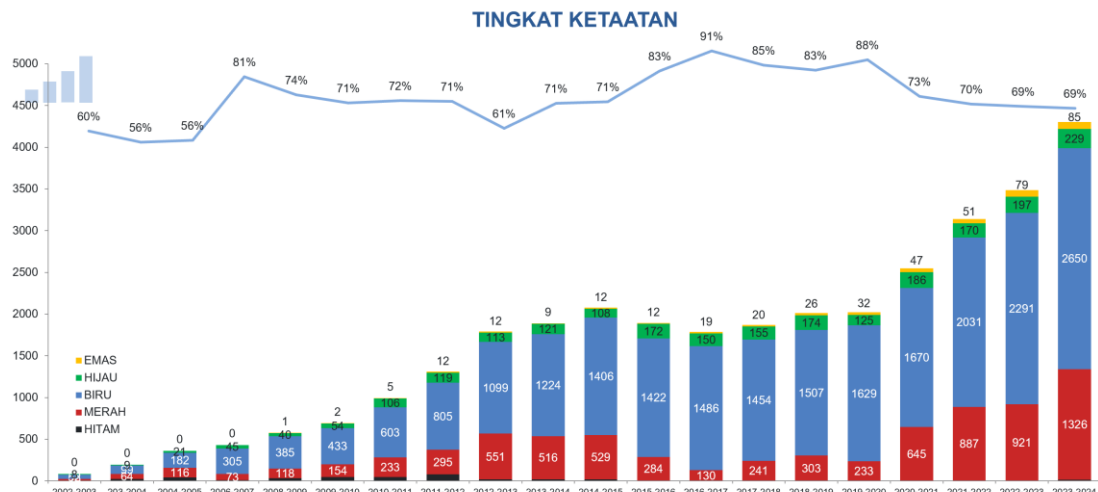
Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER Tahun 2024 sebanyak 4.495 perusahaan. Tahapan penyelenggaraan PROPER dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu persiapan, penilaian, inspeksi lapangan (bila diperlukan), supervisi, pemeringkatan sementara, sanggahan, penilaian lebih dari ketaatan dan pemeringkatan akhir. Hasil evaluasi ketaatan terhadap 4.495 perusahaan tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Gambar 29 berikut ini. Sebanyak 85 perusahaan berperingkat EMAS, 229 perusahaan berperingkat HIJAU, 2.650 perusahaan berperingkat BIRU, 1.326 perusahaan berperingkat MERAH, 190 perusahaan dikenakan penegakan hukum/tidak beroperasi/ditangguhkan. Jenis perusahaan dari 4.495 perusahaan tersebut terdiri dari 1.921 Agroindustri, 1.711 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 863 Pertambangan Energi Migas.

Dalam melakukan evaluasi ketaatan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dibantu juga oleh 33 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi yang terdiri dari 495 evaluator dan tim dari Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Hasanuddin. Dalam melakukan evaluasi, DLH disupervisi oleh KLH yang melibatkan Ditjen PPKL dan Ditjen PSLB3.



Gambar 29. Hasil Penilaian Ketaatan PROPER Tahun 2023-2024

Sumber: Sekretariat PROPER, 2024



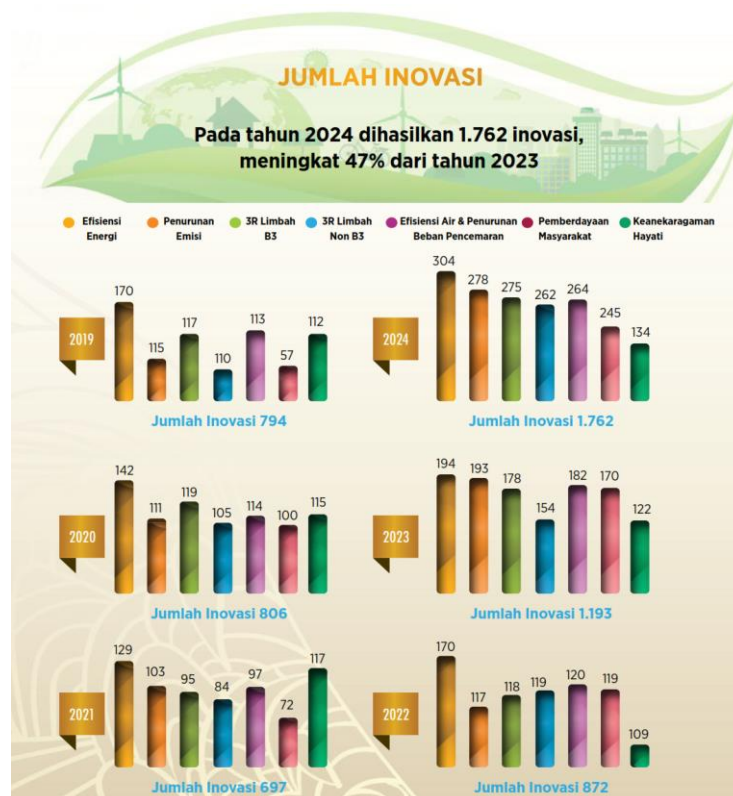
Gambar 29. Tren Ketaatan PROPER
Sumber: Sekretariat PROPER, 2024

Jumlah peserta Program PROPER tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 21,68% dari 3.694 perusahaan menjadi 4.495 perusahaan. Tingkat ketaatan peserta PROPER tahun 2024 mencapai 69% (2.964 perusahaan), yang secara rasio sama dengan tahun sebelumnya.

Eco-inovasi

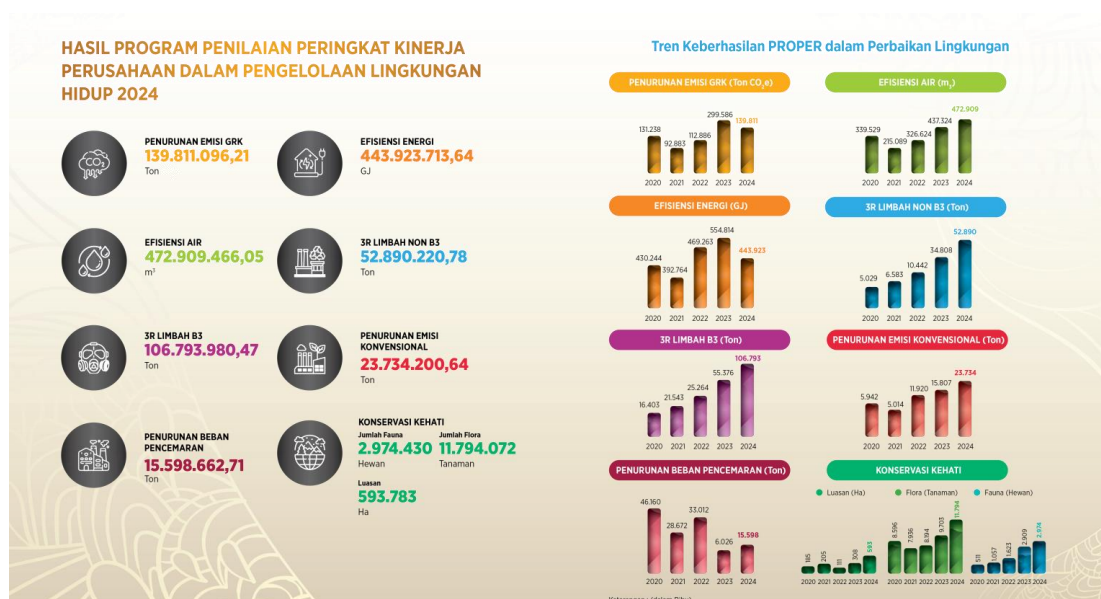
Eco-inovasi merupakan strategi yang berfokus pada menciptakan produk dan proses yang mendorong perusahaan untuk melakukan penelitian dan menggabungkan pengetahuan baru untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif, termasuk pengembangan produk berupa barang atau jasa, proses, metode pemasaran, struktur organisasi, atau pengaturan kelembagaan yang lebih baik, yang berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan dibandingkan dengan praktik-praktik yang ada.

Pada tahun 2024 ini tercatat 1762 eco-inovasi telah dilahirkan oleh perusahaan dengan penghematan total 239,43 Trilyun Rupiah atau 51% lebih hemat dari tahun 2023. Jumlah inovasi ini juga meningkat sebesar 47% dari tahun sebelumnya sejumlah 1193 inovasi. Eco Inovasi tahun ini mampu menghasilkan penghematan energi sebesar 443,92 juta GJ, penurunan emisi GRK sebesar 139,81 juta ton CO²eq, penurunan emisi konvensional sebesar 23,73 juta ton, reduksi Limbah B3 sebesar 106,79 juta ton, 3R limbah non B3 sebesar 52,89 juta ton, efisiensi air sebesar 472,91 juta m³, penurunan beban pencemaran air sebesar 15,60 juta ton dan berbagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati.



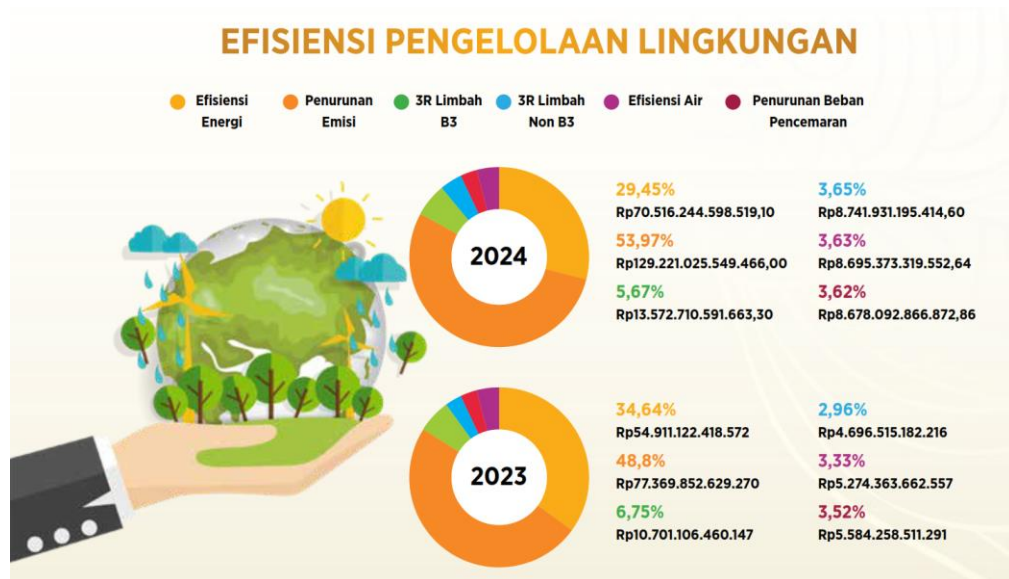
Gambar 31. Jumlah Eco-inovasi

Sumber: Sekretariat PROPER, 2024



Gambar 32. Nilai Absolut Kontribusi Perbaikan Lingkungan

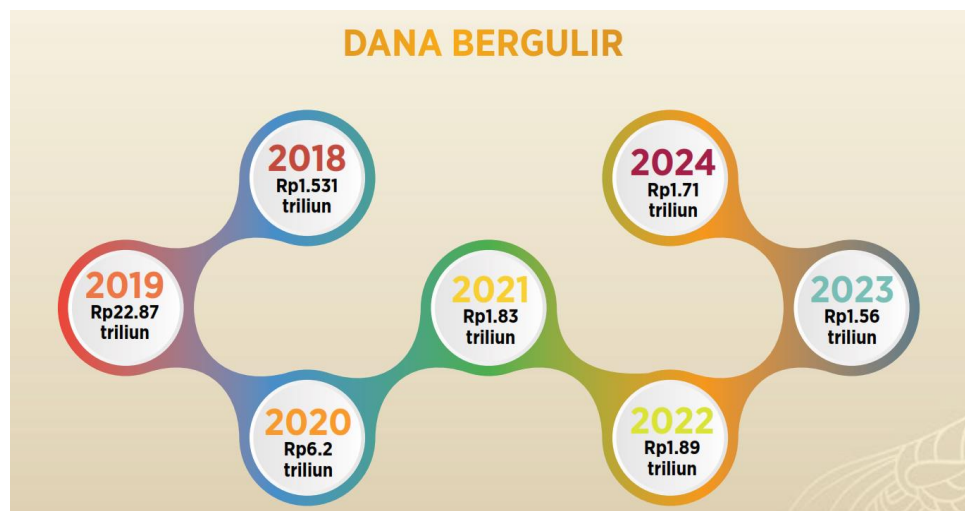
Sumber: Sekretariat PROPER, 2024



Gambar 33. Penghematan dari Upaya Perbaikan Lingkungan

Sumber: Sekretariat PROPER, 2024

Upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan ini ternyata juga berdampak positif terhadap masyarakat. Pada tahun 2024 ini tercatat dana Rp. 1,71 Trilyun telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,25% dari tahun sebelumnya.



Gambar 34. Dana Bergulir di Masyarakat

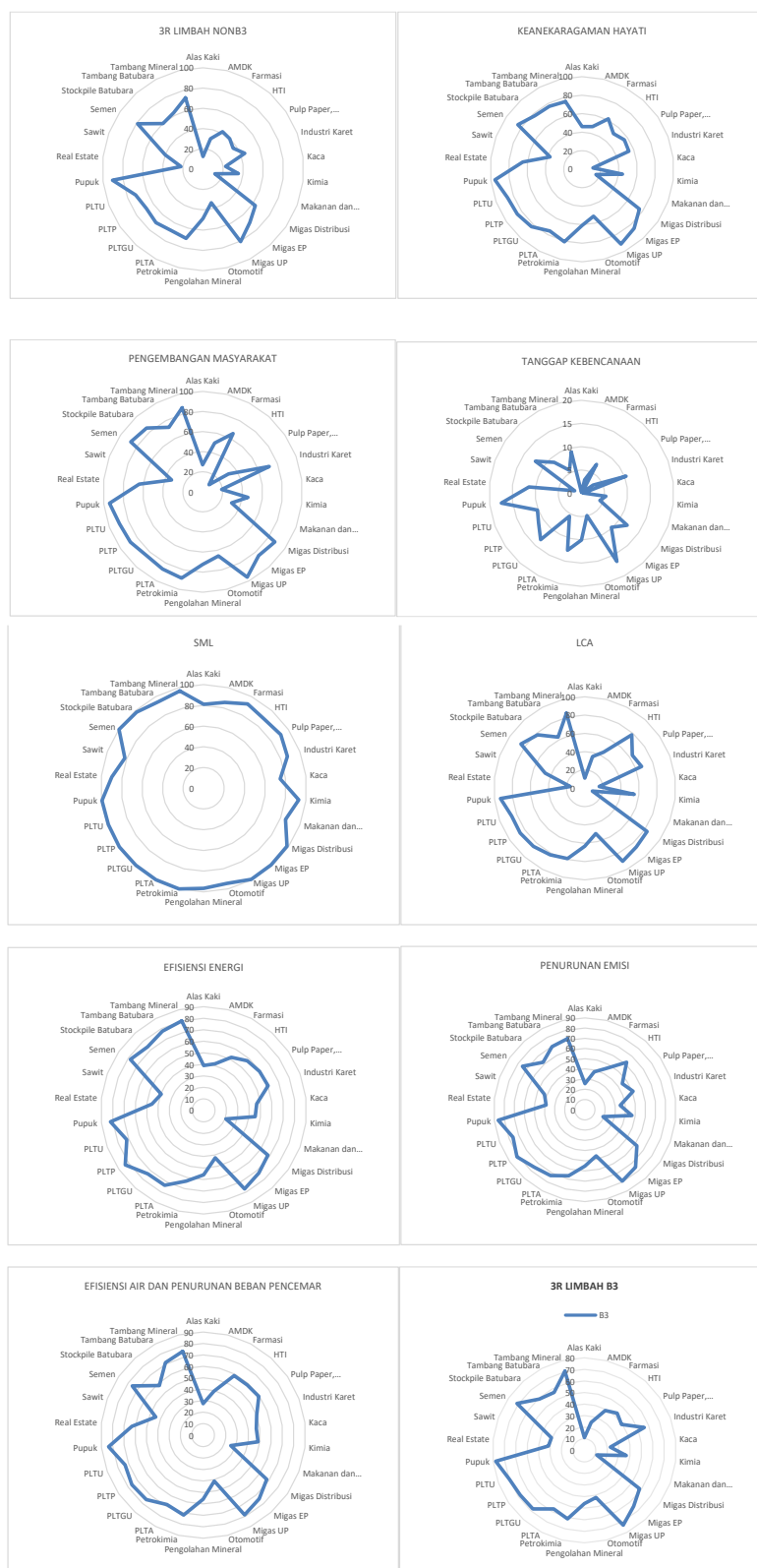
Sumber: Sekretariat PROPER, 2024

Dalam melakukan evaluasi aspek lebih dari ketaatan, KLHK dibantu oleh perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran dengan melibatkan 150 evaluator.

Benchmarking Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Kinerja perbaikan lingkungan juga bisa dilihat dari sektor industri yang berperingkat Hijau dan Emas. Berikut gambaran kinerja sektoral pengelolaan lingkungan perusahaan yang berperingkat Hijau dan Emas dari aspek Sistem Manajemen Lingkungan, pelaksanaan *Life Cycle Assessment*, efisiensi energi,

penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, 3R limbah B3 dan NonB3 konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan tanggap bencana.



Gambar 35. *Benchmarking* Sektoral Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Sekretariat PROPER, 2024

12. Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam konteks agenda global, PROPER juga berkontribusi sebagai hub penggerak partisipasi entitas bisnis untuk capaian pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam SDGs. Pada tahun ini terdapat 25.966 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikururkan sebesar 52,73 Trilyun Rupiah. Angka ini meningkat sebesar 36,32% dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan pada PROPER tahun 2018 silam. Kontribusi perusahaan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 36. Sebaran Kontribusi SDGs Dunia Usaha

Sumber: Sekretariat PROPER, 2024

Green Leadership

Tahun ini, PROPER mengembangkan kriteria *Net Positive* dalam penilaian *Green Leadership* - yang mana telah diadopsi sejak dua tahun yang lalu. Konsep *Net Positive* diangkat menjadi kriteria penilaian *Green Leadership* tahun ini bukan tanpa alasan. Paul Polman dan Andrew Winston dalam bukunya "*Net Positive : How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take*" menyerukan bahwa *Net Positive* menjadi paradigma baru bagi dunia bisnis yang mana perusahaan harus dapat memberikan dampak positif lebih besar daripada yang mereka ambil dari lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Bisnis tidak hanya harus bertahan di tengah tantangan global, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong terciptanya solusi. Dengan model *net positive*, perusahaan tidak hanya memastikan keberlanjutan mereka sendiri, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Pendekatan ini bukan hanya tentang tanggung jawab moral tetapi juga peluang besar untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang.

3.2.2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana memiliki 1 (satu) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Berdasarkan rencana kegiatan tahun 2024, semua target dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian penyerapan anggaran Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mencapai 98,40%. Efisiensi dan efektivitas kegiatan masing-masing sebesar

1,02 dan 1,00, yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan anggaran yang ada, serta seefektif tahun sebelumnya. Capaian Kinerja Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Capaian Kinerja Kabag Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2024

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Capaian Tahun 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2023	% Capaian 2024 terhadap Target Renstra 2024
1	Efektivitas layanan umum, pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	8	8	100	100	100
		Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	Laporan	12	12	100	100	100
		Jumlah Laporan pengelolaan BMN	Laporan	5	5	100	100	100
		Jumlah Laporan Layanan Rumah Tangga	Laporan	8	8	100	100	100
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	2	2	100	100	100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Laporan	1	1	100	100	100
		Pelaksanaan Layanan Persuratan	%	100	100	100	100	100
		Jumlah Laporan Layanan Kearsipan	Laporan	1	1	100	100	100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP	Laporan	5	5	100	100	100
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	100	100	100
		Rata-rata				100	100	100

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rerata capaian kinerja Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2024 mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2024 serta terhadap target Renstra 2024, maka capaian kinerja Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sudah mencapai 100%. Artinya semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dalam pencapaian *output* dan *outcome* yang diinginkan.

Berikut ini diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator unit kegiatan sesuai Tabel 40 di atas.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan siklus terakhir dalam pengelolaan keuangan namun mempunyai peran yang vital sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, Laporan Keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik. Dalam penyusunan Laporan Keuangan terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

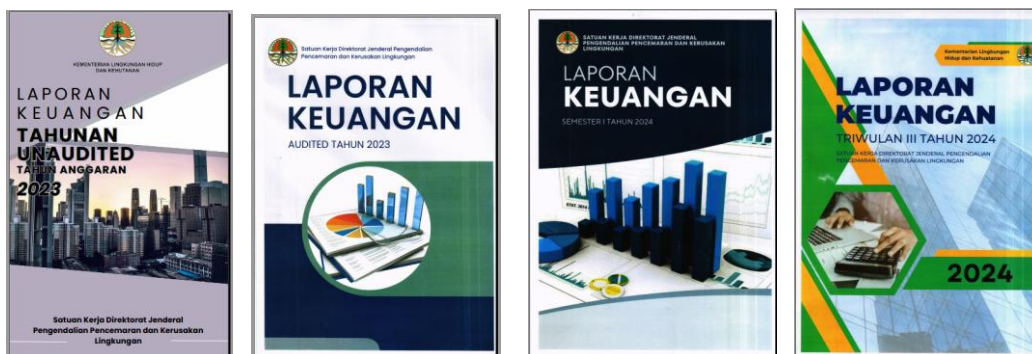
Penyusunan Laporan Keuangan pada Ditjen PPKL mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ditjen PPKL. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akutansi Keuangan Instansi (SAKTI) dan Monitoring Sistem Akutansi Keuangan Instansi (MONSAKTI). SAKTI dan MONSAKTI modul Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara.

Laporan Keuangan (LK) yang disusun selama tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) laporan, terdiri dari:

- a. LK Tingkat Eselon I sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu: LK Tahunan *Unaudited* Tahun 2023, LK Tahunan *Audited* Tahun 2023, LK Semester I Tahun 2024, LK Triwulan III Tahun 2024.



- b. LK Tingkat UAKPA (Satker) sebanyak 4 (empat) laporan, meliputi: LK Tahunan *Unaudited* Tahun 2023, LK Tahunan *Audited* Tahun 2023, LK Semester I Tahun 2024, LK Triwulan III Tahun 2024.



2. Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban (pelaporan):

- a. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah;
- b. Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN;
- c. Pelaksanaan anggaran merupakan siklus ketiga yang diwujudkan dalam eksekusi pendapatan maupun belanja pemerintah untuk mendukung program dalam Ditjen PPKL. Dalam siklus pelaksanaan anggaran, Ditjen PPKL melakukan pencairan anggaran dari bulan Januari – Desember tahun 2024. Pencairan anggaran dilakukan melalui metode UP/GUP, TUP/PTUP dan LS. Pencairan anggaran menggunakan Sistem Akutansi Keuangan Instansi (SAKTI) dan untuk monitoring pencairan anggaran menggunakan OMSPAN. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pencairan anggaran, pada tanggal 14 Oktober 2024 Setditjen PPKL mengadakan Sosialisasi PER-13/PB/2024 tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2024 bagi seluruh pengelola keuangan lingkup Ditjen PPKL;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan/kepala kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dalam lingkungannya. Pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2024, dalam rangka mendukung pengawasan pelaksanaan pencairan anggaran lingkup Ditjen PPKL, Setditjen PPKL mengadakan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pencairan Anggaran Tahun 2024 yang dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan pada Ditjen PPKL.
- e. Pertanggungjawaban (pelaporan). Laporan pengelolaan keuangan yang disusun selama 2024 sebanyak 12 laporan yaitu laporan pencairan anggaran Bulan Januari – Desember 2024 dan Rekonsiliasi SAKTI Bulan Desember 2023 – November 2024. Laporan Rekonsiliasi dimaksud berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Satuan Kerja dan KPPN yang telah ditandatangani secara elektronik.

3. Pengelolaan BMN

Penyusunan Laporan Pengelolaan BMN Tingkat Eselon I Ditjen PPKL mencakup seluruh Barang Milik Negara yang dikelola oleh Satker lingkup UAPPB-E1 Ditjen PPKL. Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Akutansi Keuangan Instansi (SAKTI) yakni sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk menyusun neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya. Aplikasi SAKTI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Monitoring Sistem Akutansi Keuangan Instansi (MONSAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Pengelolaan BMN Tahun 2024 telah tersusun sebanyak 5 (lima) laporan, yaitu: Laporan Keuangan (LK) Tahunan *Unaudited* dan *Audited* Tahun 2023, LK Semester I Tahun 2024, Laporan BMN Triwulan III Tahun 2024, Laporan Penghapusan BMN, dan Laporan RKBMN Tahun Anggaran 2026. Satker Setditjen PPKL telah menyusun LK tingkat satker (tingkat UAKPA) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Penyusunan LK Tahunan *Unaudited* dan *Audited* Tahun 2023 tertuang pada Laporan Keuangan KLHK Tahun Anggaran 2023 dan dilakukan hasil Reviu APIP

KLHK dengan nomor surat: ST.364/ITJEN/ITWIL.2.1/B/11/2024 tanggal 1 November 2024. Terkait hal tersebut, ringkasan laporan pengelolaan BMN Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Saldo Awal Tahun 2024 (per 1 Januari 2024) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Satker Ditjen PPKL adalah sebesar Rp. 331.864.219.414,- yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 323.438.001.554,- nilai BMN Ekstra Rp. 40.514.300,-.
2. Barang Persediaan Per Triwulan II 2024 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Satker Ditjen PPKL adalah sebesar Rp. 38.032.255.360,- terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 19.399.530.500,- dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 18.632.724.860,-.
3. Peralatan dan Mesin Per Triwulan II 2024 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Satker Ditjen PPKL adalah sebesar Rp. 303.711.146.232,- terdiri dari saldo awal sejumlah 2.630 unit dengan nilai sebesar Rp. 300.839.181.180,-, dan total mutasi tambah sebanyak 150 unit dengan nilai sebesar Rp. 2.871.965.052,-.
4. Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Satker Ditjen PPKL per 30 September 2024 adalah sebesar Rp. 1.693.750.950,- terdiri dari saldo awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 2.044.100.950,- dan mutasi kurang sebesar 1 unit senilai Rp. 350.350.000,-.



Gambar 37. Penyusunan LK Tahunan *Unaudited* dan *Audited* Tahun 2023

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024



Gambar 38. Penyimpanan BMN Rusak Berat

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024



Gambar 39. Serah Terima Hibah Barang Persediaan ke Kelompok Masyarakat
Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

Pada Tahun 2024 telah dilakukan proses penghapusan meliputi:

- Penghapusan Barang Persediaan Akun 526 yang diserahkan ke masyarakat sedang dalam proses penyelesaian dokumen penghapusan di Sekjen KLHK sebagai Pengguna Barang sebesar Rp. 4.924.475.000,- (Per 30 September 2024)
- Penghapusan Aset Tetap berupa barang inventaris kantor dengan jumlah keseluruhan 88 unit kondisi BMN rusak dengan nilai perolehan Rp. 12.922.000,-

Laporan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2026 berupa Rekomendasi yang telah disepakati oleh APIP ITJEN KLHK bahwa kendaraan bermotor umur lebih dari 20 tahun yang masih digunakan untuk mendukung operasional kantor agar dilakukan uji emisi untuk menentukan kelayakan dilakukan pemeliharaan, serta BMN yang belum dilakukan proses PSP agar segera dilakukan proses PSP-nya.

4. Layanan Rumah Tangga

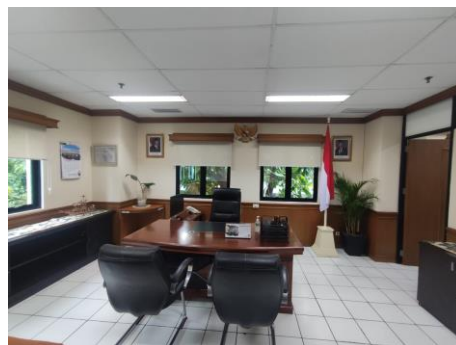
Laporan layanan rumah tangga telah tersusun sebanyak 8 (delapan) laporan, yaitu: Laporan triwulanan layanan kantor dan Laporan triwulanan pemeliharaan dan pengadaan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan laporan Layanan Rumah Tangga berdasarkan laporan Triwulan III Tahun 2024 meliputi:

- Layanan Kantor; Jumlah beban barang dan jasa untuk alat kantor dan rumah tangga periode per Triwulan III 2024 sebesar 1.187 unit dengan nilai Rp. 9.998.213.222,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1.130 unit dengan nilai sebesar Rp. 9.581.099.069,- dengan mutasi tambah jumlah barang sebanyak 57 unit dengan nilai sebesar Rp. 417.114.153,- dan mutasi kurang sejumlah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0.
- Pemeliharaan Kantor dan peralatan mesin; Jumlah beban pemeliharaan gedung dan peralatan mesin untuk layanan kantor untuk periode per 30 Nopember 2024 sebesar Rp. 1.219.584.304,- yang terdiri dari pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 195.370.000,-, pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 828.085.833,- dan Pengecetan ruang kerja kantor sebesar Rp. 196.128.471,-



Gambar 40. Penataan Ruang Kerja Menteri LH/BPLH

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024



Gambar 41. Pengecetan Ruang Kerja Wamen LH/BPLH

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, 2024

- c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas; Jumlah beban pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional untuk layanan kantor untuk periode per 30 Nopember 2024 sebesar Rp. 1.683.500.000,- dengan jumlah unit kendaraan roda empat sebanyak 42 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 18 unit.

5. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian kinerja indikator unit kegiatan laporan pelaksanaan SPIP Tahun 2024 telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5 (lima) laporan atau sebesar 100%. Hal tersebut didukung dengan telah tersusunnya Rencana Pengendalian Intern (RPI) Setditjen PPKL 2024 sebanyak 1 dokumen, serta Laporan Triwulanan SPIP Setditjen PPKL 2024 sebanyak 4 dokumen yang diinput melalui aplikasi SIMAWAS.

a. Rencana Pengendalian Intern (RPI) Setditjen PPKL 2024

Pada akhir Desember tahun 2023, telah dilakukan penyusunan RPI Setditjen PPKL yang diawali dengan penyusunan SK Tim Satgas dan Tim Pelaksana, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan survey penilaian lingkungan pengendalian terhadap 70 pegawai lingkup Setditjen PPKL serta analisis SWOT berdasarkan hasil survey.

Dari hasil identifikasi dan analisis risiko, diperoleh sebanyak 34 (tiga puluh empat) kejadian yang sudah ditetapkan mitigasi risiko untuk selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SOP pengendalian risiko setiap triwulan. Terhadap RPI Setditjen PPKL 2024 tersebut, juga telah dilakukan reviu lapis 2 oleh Setditjen PPKL dan reviu lapis 3 oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) KLHK. Selanjutnya, Catatan Hasil Reviu tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan RPI melalui aplikasi SIMAWAS.

b. Laporan SPIP Triwulanan Setditjen PPKL 2024

Dalam rangka pemantauan penyelenggaraan SPIP Setditjen PPKL setiap triwulan, telah dilakukan penyusunan laporan SPIP yang diinput melalui aplikasi SIMAWAS. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 34 (tiga puluh tiga) kebijakan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk tahun 2024, sampai dengan triwulan IV terdapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) SOP sudah berjalan efektif atau sebesar 94,12%, sedangkan 2 (dua) SOP belum berjalan efektif atau sebesar 5,88%. Untuk SOP yang belum berjalan efektif tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

c. Maturitas SPIP Ditjen PPKL 2024

Hasil Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Ditjen PPKL Tahun 2024 sebesar 4,1 (level 4). Selanjutnya, dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Assessor Itjen KLHK dan Evaluasi oleh BPKP. Berdasarkan evaluasi Hasil PM/PK Maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP, maka nilai Maturitas SPIP KLHK adalah sebesar 3,84 (berlaku untuk semua Eselon I lingkup KLHK), dan masih berada pada level 3. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPKP agar nilai maturitas SPIP lingkup KLHK pada 2024 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu berada pada level 4. Beberapa area perbaikan antara lain: (a) sasaran dan indikator kinerja senantiasa berorientasi *outcome*; (b) menjaga *cascading* sasaran strategis dan sasaran program; (c) perbaikan pengelolaan PNPB dan pengelolaan aset, khususnya terkait risiko pemisahan aset.

Tabel 40. Nilai Maturitas SPIP KLHK Periode 2022-2024

Tahun	Fokus Penilaian	2022	2023	2024
1	Maturitas SPIP	3,50	3,70	3,84
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,36	3,66	3,78
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,22	3,52	3,56
4	Kapabilitas APIP	3,5	3,73	3,80

Sumber: BPKP, 2024

3.3. Realisasi Anggaran

Setditjen PPKL memiliki 2 (dua) sasaran unit kegiatan. Anggaran DIPA Setditjen PPKL tahun 2024 setelah revisi sebesar Rp. 68.236.121.000,- (*enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 67.224.744.491,- (*enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*). Capaian penyerapan anggaran Setditjen PPKL sebesar 98,52%.

Capaian kinerja Setditjen PPKL pada Tahun 2024 sebesar 97,50% berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II. Namun penilaian SAKIP 2024 oleh Itjen KLHK belum dilaksanakan, sedangkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 sebesar 79,04. Secara rinci capaian penyerapan anggaran berdasarkan indikator unit kegiatan untuk masing-masing sasaran unit kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Capaian Penyerapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2024

No	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
1	Efektivitas Layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja sama Teknik dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RENCANA AKSI, RKAKL)	2.467.629.000	2.467.238.413	99,98
		Jumlah dokumen pelaporan untuk penyelenggaraan SAKIP (monev dan Laporan Kinerja)	680.598.000	680.459.113	99,98
		Jumlah layanan kehumasan	1.814.939.000	1.812.420.047	99,86
		Jumlah layanan data dan informasi	1.360.000	1.360.000	100,00
		Jumlah penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	227.357.000	222.131.972	97,70

No	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
		Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	106.210.000	106.070.690	99,87
		Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	103.413.000	100.038.500	96,74
		Jumlah kegiatan perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	402.534.000	401.023.402	99,62
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	46.460.000	46.432.606	99,94
		Jumlah Industri yang difasilitasi oleh kesekretariatan PROPER	11.200.000.000	10.637.366.244	94,98
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi oleh Sekretariat IKLH	99.902.000	99.550.103	99,65
		Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan	138.116.000	137.596.350	99,62
2	Efektivitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	49.259.674.000	48.306.570.035	98,07
		Jumlah Laporan Pengelolaan BMN	1.007.229.000	1.005.171.053	99,80
		Jumlah Laporan Layanan Rumah Tangga	10.802.985.000	10.767.591.308	99,67
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	445.482.000	443.493.238	99,55
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	369.420.000	369.419.175	99,99
		Pelaksanaan Layanan Persuratan	40.076.000	40.046.000	99,93
		Jumlah laporan Layanan Kearsipan	7.130.000	7.130.000	100,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP	180.509.000	175.905.381	97,45
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35.098.000	35.097.105	99,99
		Total**)	68.236.121.000	67.224.744.491	98,52

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2024

*) menggunakan anggaran Dit PPA

**) tidak termasuk anggaran PROPER

3.4. Efisiensi

Nilai efisiensi kegiatan dalam mencapai 2 (dua) sasaran unit kegiatan Setditjen PPKL diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Indikator kinerja "Jumlah kegiatan perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri" memiliki nilai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 1,51. Rataan nilai efisiensi kegiatan satker Setditjen PPKL tahun 2024 sebesar 1,09 (> 1) menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Secara lengkap, nilai efisiensi kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 42. Efisiensi Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian penyerapan anggaran (%)	Efisiensi
1	Efektivitas Layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja sama Teknik dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian	Jumlah dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RENCANA AKSI, RKAKL)	100	99,98	1,00
		Jumlah dokumen pelaporan untuk penyelenggaraan SAKIP (monev dan Laporan Kinerja)	100	99,98	1,00
		Jumlah layanan kehumasan	150	99,86	1,50

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian penyerapan anggaran (%)	Efisiensi
	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah layanan data dan informasi	100	100	1,00
		Jumlah penataan peraturan perundang-undangan	116,67	97,70	1,19
		Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	150	99,87	1,50
		Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	100	96,74	1,03
		Jumlah kegiatan perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	150	99,62	1,51
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	100	99,94	1,00
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	119,87	94,98	1,26
		Terselenggaranya kesekretariatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100	99,65	1,00
		Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa	100	-	-
2	Efektivitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Keuangan	100	99,62	1,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	100	98,07	1,02
		Jumlah Laporan Pengelolaan BMN	100	99,80	1,00
		Jumlah Laporan Layanan Rumah Tangga	100	99,67	1,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	100	99,55	1,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	100	99,99	1,00
		Pelaksanaan Layanan Persuratan	100	99,93	1,00
		Jumlah laporan Layanan Kearsipan	100	100,00	1,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP	100	97,45	1,03
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100	99,99	1,00
		Rata-rata			108,48

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

*) Menggunakan anggaran Dit. PPA

3.5. Efektivitas

Nilai efektivitas kegiatan dalam mencapai 2 (dua) sasaran unit kegiatan Setditjen PPKL diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan tahun 2024 terhadap capaian kinerja sasaran unit kegiatan tahun sebelumnya (tahun 2023), untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sudah efektif atau tidak efektif. Indikator kinerja "Terselenggaranya kesekretariatan PROPER" memiliki nilai efektivitas tertinggi yaitu sebesar 1,10. Rataan nilai efektivitas kegiatan satker Setditjen PPKL tahun 2023 sebesar 1,00 (=1) menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2024 seefektif tahun sebelumnya. Secara lengkap, nilai efektivitas kegiatan dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 43. Efektivitas Kinerja Unit Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Capaian Kinerja 2023 (%)	Capaian Kinerja 2024 (%)	Efektivitas
1	Efektivitas Layanan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja sama Teknik dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RENCANA AKSI, RKAKL)	100	100	1,00
		Jumlah dokumen pelaporan untuk penyelenggaraan SAKIP (monev dan Laporan Kinerja)	100	100	1,00
		Jumlah layanan kehumasan	150	150	1,00
		Jumlah layanan data dan informasi	100	100	1,00
		Jumlah penataan peraturan perundang-undangan	116,67	116,67	1,00
		Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	150	150	1,00
		Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	100	100	1,00
		Jumlah kegiatan perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	150	150	1,00
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	100	100	1,00
		Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	109,45	119,87	1,10
		Terselenggaranya kesekretariatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100	100	1,00
		Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa	100	100	1,00
2	Efektivitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Keuangan	100	100	1,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	100	100	1,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan BMN	100	100	1,00
		Jumlah Laporan Layanan Rumah Tangga	100	100	1,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	100	100	1,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	100	100	1,00
		Pelaksanaan Layanan Persuratan	100	100	1,00
		Jumlah laporan Layanan Kearsipan	100	100	1,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan SPIP	100	100	1,00
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100	100	1,00
		Rata-rata	108,01	108,48	1,00

Sumber: Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, 2024

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen PPKL Tahun Anggaran 2024 secara umum telah sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
2. Hasil evaluasi SAKIP Ditjen PPKL tahun 2023 oleh APIP sebesar 79,04. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (77,11). Adapun hasil evaluasi SAKIP 2024 akan diketahui pada tahun 2025.
3. Hasil evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim BPKP, sebesar 3,84 poin (Level 3);
4. Penyerapan anggaran Setditjen PPKL Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 67.224.744.491,- (*enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*) Capaian penyerapan anggaran Setditjen PPKL sebesar 98,52% dari total pagu anggaran sebesar Rp. . 68.236.121.000,- (*enam puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*).
5. Capaian kinerja Setditjen PPKL berdasarkan perjanjian kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024 mencapai 97,50% yang menunjukkan hampir semua target yang ditetapkan dapat tercapai, kecuali indikator kinerja Level Maturitas SPIP;
6. Efisiensi kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024 adalah 1,09 dan menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien;
7. Efektivitas kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024 adalah 1,00 dan menunjukkan pelaksanaan kegiatan seefektif tahun sebelumnya;

4.2. Saran

1. Melaksanakan rekomendasi hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024;
2. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian risiko kegiatan serta Maturitas SPIP;
3. Menciptakan budaya kerja untuk meningkatkan kinerja Ditjen PPKL;
4. Melakukan identifikasi resiko pelaksanaan kegiatan secara memadai;
5. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan E-Monev Ditjen PPKL untuk pelaporan kinerja individu berdasarkan output bulanan;
7. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk melibatkan semua pegawai dalam proses perencanaan dan pencapaian target kinerja;
8. Membuat perencanaan peningkatan kompetensi pegawai lingkup Ditjen PPKL;
9. Melakukan pemutakhiran data dan informasi di website Ditjen PPKL.

LAMPIRAN